

WARGA di seluruh pelosok negeri bergerak melakukan pemberdayaan. Mereka menyalakan api semangat turun tangan. Dan mendobrak keterbatasan akibat kemiskinan yang selama ini melilit kehidupan mereka. Warga tak lagi menjadi penonton dan pasif dalam pembangunan. Mereka justru menjadi ujung tombak dalam perubahan. Bahkan, inisiatif urunan dan gotong royong dari warga, ternyata mampu dan membuat kehidupan mereka semakin ringan.

Selama 15 tahun perjalanan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, jejaknya telah mengakar dan berdampak besar pada pembangunan negeri. Mulai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, dana simpan pinjam, keterlibatan perempuan hingga menyentuh kalangan marjinal.

Warga menikmati apa yang mereka bangun dan mimpikan selama ini. Termasuk memahami akan nilai transparansi, demokrasi, kemandirian, kesetaraan, egaliter dan kepedulian sosial. Nilai-nilai yang selama ini ingin disemai dari PNPM Mandiri.

Buku ini memotret setiap kisah perjuangan dari pelaku pemberdayaan. Mulai dari kepulauan Sangihe dan kepulauan Raja Ampat, di Samudera Pasifik hingga menembus dan menemui warga yang tinggal di belantara hutan Kalimantan. Melihat secara dekat bagaimana obor semangat turun tangan itu menyala. Dan bisa memberi terang pada kehidupan warganya.

Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara





BERDAYA DI KAKI LANGIT INDONESIA

Penanggung jawab
Metta Dharmasaputra

Penyunting
Ade Wahyudi
Ahmad Yunus
Heri Susanto
Metta Dharmasaputra

Penulis
Adek Media Roza
Ahmad Yunus
Dewi Cholidatul
Hadi Suprpto
Heri Susanto
Nurkhoiri
Sunarni

Riset & Data
Ahmad Yunus
Citra Lestari
Donang Wahyu
Heri Susanto
Ikhwan Maulana
Yasmin Kapitan

Foto
Donang Wahyu

Desain & Infografis
Zulfikar Safari

Ilustrasi
Hendy Prakasa
Wendi

Produksi
Cecillius Harjono

Marketing
Anita Rima Dewi
Imelda Jane



PT Katadata Indonesia
JI Utan Kayu No 68H
Matraman, Jakarta Timur 13120, Indonesia

Suite 4802, Menara BCA Grand Indonesia
JI MH Thamrin No 1
Jakarta Pusat 10310, Indonesia

© Cetakan Pertama, Mei 2014
ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

8	BAB I	MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN
22	BAB II	SEMANGAT TURUN TANGAN
38	BAB III	PEREMPUAN BERGERAK
56	BAB IV	CARA TAK BIASA
76	BAB V	LABORATORIUM DEMOKRASI AKAR RUMPUT
94	BAB VI	ORANG TERPINGGIRKAN BICARA
112	BAB VII	DI TITIK NOL KORUPSI
126	BAB VIII	TUNAS KEMANDIRIAN



COVER

Ilustrasi: Hendy Prakasa
Desain: Zulfikar Safari

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr. Wb



AGUNG LAKSONO

Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
(2009 - 2014)

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun angkanya terus menurun dari 25 persen pada masa krisis 1998 menjadi 11,37 persen pada 2013, kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat. Selain terbatasnya anggaran, kemiskinan di negeri ini dihadapkan pada problem struktural, seperti tertutupnya akses warga miskin terhadap sumber-sumber daya ekonomi, keuangan, sosial, dan politik. Tak hanya terisolasi dan terbelakang, sebagian besar dari mereka juga terpinggirkan.

Banyak cara telah dilakukan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, di antaranya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya. Pemerintah Indonesia juga memiliki program lain yang sangat unik untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan berkepanjangan. Program yang dikenal dengan sebutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini menjadikan warga miskin sebagai subjek. Bahkan mereka ikut terlibat dari awal sampai akhir program.

Sejak diluncurkan pada tahun 1998 silam, program ini telah menjangkau lebih dari 6.600 kecamatan dan

lebih dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Beragam hasil juga telah dicapai melalui program berbasis komunitas terbesar tersebut. Tidak hanya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, program ini juga meningkatkan konsumsi per kapita keluarga.

Di sisi lain, akses masyarakat miskin juga semakin luas dan terbuka terhadap prasarana dasar, pasar, pusat-pusat pelayanan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sumber air bersih. Mereka kini mudah menjangkau sekolah, poliklinik, puskesmas, dan dokter. Akses ini bias terwujud setelah dibangun beragam sarana dan prasarana fisik melalui PNPM.

Beragam prestasi tersebut sudah dipublikasikan di berbagai media massa, baik yang berskala local maupun nasional, termasuk penyimpangan serta kekurangannya. Beberapa buku dan laporan yang mengulas soal pencapaian dan cerita sukses PNPM juga sudah diterbitkan. Namun, di balik angka-angka keberhasilan, juga kekurangannya, sesungguhnya tersimpan *value* atau nilai-nilai luhur yang selama ini kurang bergaung. Padahal nilai inilah yang menjadi dasar dan kekuatan di balik kesuksesan serta keberlanjutan program pemberdayaan warga miskin.

Dalam buku ini, *value* yang sangat melekat dan menjadi ciri khas PNPM tersebut diulas satu persatu secara

mendalam. Tidak hanya membuat kaum miskin dan marginal bisa mewujudkan impiannya, nilai-nilai ini juga mengubah paradigma mereka atas program-program pemberantasan kemiskinan. Tentunya, ini patut dijadikan teladan dan dijaga keberlangsungannya.

Nilai-nilai tersebut di antaranya pemberdayaan, demokrasi, transparansi, kemandirian, gotong-royong, inklusivitas, inovasi, dan kesetaraan gender. Sebagian dari prinsip itu, seperti gotong-royong dan kebersamaan untuk turun tangan, seolah hamper memudar dalam budaya masyarakat Indonesia. Melalui buku ini, kebangkitan semangat gotong-royong yang kurang terekspos, sekaligus berbagai contohnya, dipaparkan secara gamblang.

Selain itu, masyarakat di tingkat *grass root* atau akar rumput biasa menerima hal atau nilai baru yang selama ini belum biasa mereka lakukan, seperti mengajarkan prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan kelompok miskin. Demikian halnya dengan prinsip transparansi atau keterbukaan dari awal perencanaan hingga pengawasan atas hasil proyek.

Untuk mengungkap *value* ini dari fakta di lapangan, ulasan dalam buku ini didasari testimoni dan kesaksian para pelaku dan *stakeholder* yang terlibat dalam PNPM. Pihak yang berkepentingan, mulai menerima fasilitator

atau pendamping, aparat desa, pejabat daerah, pejabat pusat, anggota DPRD dan DPR, sampai para *stakeholder* terkait PNPM lainnya. Testimoni juga tidak dibatasi hanya yang positif atau baik, tapi juga yang kurang baik dengan maksud sebagai masukan untuk perbaikan program ini ke depan.

Melalui pemaparan nilai-nilai PNPM dari para pelaku ditingkat *grass root* hingga petinggi di pusat pemerintahan, kami berharap buku ini menjadi sumber referensi penting bagi para *stakeholder* dan masyarakat luas. Terlebih bagi pemerintah baru yang akan menggantikan pemerintah saat ini agar program yang terbukti membawa nilai-nilai baik ini biasa dilanjutkan guna memberdayakan masyarakat miskin di seluruh wilayah Nusantara. ■

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, April 2014
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia

Agung Laksono

**PROF. DR. BOEDIONO**

Wakil Presiden Republik Indonesia
(2009 - 2014)

Krisis ekonomi 1997-1998 telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Di kala menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saya benar-benar merasakan besarnya dampak resesi bagi perekonomian negeri ini. Tak hanya memukul pertumbuhan ekonomi dan membuat angka inflasi meroket, krisis telah memicu gelombang pengangguran dan ledakan kemiskinan. Bahkan, angka kemiskinan melesat dari 15 persen menjadi 25 persen hanya dalam tempo setahun, pada 1998.

Pada saat itu, kami di Bappenas menggodok program pemberdayaan masyarakat guna mencari jalan keluar dari jebakan krisis, khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dari hasil pengkajian tersebut, lahirlah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini ditujukan sebagai respons cepat untuk memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri dari terjangan badai krisis. Sebagai sebuah inovasi, proses birokrasi dipangkas. Penyaluran dana tidak menggunakan jalur birokratis, melainkan langsung dikirimkan ke kecamatan.

Pada 1998, program ini pertama kali diluncurkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam perjalanannya, program ini terus menggelinding dan dilakukan di kecamatan-kecamatan lainnya. Awalnya, jumlah anggarannya tidak besar, namun skalanya kemudian terus

membesar dan meluas. Jenis programnya juga semakin beragam. Kemudian, digulirkan juga untuk wilayah perkotaan, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada 1999. Dari PPK dan P2KP, namanya kemudian diubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada 2007.

Sejauh ini, visi pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai. Namun, setidaknya dalam 16 tahun perjalanan PNPM, banyak hasil yang telah dicapai. Beragam proyek infrastruktur telah terbangun di lebih dari 6.600 kecamatan di seluruh Indonesia. Lebih dari 100 ribu kilometer jalan dibangun. Belum lagi pengadaan jembatan, sarana air bersih, sistem irigasi, sarana kesehatan dan pembangunan gedung sekolah.

Di luar hasil nyata berupa sarana dan prasarana fisik, PNPM juga memberikan dampak positif yang tidak terlihat secara kasat mata, namun akan bermanfaat di masa depan. Melalui program ini, komunitas di akar rumput, baik di perdesaan maupun di perkotaan menjadi semakin andal, mandiri, transparan, dan demokratis. Semangat gotong-royong dan swadaya kembali hidup. Kemampuan ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan simpan-pinjam dana PNPM pun menjadi semakin andal sebagai manajer keuangan.

Dari hasil kunjungan ke berbagai daerah, saya mencermati salah satu kunci keberhasilan PNPM adalah keterlibatan langsung dan penuh dari masyarakat.

Mereka berembuk dan memecahkan sendiri masalahnya secara musyawarah. Bahkan, mereka terlibat dari awal perencanaan program, pembahasan, pelaksanaan hingga pengawasan secara bersama-sama. Hakikat dan filosofi bahwa PNPM berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sangat jelas terlihat dalam pelaksanaan program ini.

Karena itu, tak mengherankan jika kemudian muncul dan berkembang komunitas-komunitas pelaku PNPM yang sudah terbiasa dan matang berdemokrasi dalam mencari solusi di tingkat *grass root*. Dari program ini pula lahir pemimpin-pemimpin baru dari berbagai pelosok Nusantara. Mereka inilah yang akan membawa kemajuan bagi desa dan wilayah masing-masing. Bahkan, lebih dari seribu fasilitator dan pengurus PNPM mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilihan Umum 2014.

Selain dampak positif, saya akui dalam pelaksanaannya memang masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan walaupun dalam skala kecil. Penyelewengan ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena meskipun nilai atau persentasenya kecil, hal ini merupakan ciri dari *bad governance* atau tata kelola yang buruk. Sejauh ini, penyimpangan tersebut telah ditangani dengan baik.

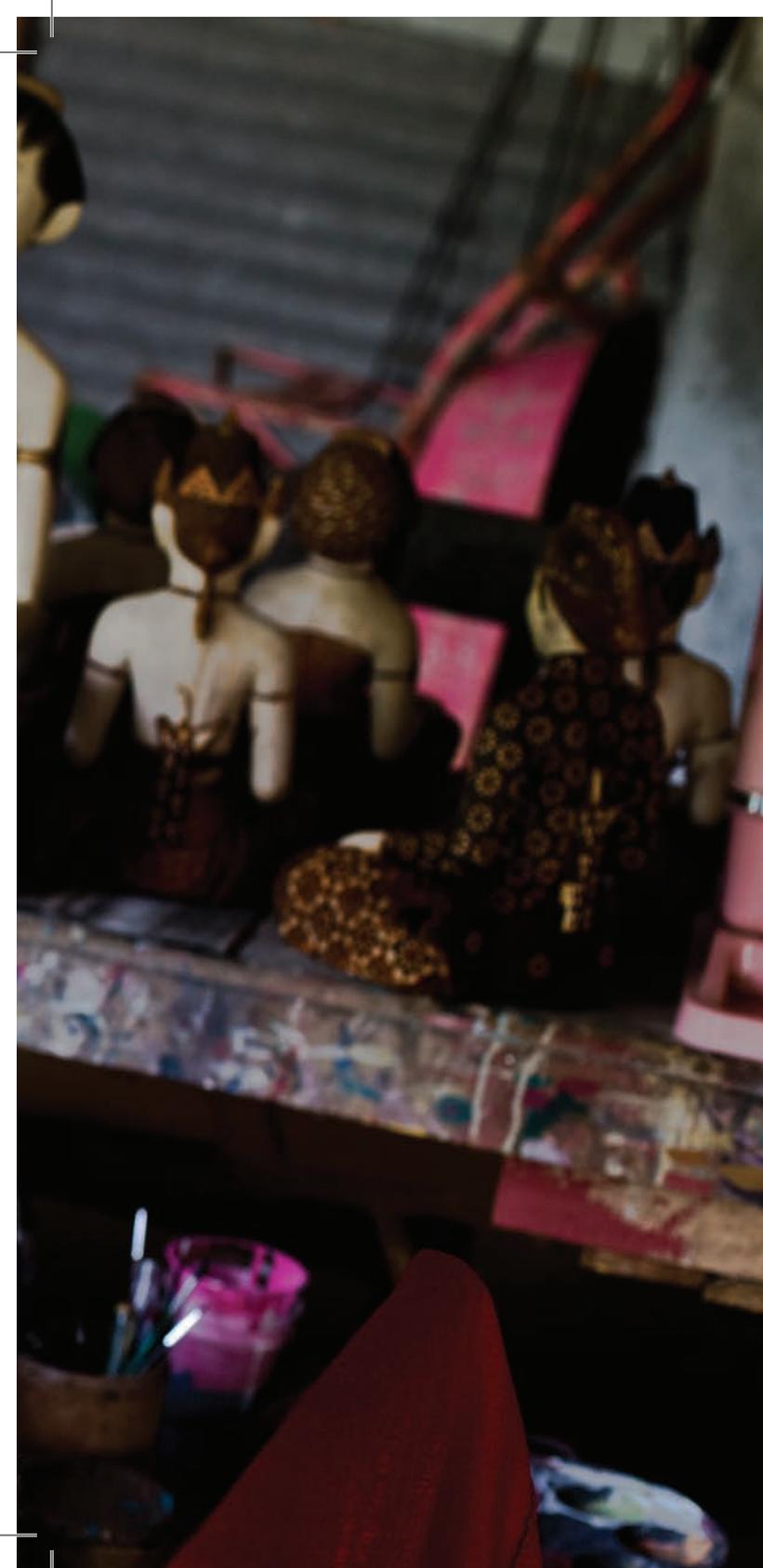
Berkaca dari pengalaman pemberdayaan masyarakat miskin selama ini, PNPM telah terbukti menjadi program dengan desain unik yang layak untuk dipertahankan dan

diteruskan. Banyak keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan di satu daerah menjadi contoh daerah-daerah lainnya untuk melakukan program serupa. Beberapa daerah yang dikenal sukses menjalankan PNPM didatangi oleh pejabat atau perwakilan dari daerah lainnya.

Bukan hanya untuk kalangan domestik, PNPM juga telah menjadi program memerangi kemiskinan berbasis komunitas terbesar yang telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia menjadi tempat untuk belajar bagaimana program pemberdayaan masyarakat dijalankan. Banyak negara telah mengirimkan para ahlinya untuk mengadopsi program ini guna diterapkan di wilayah mereka. Beberapa di antaranya adalah Mongolia, Kenya, Haiti, Afghanistan, Pakistan, Vietnam, Laos, Tiongkok dan India.

Melalui buku yang secara khusus mengupas nilai-nilai luhur dari PNPM ini, saya menitipkan pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden baru hasil Pemilihan Umum 2014 pada Juli mendatang agar meneruskan program ini. Sebab, program ini sudah terbukti memberikan banyak manfaat bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nama PNPM bisa saja berubah, namun esensi dan nilai-nilai dari program ini sangat penting untuk diteruskan oleh pemerintah mendatang. Sungguh sayang, jika program yang terbukti bagus ini dihentikan. ■





MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN

Keberhasilan PNPM Mandiri dalam pemberdayaan tidak hanya diakui di dalam negeri. Banyak negara lain yang menimba ilmu dari Indonesia soal program pemberdayaan masyarakat ini.

“SEMANGATNYA LUAR
BIASA. MEREKA MAU
BEKERJA UNTUK
MEMBANGUN DESANYA.”

**Sulastri, pendamping PNPM dari
Kecamatan Panggunrejo**



Dusun Kalibentak terletak di wilayah pegunungan selatan Jawa, dusun ini merupakan daerah terpencil di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski masih berada di Pulau Jawa yang dikenal jauh lebih maju dibanding pulau lain, dusun ini sangat sulit diakses. Kondisi jalannya terjal, menanjak, dan menikung sehingga sulit dilewati sepeda motor sekalipun.

Dengan kondisi terisolasi tersebut, warga Dusun Kalibentak jauh tertinggal. Mereka tidak punya akses terhadap pendidikan, puskesmas, pasar, perbankan, kantor desa, dan lainnya. Cerita ibu melahirkan di jalan karena sulitnya akses ke puskesmas bukan isapan jempol. Begitu pun cerita anak tidak bisa pergi ke sekolah pada saat musim hujan karena jalan berkubang lumpur tanah liat sehingga tidak bisa dilintasi.

Dusun Kalibentak hanya salah satu contoh kantong kemiskinan dari ribuan dusun yang terisolasi atau terpinggirkan di Indonesia sebelum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hadir di lokasi mereka. Di luar Dusun Kalibentak, ratusan hingga ribuan dusun lain menghadapi keterbatasan akses infrastruktur jalan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, sehingga masyarakatnya tidak berdaya dan terjebak dalam kemiskinan selama puluhan tahun.

Di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan negara di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, selama puluhan tahun warga hidup dalam kegelapan malam karena tidak ada akses listrik. Di pulau-pulau terpencil, penduduk tidak mempunyai akses terhadap perbankan sehingga terjerat rentenir. Di daerah-daerah tandus, seperti di Nusa Tenggara Timur, warga harus terlibat konflik yang berujung pada saling bunuh karena memperebutkan sumber air.

Di perkotaan, kantong-kantong kemiskinan tersebar di lingkungan kumuh dan tidak sehat, baik di bantaran kali maupun di perkampungan padat penduduk. Bukan lagi persoalan infrastruktur jalan, air, atau listrik yang dihadapi, melainkan ketidakberdayaan karena berbagai sebab, seperti tidak adanya modal, pengalaman, dan keahlian.

Di luar itu, ada pula golongan atau komunitas masyarakat yang terpinggirkan. Mereka adalah kelompok marginal yang tidak mendapatkan akses terhadap pembangunan karena berbagai ketidakadilan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Mereka terkucil karena dituduh terlibat partai terlarang, berasal dari suku minoritas, menjadi korban konflik, mengidap penyakit tertentu, menjadi pekerja seks, mantan narapidana kasus kriminal, serta anak-anak jalanan, dan banyak lagi.

Mereka adalah bagian dari 28 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebelum PNPM Mandiri hadir—yang diawali dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998 dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) pada 1999, banyak dari mereka yang belum

merasa diperhatikan oleh pemerintah. Sebut saja Sutilih. Perempuan tua yang dianggap “berbau” Partai Komunis Indonesia ini merasa terpinggirkan karena tidak pernah menerima Bantuan Langsung Tunai. Atau pengakuan penduduk di dusun-dusun perbatasan Kalimantan yang belum pernah merasa bersinggungan dengan pembangunan bahkan sejak Indonesia merdeka pada 1945.

Namun, setelah PNPM Mandiri hadir, mereka mulai merasakan kehadiran pemerintah. Dusun-dusun yang semula terisolasi kini mudah mengakses pasar, sekolah, dan puskesmas setelah dibangun jalan dan jembatan. Warga yang semula sering terlibat konflik karena berebut air kini menjadi akur setelah air mengalir ke rumah-rumah mereka. Anak-anak di wilayah perbatasan bisa belajar pada malam hari karena listrik telah hadir. Penduduk di pelosok dan pulau terpencil bisa meningkatkan kesejahteraan setelah mendapatkan bantuan dana pinjaman bergulir dari program kegiatan PNPM Mandiri.

“Saat akses sulit, harga panen dari kebun murah. Namun, setelah infrastruktur jalan mulus, harganya naik,” ujar Sulastri, fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, bercerita mengenai kisah warga di Dusun Kalibentak, Desa Panggungrejo, Blitar. Cerita yang hampir sama muncul dari berbagai dusun di wilayah-wilayah lain di seluruh Nusantara yang sudah terbebas dari isolasi karena tidak ada akses jalan atau jembatan. Setidaknya, lebih dari 120 ribu kilometer jalan telah dibangun sejak program ini dijalankan 16 tahun silam. Itu belum termasuk jembatan, sarana air bersih, penerangan, sekolah, posyandu, dan lainnya.

Dalam kurun waktu tersebut, PNPM Mandiri, termasuk PPK dan P2KP telah mengalokasikan dana sekitar Rp 84,5 triliun dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat. Menjangkau lebih dari 6 ribu kecamatan dan 73 ribu desa serta 8 ribu komunitas perkotaan, kedua program tersebut berhasil meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Bahkan masyarakat telah terlibat langsung dalam proses demokrasi pengambilan keputusan pemilihan proyek dalam PNPM Mandiri.

“Dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri menjadi program yang melekat di hati rakyat dan dinilai berhasil memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Kesra Agung Laksono. “Tidak hanya berhasil di dalam negeri, negara-negara lain juga belajar dari Indonesia mengenai pemberdayaan masyarakat miskin.”

Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, mengungkapkan, kehadiran PNPM telah membuat warga negara yang semula merasa terpinggirkan, terkucil, dan tidak berdaya menjadi merasa diperhatikan, sehingga memiliki harapan untuk meraih mimpinya. “Saya yakin mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, dengan upaya mereka sendiri.” ■



“SAYA YAKIN MEREKA BISA MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA, DENGAN UPAYA MEREKA SENDIRI.”

Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat

EVOLUSI PNPM MANDIRI

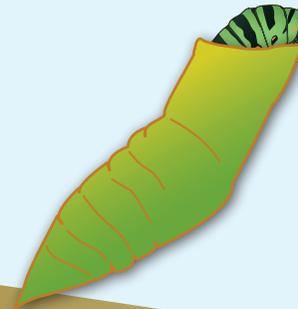
16 tahun perjalanan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berjalan. Program ini lahir untuk menjawab benang kusut kemiskinan di Indonesia pasca-krisis moneter. Keterlibatan warga di perdesaan dan perkotaan menjadi kunci penanganan kemiskinan dan pembangunan. Termasuk melibatkan peran serta perempuan dan kelompok terpinggirkan. Program ini menjadi program pembangunan berbasis komunitas terbesar di dunia.



1997 - 1998

KRISIS MONETER

Kemiskinan Indonesia berada di titik nadir pasca-krisis ekonomi. Angka kemiskinan melonjak dua kali lipat menjadi 49 juta jiwa menyerupai kemiskinan era 1980-an. Pemerintah Indonesia, didukung oleh Bank Dunia, merancang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk mengatasi krisis ini. Dana sekitar Rp 1 triliun dipersiapkan untuk mengawali kedua program tersebut.



2002 - 2005

MENGEMBANGKAN PPK & P2KP

Pemerintah Indonesia melanjutkan program PPK dan P2KP dari sumber keuangan negara dan daerah. Termasuk bantuan dan dukungan dari Bank Dunia. Kedua lembaga ini menilai, program pemberdayaan masyarakat ini telah mencapai target dalam mengatasi kemiskinan pasca-krisis ekonomi.



2006 – 2007

MENJADI PNPM MANDIRI

PPK dan P2KP melebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Pemerintah Indonesia memperluas jangkauan sasaran wilayah tersebut menjadi program nasional. Dan mencakup seluruh program pemberdayaan masyarakat yang tengah dijalankan kementerian atau lembaga lainnya.



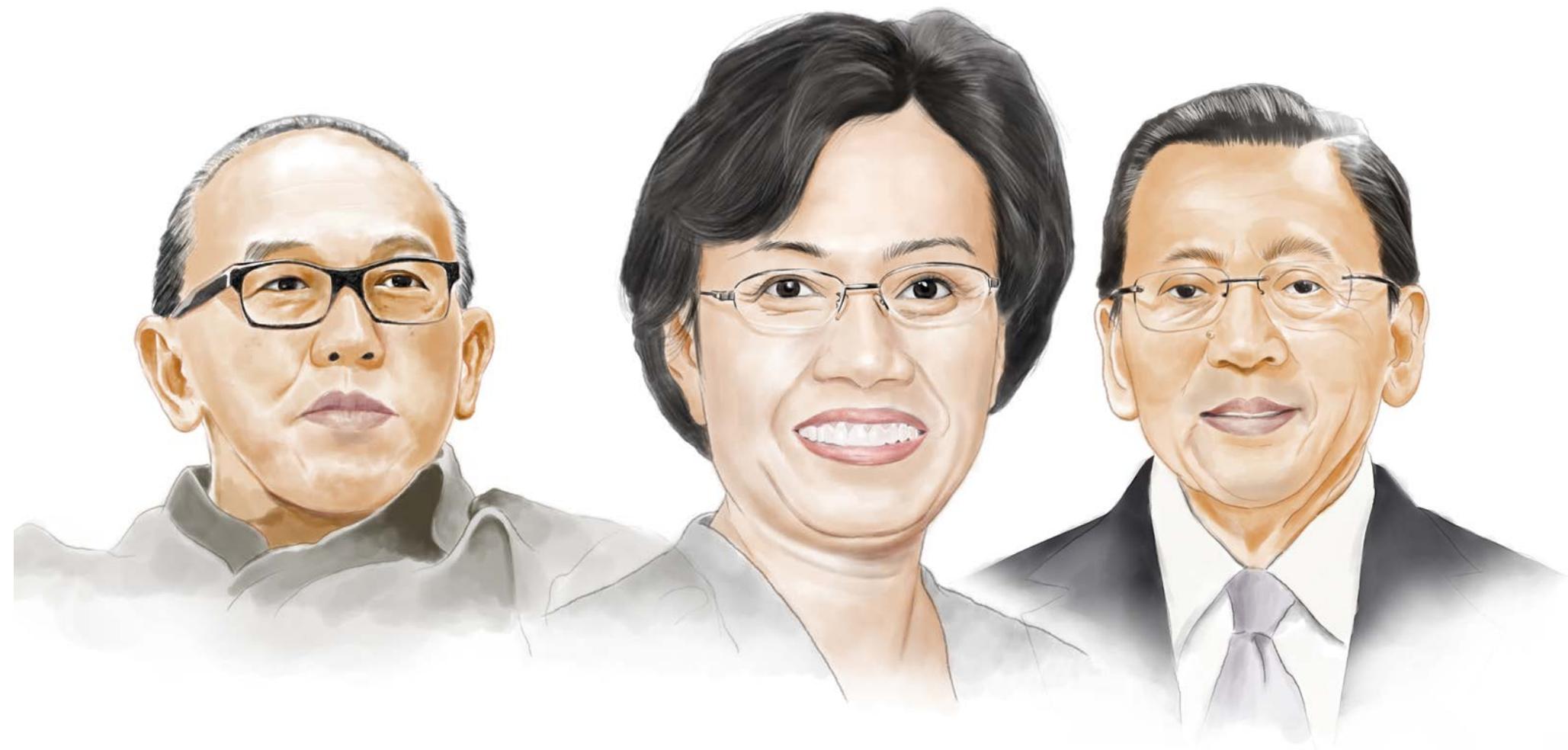
2014 –

MASA DEPAN PNPM MANDIRI

PNPM memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Warga tak lagi menjadi penonton dalam pembangunan. Sejumlah pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan program pemberdayaan ini. Sejumlah negara bahkan terinspirasi untuk mengadopsi program penanganan kemiskinan berbasis komunitas ini. Kini, masa depan PNPM berada di tangan pemerintahan berikutnya.

TIGA PUNGGAWA

Berkat komitmen kuat dari Sri Mulyani, Boediono dan Aburizal Bakrie, status PPK dan P2KP dinaikan menjadi program nasional sehingga menjadi payung bagi semua program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang menjangkau seluruh desa dan kecamatan di Indonesia.



“Saya terkesan, Program pemberdayaan ini bagus karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Senyum masyarakat menunjukkan bahwa mereka sangat senang dan bahagia,” ujar Wang Xiaolin, delegasi China saat mengunjungi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Bogor Tengah, Bogor pada 16 September 2011.

China adalah salah satu dari berbagai negara yang telah datang dan memuji program PNPM Mandiri. Negara-negara lain yang juga terkesan adalah India, Afghanistan, Laos, Pakistan, Vietnam, Haiti, Kenya dan lainnya. Selain faktor keterlibatan aktif masyarakat, mereka menyanjung PNPM karena di lapangan mereka menjumpai bahwa masyarakat desa telah menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, semangat kemitraan hingga turut mengawasi dan merasa memiliki program tersebut. Mereka pun ingin mereplikasi PNPM di negara masing-masing.

Tak bisa dipungkiri, keberhasilan program yang telah berlangsung 16 tahun ini karena diakui oleh dunia. Program ini terbukti turut berperan memangkas angka kemiskinan secara signifikan, dari 25 persen pada 1998 menjadi 11,4 persen pada 2013. Lebih dari ±170 ribu km jalan, 29 ribu km pipa air bersih, 46 ribu sekolah telah dibangun. Sekitar 7 juta warga miskin juga telah menerima pinjaman bergulir baik di desa dan kota, menurut catatan Pokja Pengendali PNPM Mandiri 2014.

Lantas, siapa sesungguhnya yang berperan besar di balik pelaksanaan program pemberdayaan berbasis komunitas terbesar di Indonesia yang telah menjangkau lebih dari 6 ribu kecamatan dan 70 ribu komunitas di seluruh Indonesia tersebut?

“Melihat sejarah perjalanan PNPM Mandiri, termasuk dalam menghadapi rintangan dan tantangannya, sejumlah tokoh pemerintah yang memberikan dukungan kuat terhadap implementasi program ini adalah Boediono, Sri Mulyani Indrawati dan Aburizal Bakrie,” ujar Deputy Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, dalam konferensi mengenai *Community Driven Development* pada November 2013 di Bali.

Boediono adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merintis program PNPM Mandiri saat krisis ekonomi meledak pada 1998. Saat itu, bersama tim di Bappenas, Boediono memimpin penggodokan Program Pengembangan Kecamatan sebagai respons cepat untuk mengatasi ledakan tingkat kemiskinan akibat perubahan politik dan krisis keuangan.

Pada saat menjabat posisi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian hingga Wakil Presiden, Boediono terus mengawal PPK dan P2KP yang kemudian berubah namanya menjadi PNPM Mandiri pada 2007. Dia juga selalu meluangkan waktu mengunjungi obyek PNPM Mandiri saat bertugas ke daerah.

“Melihat dampak yang dihasilkan, Sri Mulyani mendukung agar program PPK dan P2KP menjadi program nasional,” kata Sujana Royat.

Menurutnya, Sri Mulyani terkesan dengan kesiapan fasilitator saat bencana tsunami di Aceh. Mereka menjadi ujung tombak saat melakukan sigap bencana dan proses rehabilitasi pembangunan. Di tangan mereka, warga Aceh bisa bangkit dari keterpurukan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Sri Mulyani memegang peran penting saat dia menjabat Kepala Bappenas pada Oktober 2004 hingga Desember 2005. Pada masa itu adalah awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dengan munculnya tim ekonomi yang kuat, pemerintah kembali memangkas subsidi BBM sekaligus menyiapkan program perlindungan sosial bagi 20 juta keluarga miskin. Program transfer tunai bersyarat dan PNPM Mandiri terus dikembangkan.

Akan halnya Aburizal Bakrie, mantan Menko Kesejahteraan Rakyat era pemerintahan SBY-JK ini juga mendorong peningkatan program PNPM Mandiri pada akhir 2006. Program ini terbukti efektif mengurangi pengangguran dan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan, cara-cara tradisional yang sebelumnya dipakai tidak efektif dan tidak berdampak besar. Aburizal menegaskan PNPM Mandiri adalah program besar, strategis dan fundamental karena mencakup wilayah dan masyarakat luas.

Saat diluncurkan pada 2007, status PNPM Mandiri dicanangkan sebagai program nasional pengentasan kemiskinan sehingga anggarannya pun naik signifikan. Meski begitu, PNPM Mandiri belum didukung oleh elit dan pemimpin daerah, serta sejumlah kementerian di pusat. Namun, berkat dukungan kuat Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani dan Menko Kesra Aburizal Bakrie, PNPM Mandiri tidak hanya diperluas ke seluruh desa dan kecamatan di Indonesia. PNPM Mandiri juga bisa diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari belasan kementerian lainnya. Sepanjang 1998 - 2013, dana dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan saja yang dikucurkan sudah mencapai Rp 84,5 triliun. ■

GELOMBANG PNPM UNTUK DUNIA

Berbagai negara di dunia tengah mempelajari pendekatan PNPM dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program masif pemberdayaan yang berjalan 16 tahun ini dinilai berhasil. Tidak hanya menjangkau ke wilayah pelosok desa terpencil saja. Namun juga berhasil melibatkan peranan perempuan hingga kelompok marjinal. Mereka tak lagi menjadi penonton dalam pembangunan. Justru, menjadi ujung tombak dan penggerak pembangunan.

Selain itu, PNPM memang sarat nilai dan filosofis. Warga tak hanya sekedar menjalankan aktivitas. Namun, secara langsung warga belajar nilai-nilai transparansi, demokrasi, gotong royong, kesetaraan hingga kepedulian sosial. Keunikan ini, menjadikan PNPM berbeda dengan program sejenisnya.

“Program ini bisa menjadi pelajaran penting bagi negara lain,” kata Vikram Nehru, *Senior Associate of The Asia Program* dari *The Carnegie Endowment for International Peace* yang bermarkas di Washington DC. Menurutnya, kunci keberhasilan mengatasi kemiskinan terletak di tangan masyarakat sendiri.

Berdasarkan catatan Bappenas, hingga saat ini, Indonesia telah mendapat kunjungan dari 85 negara. Mulai dari China, Afganistan, Pakistan, Vietnam, India, Haiti, Kenya hingga Timor Leste. Mereka berkunjung ke daerah-daerah terpencil dan melihat langsung bagaimana warga bergerak dan mengatasi keterbatasan. Mulai dari Aceh hingga ke Pulau Semau di Nusa Tenggara Timur.

Berbagai perwakilan negara ini kagum dengan tantangan mengatasi kemiskinan di Indonesia. Tak

hanya terbatas dengan persoalan infrastruktur saja. Tapi kemiskinan di Indonesia juga berkaitan dengan persoalan konflik dan sosial budaya.

Ghulam Rosul Wahdi, perwakilan pemerintah Afganistan, menyatakan kagum bagaimana PNPM sanggup merangkul kelompok gerilyawan Aceh. Dan menjadikan mereka sebagai motor pembangunan di perdesaan. Pendekatan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintahan Afganistan untuk mengatasi kemiskinan di negerinya sendiri. Apalagi mereka juga memiliki sejarah panjang konflik bersaudara selama 30 tahun.

“Sebagai negara baru kita ingin belajar pada negara tetangga. Dan ini pengalaman berharga buat kami,” kata Menteri Muda Pembangunan Daerah Timor Leste, Dr Samuel Mendonca ketika berkunjung ke Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. “Kemiskinan adalah perang bersama.”

Pemerintahan Cina juga kagum dengan pendekatan partisipasi warga dalam pembangunan. Menurut mereka, langkah ini dinilai tepat dan warga bisa belajar banyak mulai dari nol hingga memantau setiap program pembangunan.

“Kita ingin tahu bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya pada pemerintahan daerah. Ini sesuatu yang menarik,” kata delegasi dari pemerintahan India.

Kemiskinan adalah perang sepanjang hayat. Dan PNPM menjadi model terbaik bagi dunia untuk melawan kemiskinan. Dan Indonesia berkomitmen; bahwa kemiskinan adalah bagian sejarah yang pantas ditempatkan di ruang museum kehidupan. ■

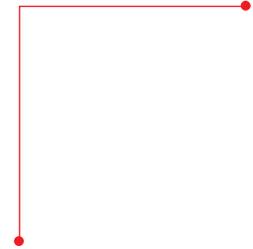
“KITA TERTARIK BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI KELOMPOK WARGA MISKIN DAN PEREMPUAN YANG BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN.”

Saleh Mohammad Samit,
delegasi pemerintah Afghanistan



“KITA BELAJAR BANYAK TENTANG PNPM DALAM MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN SISTEM KOMUNIKASI,”

Yongmei Zou, perwakilan Bank Dunia untuk India



“PENGENTASAN RAKYAT MISKIN JUGA HARUS DIDUKUNG OLEH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PRORAKYAT SEPERTI HALNYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA,”

Xiaojin, Menteri Penanggulangan Kemiskinan Cina



“KEMISKINAN ADALAH PERANG BERSAMA. DAN KITA INGIN BELAJAR PADA INDONESIA,”

Dr Samuel Mendoca,
Menteri Muda Pembangunan Timor Leste



MEMERANGI KEMISKINAN TANPA MELALUI JALUR BIROKRASI

Saat ini, prinsip pengentasan kemiskinan yang berbasis pada masyarakat telah diterapkan di seluruh dunia. Selain bertujuan memperkuat azas kegiatan produktif, kebersamaan, tanggung jawab dan akuntabilitas kolektif juga dilaksanakan tanpa melalui jalur birokrasi yang rentan korupsi.

Ancaman program pengentasan kemiskinan di Indonesia dan bahkan di berbagai negara miskin di dunia adalah korupsi yang menjangkiti birokrasi. Hal ini memunculkan ide dilaksanakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada masyarakat. Program ini dikenal dengan sebutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk menghindari korupsi, dalam program ini, dana pengentasan kemiskinan langsung dikirim dan diterima oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat memutuskan sendiri penggunaan dana dan mengawasinya secara bersama.

Pada 2004, pemerintah baru terbentuk di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Salah satu mandat yang dibebankan kepada pemerintah

SBY adalah mengurangi kemiskinan. Pada saat itu, Indonesia telah memiliki cikal bakal program pengentasan kemiskinan yang dikenal sangat efektif dan berbasis pada masyarakat yang awalnya dikenal dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Dalam kapasitas sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan kemudian sebagai Menteri Keuangan Indonesia, saya sangat mendorong agar program PNPM diperluas dan ditingkatkan

“PNPM JUGA DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMETAKAN LOKASI DAN KARAKTER KEMISKINAN MASYARAKAT YANG SANGAT BERAGAM DI INDONESIA SEHINGGA BERGUNA UNTUK MERANCANG PROGRAM KEMISKINAN YANG EFEKTIF.”

Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan RI (2005-2010)



skalanya agar bisa mencakup seluruh kecamatan dan desa yang memiliki masyarakat miskin. Tujuannya, agar dapat mencapai target pengurangan kemiskinan terutama di daerah yang masih sangat tertinggal.

PNPM memiliki banyak arti dan kegunaan dalam upaya memberantas kemiskinan. Pada tingkat nasional, PNPM digunakan sebagai alat konsolidasi program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga yang sering tidak jelas efektivitas dan akuntabilitasnya. PNPM juga digunakan sebagai sarana untuk memetakan lokasi dan karakter kemiskinan masyarakat yang sangat beragam di Indonesia sehingga berguna untuk merancang program kemiskinan yang efektif.

Yang paling penting, PNPM juga bermanfaat untuk menjaga dan bahkan memperkuat jalinan hubungan sosial antar masyarakat sendiri (*social fabric*) yang merupakan suatu kekayaan (*asset*) yang sangat berharga bagi suatu bangsa dan negara. Dengan PNPM, masyarakat bertanggung jawab sendiri untuk memikirkan aktivitas produktif yang akan memberikan kegunaan maksimal bagi mereka.

Melalui PNPM juga terjalin dan terbangun kemampuan untuk berorganisasi berdasarkan azas partisipasi (inklusif), persamaan hak (egaliter) dan transparansi, serta diterapkan prinsip akuntabilitas bersama. Artinya, PNPM akan memperkuat azas gotong royong yang sudah sangat melekat dalam diri masyarakat Indonesia untuk menunjang upaya mengatasi kemiskinan. Semua itu akan menjadi salah satu bentuk ketahanan sosial dan ekonomi yang sangat berguna dalam menjamin suatu proses pembangunan yang

berlandaskan kebersamaan, pemerataan dan tata kelola yang baik.

Saat ini, prinsip pengentasan kemiskinan yang berbasis pada masyarakat telah diterapkan di seluruh dunia. Penerapan prinsip tersebut bertujuan memperkuat azas kegiatan produktif, kebersamaan, tanggung jawab dan akuntabilitas kolektif dan tanpa melalui jalur birokrasi yang sering sangat tidak efisien dan rentan terhadap praktek korupsi.

Dalam konteks ini, Bank Dunia memperkenalkan sekaligus membantu banyak negara miskin dalam upaya menjalankan program pengentasan kemiskinan. Itu mencakup upaya membangun sistem jaring pengaman sosial, mengurangi kemiskinan itu sendiri, serta membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap gejolak ekonomi dan keuangan yang sering langsung menghantam dan semakin membebani masyarakat paling miskin.

Dengan berbagai langkah tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan dapat terus dilakukan secara makin efektif dan bertanggung jawab. Harapannya, upaya dunia dalam memberantas 1,2 miliar masyarakat miskin di seluruh dunia dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan dapat tercapai dalam jangka satu generasi ke depan. Dunia tanpa kemiskinan dan ketimpangan adalah masa depan yang dapat kita raih bila semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat dan dunia internasional saling bahu-membahu untuk memeranginya secara efektif. ■

PNPM MANDIRI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Warga menjadi kunci sekaligus kekuatan dalam setiap pembangunan. Mereka berembug untuk mengusulkan ide, melaksanakan kegiatan hingga mengawasi setiap program pembangunan. Warga di perdesaan dan perkotaan bergerak mengatasi setiap hambatan.

Kini, kerja keras mereka mulai berbuah hasil. Warga tak lagi kesulitan dan terpinggirkan dalam pembangunan. Warga mampu membuktikan untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Mereka tak lagi menjadi penonton dalam pembangunan.

PNPM Perdesaan

Menjangkau 63 ribu desa

Total Dana

Rp 74,46 triliun
(1998-2014)

PNPM Perkotaan

Total Dana

Rp 10, 189 triliun
(2000-2014)

Sumber:

Paket informasi PNPM Mandiri 2014, Pokja
Pengendali PNPM Mandiri

● 27 ribu unit sarana air bersih

● 76 ribu unit sarana air bersih

● 38 ribu bangunan sekolah

● 6 ribu unit sarana pendidikan

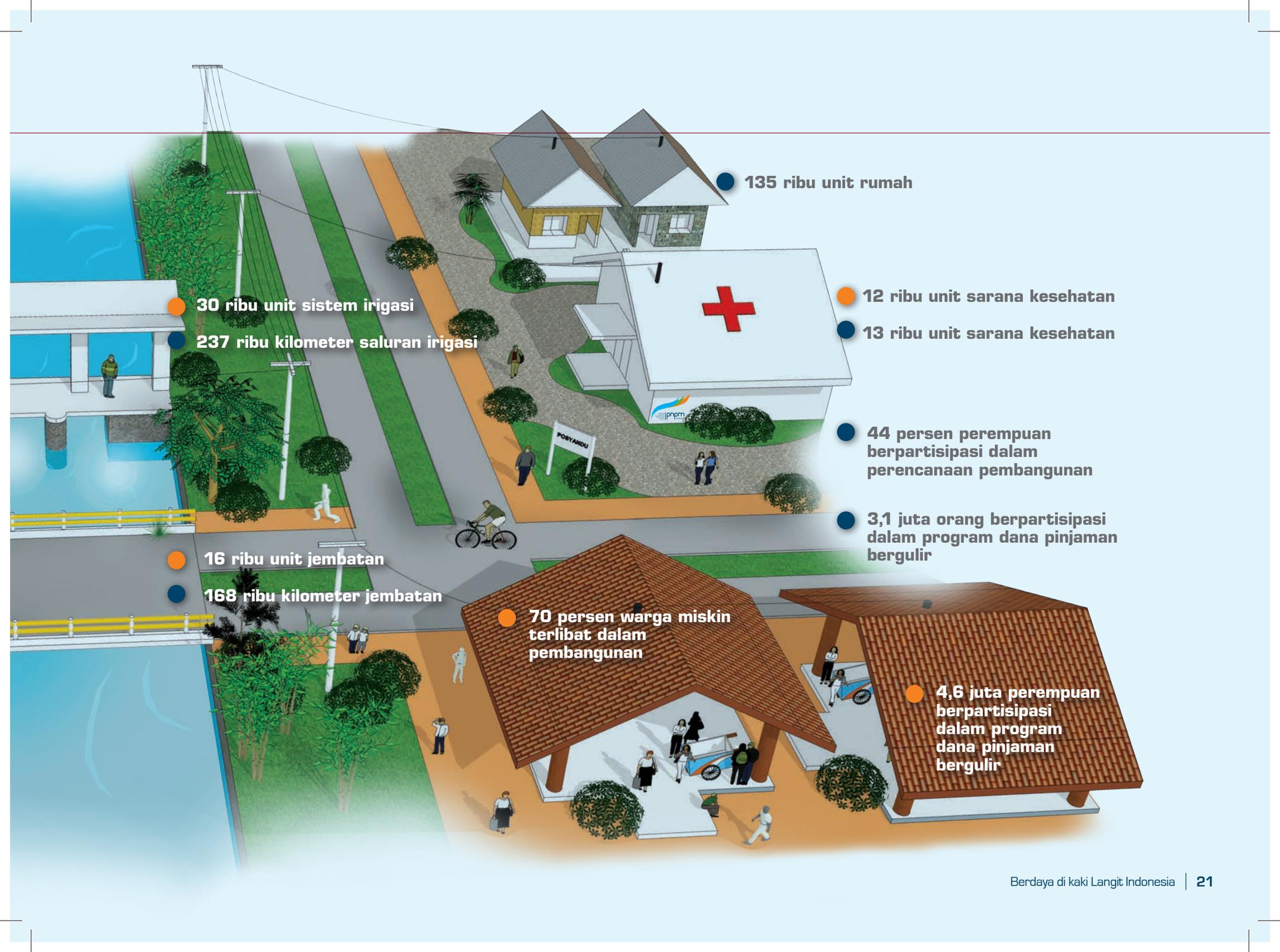
● 138 ribu kilometer jalan

● 33 ribu kilometer jalan

● 632 ribu kelompok warga
berpartisipasi dalam pembangunan

● 48 persen peserta rapat
adalah perempuan





● 30 ribu unit sistem irigasi

● 237 ribu kilometer saluran irigasi

● 16 ribu unit jembatan

● 168 ribu kilometer jembatan

● 135 ribu unit rumah

● 12 ribu unit sarana kesehatan

● 13 ribu unit sarana kesehatan

● 44 persen perempuan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan

● 3,1 juta orang berpartisipasi dalam program dana pinjaman bergulir

● 70 persen warga miskin terlibat dalam pembangunan

● 4,6 juta perempuan berpartisipasi dalam program dana pinjaman bergulir





SEMANGAT TURUN TANGAN

Semangat bergotong-royong membuat sejumlah program infrastruktur yang diusulkan, dikerjakan, dan dikelola sendiri oleh masyarakat menjadi murah dan awet.

“DI SOLOK, WARGA DENGAN SUKARELA MENYEDIKAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK JALUR AIR DAN BAK PENAMPUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH.”

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri (2009-2014)



Seruas sungai kecil membelah Kampung Karangwaru di perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Bernama Kali Buntung, sungai itu tidak berfungsi normal sebagai saluran air, tapi malah berubah fungsi menjadi “infrastruktur” yang buruk: tempat pembuangan sampah, kotoran, dan limbah. Anugerah alam tak bisa lagi dinikmati di sana. Kata “kumuh” lebih identik untuk menggambarkan lokasi tersebut.

Itu gambaran masa lalu, cerita sebelum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hadir di kawasan ini. Sekarang, berkat dukungan program PNPM Mandiri, kampung di sekitar sungai tersebut berubah total. Bukan cuma jadi bersih, kawasan itu juga rapi setelah ditata ulang. Jalanan selebar sekitar 1 meter terentang

mengikuti kelokan sungai. Di sejumlah titik, sejumlah *gazebo* didirikan. Warga bisa berkumpul dan anak-anak bermain di lingkungan yang nyaman. Mereka pun berbangga dengan menyebut kampungnya dengan istilah “Riverside”.

Untuk perbaikan lingkungan tersebut, biaya yang dikeluarkan hanya Rp 1 miliar. Ini jauh lebih kecil dari perkiraan semula bahwa total anggaran bisa

mencapai Rp 3 miliar. Angka itu dengan memperhitungkan biaya kontraktor, pembebasan lahan, serta pelibatan tenaga masyarakat. Namun, karena sarana itu dikerjakan dengan cara bergotong-royong, biayanya menjadi lebih murah.

“Sebab, nilai tanah dan tenaga masyarakat yang bergotong-royong saja sudah melebihi modal utama (Rp 1 miliar),” kata Lurah Karangwaru, Suhardi. Menurut dia, sejumlah warga mengikhlasakan sebagian tanahnya digunakan untuk dijadikan jalan di pinggir kali.

Kerelaan warga pinggir Kali Buntung bergotong-royong menata dan membenahi sungai merupakan salah satu contoh nilai luhur yang berkembang di balik PNPM. Bukan hanya di Kali Buntung budaya yang sudah jarang dilakukan ini kembali tumbuh subur. Di banyak tempat, di seluruh wilayah Nusantara yang menjadi sasaran PNPM, sikap sukarela, semangat bergotong-royong, dan swadaya dalam membangun wilayah mereka terlihat sangat menonjol.

Simak saja contohnya di Dusun Kalibentak, Blitar Selatan, Jawa Timur. Di sini, bahkan warga menambah panjang jalan beton sejauh 1.3 kilometer hasil dana pancingan PNPM Mandiri Perdesaan 2003. Mereka mengelola sumber dana dari pungutan retribusi kendaraan yang masuk ke desa ini. Termasuk sumbangan dari warganya sendiri. Hasilnya, kini mereka menikmati jalan beton sepanjang 2.5 kilometer. Dan membuka akses sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dusun Kalibentak pun menjadi *resik* dan bergeliat.

Partisipasi masyarakat memang menjadi salah satu

prinsip dasar pelaksanaan PNPM Mandiri. Dengan prinsip tersebut, bantuan langsung kepada masyarakat diharapkan hanya menjadi stimulan bagi masyarakat agar turut membantu dan berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak yang menyumbangkan tenaga, bahan bangunan, uang, dan lainnya untuk menyokong kegiatan pembangunan yang difasilitasi PNPM Mandiri.

Swadaya dan kerelaan warga berkorban dalam program PNPM diakui oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dia teringat saat dirinya menjabat Bupati Solok, Sumatera Barat. Saat itu, dia merasakan sendiri bagaimana kerelaan warga saat akan dibangun instalasi air bersih di Solok. Saat program itu masih merupakan program pemerintah, warga meminta ganti rugi, sekecil apa pun. Namun, ketika program menjadi bagian dari PNPM, pembangunan jauh lebih lancar. "Warga dengan sukarela menyediakan lahan pekarangan untuk jalur air dan bak penampungan," katanya.

Prinsip swadaya dan sukarela warga juga memberi dampak positif lainnya, yakni biaya pembangunan jauh lebih murah dibanding pembangunan konvensional yang direncanakan pemerintah pusat. Apalagi, dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek infrastruktur tidak boleh menggunakan pemborong atau kontraktor.

Hasilnya, menurut catatan Sekretariat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, biaya pembangunan infrastruktur pedesaan rata-rata lebih murah 15-20 persen dibanding jika dilakukan oleh kontraktor. "Selain itu, 96 persen sarana fisik yang dibangun berkualitas sangat

"SEBAB, NILAI TANAH DAN TENAGA MASYARAKAT YANG BERGOTONG-ROYONG SAJA SUDAH MELEBIHI MODAL UTAMA (RP 1 MILIAR),"

Suhardi, Lurah Karangwaru

baik," ungkap laporan yang tertuang dalam Paket Informasi PNPM Mandiri 2014.

Jalan beton di salah satu dusun di Blitar Selatan yang dibangun lewat PNPM menjadi salah satu buktinya. Jalan itu masih kokoh tanpa cacat meski usianya sudah 10 tahun. Padahal biasanya jalan beton mulai retak pada usia 5 atau 6 tahun. Ini bisa terwujud karena warga, yang merasa memiliki jalan tersebut, memastikan komposisi bahan bangunan yang digunakan adalah yang terbaik.

Itu sebabnya, Gamawan sangat mendorong kegiatan yang berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini agar terus dijalankan oleh siapa pun yang akan memegang posisi pemerintah selanjutnya. "Sebab, sudah terbukti, hasilnya (pembangunan lewat PNPM) akan lebih maksimal," kata Gamawan. "Ini kekuatan PNPM."

Menurut pandangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, partisipasi luas seluruh pihak sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan PNPM. "Semua akan berjalan kalau masyarakat dilibatkan. Banyak hal dapat dilakukan," katanya seperti ditulis Antara, 25 Maret 2010. ■



SUGITO (kacamata) Wiwi sri Rejeki (jilbab) bersama dua masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Kali Buntung sebagai penggerak penataan sungai Kali Buntung, Yogyakarta.

Sungai Kali Buntung, Yogyakarta, termasuk salah satu sungai yang kumuh dan kotor. Setiap harinya sampah bertumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Persoalan semakin runyam manakala musim hujan tiba. Air sungai ini meluap dan membanjiri rumah di sepanjang bantaran.

KALIKU *RESIK* REJEKIKU APIK

Warga Karangwaru, Yogyakarta, bertahun-tahun menutup mata dengan kondisi sungai Kali Buntung. Setiap harinya sampah bertumpuk di sepanjang aliran sungai. Dan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi sungai semakin murung manakala warga menjadikannya sebagai tong sampah. Alhasil, sungai Kali Buntung tak menjadi berkah. Malah menjadi sumber bencana sepanjang tahun. Termasuk, bencana banjir yang meluap hingga bantaran sungai.

"Kita ingin mengubah perilaku warga," kata Sugito.

Ia adalah salah satu warga yang tinggal di bantaran sungai ini. Dan bermimpi agar sungai Kali Buntung tak lagi runyam. Beruntung, Karangwaru mendapatkan perhatian utama dari PNPM melalui Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Bantuan dana ini atas prestasi mereka yang sukses mengelola dana PNPM Mandiri Perkotaan.

Hampir satu tahun warga berembug. Dan sepakat membenahi kawasan ini. Apalagi warga mesti merelakan tanahnya sebagai jalan dan sarana taman. Pemilik rumah mesti membongkar tembok-tembok yang merapat ke bantaran sungai.

"Kita dapat dana satu miliar," katanya. Dana ini menjadi pelecut pembenahan kawasan bantaran sungai. Warga mendukung pembenahan fisik agar sungai kembali asri. Pembangunan Kali Buntung dimulai sejak 2009 secara bertahap. Termasuk pembenahan kali Code. Penataan dua sungai ini masuk dalam proyek Karangwaru *Riverside*.

"Ada yang mencemooh, tapi kesadaran muncul setelah mereka dilibatkan dalam proses penataan. Bahkan warga

rela memberikan tanah dan memotong bangunan di pinggir sungai. Warga yang melaksanakan semua desain perencanaan penataan sungai," katanya.

Karangwaru *Riverside* segmen satu dilengkapi *gazebo* di beberapa titik untuk ruang publik dan tempat bermain anak. Sejak 2011, revitalisasi juga fokus pada penataan lingkungan, melalui penguatan talud bronjong dengan kolom penyangga dan ring balik, pembuatan jalan setapak di kiri kanan sungai, drainase, ruang terbuka hijau dan pembuatan *septic tank* komunal limbah domestik.

"Pertengahan 2012, warga berhasil menyulap bantaran Kali Buntung di RW 02 yang kumuh menjadi asri. Penataan bantaran sungai di Kali Buntung dilanjutkan sepanjang 150 meter di RW 04," tuturnya.

Sugito menambahkan, penataan Kali Buntung telah berhasil menyelesaikan segmen keempat sepanjang 120 meter dengan membangun jembatan penghubung dua kampung yakni Blunyahrejo dan Karangwaru. Selain dari PNPM Mandiri, warga juga mendapatkan dana dari Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Kementerian PU, senilai Rp 250 juta. Melihat kesuksesan warga merevitalisasi Kali Buntung, pemerintah daerah setempat juga turut terlibat dalam pendanaan.

"Selanjutnya, penataan dengan pembangunan jembatan menghubungkan wilayah RW 02 dengan RW 05 panjang 22,5 x 2,25 meter di segmen empat dikerjakan secara swadaya. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, seluruhnya dilakukan oleh warga setempat," katanya.

Sedangkan segmen lima nantinya dilakukan dengan mena-



ta bantaran sungai Code wilayah RW 08. Sementara segmen enam untuk taman kuliner. Rumah warga yang dulunya membelakangi sungai, diubah menghadap ke sungai. Beberapa perbaikan sarana publik terus dilakukan seperti drainase, jalan untuk pedestrian, tanaman, dan penyediaan bak sampah.

Selain memunculkan perubahan fisik, penataan kawasan Kali Buntung ini juga memberikan kegiatan ekonomi produktif bagi 571 Kepala Keluarga miskin yang tinggal di Kelurahan Karangwaru. Salah satunya, kegiatan produktif ibu-ibu PKK di RW 4 dengan membuat sirup markisa berlabel "Sirup Markisa Kampung Markisa-Karangwaru *Riverside*". Markisa ini hasil dari tanaman sepanjang bantaran sungai.

"Ide ini diperoleh dari warga. Pengembangan kawasan tanaman buah-buahan akhirnya dikembangkan dengan mengikuti pelatihan industri rumah tangga yang diadakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tri Daya Waru Mandiri. Hanya saja bahan baku dan manajemen pengelolaan belum optimal," imbuh Sugito.

Usaha produktif itu juga memotivasi karang taruna "Waru Tama" di Kelurahan Karangwaru untuk mendirikan usaha pengelolaan sampah *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) dan kompos, serta menanam tanaman produktif di sepanjang bantaran Kali Buntung, seperti cabe dan sayuran dengan media tanam botol plastik. Selain memiliki nilai tambah ekonomi bagi penghuni di sekitarnya, berbagai tanaman hias di sekitar lahan taman Kali Buntung mempercantik halaman dan jalur pedestrian.

Sugito menambahkan, slogan "Kaliku Resik Rejekiku Apik" dicanangkan untuk motivasi warga Kelurahan Karangwaru agar memaksimalkan sarana yang dibangun PLPBK. Upaya itu dilakukan dengan pengembangan berbagai potensi masyarakat, seperti kuliner dan kegiatan seni budaya.

"Dari situ potensi warga itu bisa disalurkan karena ada ruang yang bisa dioptimalkan. Misalnya untuk pementasan budaya, aktivitas perekonomian, pariwisata, kuliner dan pemandangan alam," ujarnya. ■

◀
WARGA beraktifitas di sekitar bantaran kali yang kini sudah disulap menjadi asri.

SEORANG ibu mengajak anaknya berkeliling di sore hari.



MASYARAKAT memanfaatkan bantaran sungai untuk memancing ikan.



Bertahun-tahun Dusun Kali Bentak, Blitar, tak tersentuh pembangunan. Warga terpaksa keluar masuk Dusun tersebut dengan penuh perjuangan. Mulai mengangkut hasil panen hingga anak-anak yang terpaksa bertelanjang kaki menuju sekolah. Namun kini, kehidupan dusun itu bergeliat. Jalan rabat beton membuka babak baru kehidupan mereka.

MENYEMAI SEMANGAT GOTONG ROYONG

Bapak bangsa Indonesia, Soekarno, mungkin lupa. Kemiskinan yang melilit republik ini tak jauh dari kampung halamannya sendiri, Blitar. Hingga kini, masih ada dusun-dusun yang terlewat di pesisir selatan Jawa Timur itu, tak tersentuh pembangunan. Dusun-dusun menyempil dibalik hutan rakyat. “Ada panen atau tidak, kita tetap susah,” ingat Kepala Dusun Kali Bentak, Kateni, dari Desa Panggungrejo, Blitar. Hasil panen seperti jagung dan palawija tak bisa langsung dipasarkan. Petani mesti bekerja keras lagi memanggul hasil panennya dan bertemu tengkulak.

Termasuk melewati jalan setapak yang curam. Permasalahan semakin rumit manakala musim hujan tiba. Jalan curam dan berlumpur menjadi masalah keseharian mereka. Kondisi buruknya infrastruktur di Dusun Kali Bentak ini menyebabkan mereka termasuk salah satu kantong kemiskinan di Jawa Timur.

“Anak-anak harus membuka sepatunya untuk ke sekolah. Lebih sulit lagi kalau ada yang sakit. Kita mesti gotong itu,” kata Kateni.

Keterbatasan ini menyebabkan Dusun Kali Bentak menjadi dusun yang sepi. Tak sedikit warga meninggalkan kampung halamannya itu. Dan bekerja di perkotaan atau menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kali Bentak tak menjadi harapan bagi warganya sendiri.

Namun kini, wajah Kali Bentak semakin cerah. Kehidupan warga bergeliat dan menjadi dusun percontohan bagi wilayah lainnya di Blitar.

“Setiap tahun warga berswadaya untuk membangun jalan rabat sepanjang 100 hingga 200 meter,” kata Mangil salah satu pengelola pemeliharaan prasarana.

Perjuangan hampir 12 tahun itu telah membuahkan hasil. Akses jalan setapak tak lagi menjadi persoalan mereka. Warga bahu membahu memperbaiki kondisi jalan setapak. Mereka menyumbangkan sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan. Termasuk menebang pohon yang menghalangi sepanjang jalan.

“Upah pekerja kita sumbangkan untuk membeli semen. Bahkan sekarang kita punya alat molen sendiri,” kata Kateni sambil tersenyum.

Jalan rabat beton hasil sentuhan PNPM Perdesaan dan urunan warga ini menjadi babak baru bagi kehidupan di Kali Bentak. Mobil pengangkut dari berbagai kota bisa langsung menuju dusun ini. Dan mengangkut hasil tani seperti jagung dan palawija.

Harga tani tak lagi dimonopoli oleh tengkulak yang menjerat bertahun-tahun. Anak-anak dengan berjalan kaki menuju sekolah. Perempuan hamil dengan mudah menjangkau sarana kesehatan. Baik di puskesmas maupun ke rumah sakit.

▶
SULASTRI (baju orange) bersama warga Kalibentak membawa berbagai peralatan sesuai melaksanakan pembangunan jalan rabat beton.

“Warga sudah punya motor bahkan bangunan rumah sudah permanen,” kata Kateni.

Dusun Kali Bentak dihuni hampir 274 jiwa. Pekerjaan utama warga di sini adalah petani. Kekerabatan sosial menjadi tulang punggung warga sejak bertahun-tahun. Tak salah, jika gotong royong masih kuat dan melekat dalam kehidupan warga yang bersuku Jawa ini.

Kateni dan warga lainnya belajar, bahwa kemandirian menjadi kunci agar dusunnya semakin berkembang dan sejahtera. Mereka tak perlu menunggu dan tergantung pada program pembangunan dari pemerintah saja. Inisiatif dari warga dan semangat gotong royong bisa menjadi kunci keluar dari jerat kemiskinan.

Saat ini warga membentuk wadah Rukun Santoso. Wadah ini terbentuk sebagai sarana aspirasi sekaligus memoles kekompakan warga. Berbagai sumbangan dari warga lokal maupun warganya yang bekerja di luar negeri menambah pundi-pundi uang kas Rukun Santoso.

“Semangatnya luar biasa. Mereka mau bekerja untuk membangun desanya,” kata Sulastri pendamping PNPM dari Kecamatan Panggungrejo sejak tahun 2002.

Dari Dusun Kali Bentak mereka terus memoles diri. Dan membuktikan bahwa merdeka bukan sekedar makan gaplek seperti dalam pidato Soekarno. ■





JAGUNG yang telah di pilih untuk kemudian dibawa ke pengumpul. Harga panen tani tak lagi dimonopoli oleh tengkulak.

PETANI Kali Bentak memanen jagung di ladang yang berada didekat rumah mereka. Setelah dibukanya akses jalan kini tidak ada lagi petani yang kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannya.



SEORANG peternak memberi makan sapi peliharaannya.



WARGA Kali Bentak mencangkul untuk membuat jalan rabat beton di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga menghibahkan tanahnya untuk pelebaran jalan.

BARU MERASA MERDEKA SETELAH LISTRIK HADIR

Berbekal dana bantuan PNPM serta swadaya masyarakat, warga perbatasan di Kalimantan Barat baru merasakan nikmatnya kemerdekaan seiring dengan hadirnya listrik di wilayah mereka.

Seragam mungkin sama dengan yang dulu, kemeja putih dan celana merah. Tapi, dalam beberapa tahun ini, anak-anak di Suruh Tembawang, desa yang berbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sedikit berbeda nilai sekolahnya. Nilai mereka cenderung lebih bagus dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Penyebabnya bukan lantaran sekolah mengubah kurikulum secara dramatis, melainkan karena masyarakat di desa-desa itu secara bertahap mulai menikmati listrik sejak lima tahun lalu. Pada malam hari, anak-anak di wilayah

Kecamatan Entikong tersebut bisa belajar di rumah dengan penerangan lampu listrik, bukan kelap-kelip pelita.

"Hasil anak-anak ujian lumayan sekarang," kata Kepala Desa Suruh Tembawang, Gak Mulyadi.

Listrik hadir di sana melalui sejumlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang didanai lewat PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahkan desa itu praktis baru mulai bersinggungan dengan "pembangunan" sejak ada program ini.

Bayangkan, sejak negeri ini merdeka hampir 70 tahun silam, Suruh Tembawang nyaris tidak pernah berubah. Padahal posisi pedesaan itu berbatasan langsung dengan Malaysia, negara tetangga yang lebih makmur.

Tidak mengherankan jika Gak Mulyadi mengaku mereka baru merasa diperhatikan setelah ada program ini. "Setelah ada penerangan seperti ini, baru merasa ada kemerdekaan," katanya mengutip ucapan sejumlah kepala dusun.

Lebih membanggakan lagi, pembangunan PLTMH ini dikerjakan oleh warga. "Ada keringat kami disini."

Bahkan sebagian warga merelakan tanahnya digunakan untuk menghadirkan pembangkit listrik, sekaligus menerangi kegelapan di wilayah mereka.

PNPM mulai masuk ke Suruh Tembawang pada 2008. Saat itu Desa Suruh Tembawang mendapat stimulan untuk membangun PLTMH oleh fasilitator yang di datangkan dari Jawa.

Warga Suruh Tembawang, yang selama ini hanya mengandalkan pelita pada malam hari, bersemangat merespons ide tersebut. Mereka sepakat menjadikan program pembangkit listrik sebagai usulan kegiatan PNPM Mandiri dan proposal tersebut disetujui oleh

"SETELAH ADA
PENERANGAN SEPERTI
INI, BARU MERASA ADA
KEMERDEKAAN."

Gak Mulyadi, Kepala Desa Suruh Tembawang



masyarakat dalam musyawarah tingkat kecamatan. Apalagi hasil survei oleh tim verifikasi memperlihatkan bahwa air-air terjun yang ada di pelosok-pelosok dusun sanggup menghasilkan listrik untuk seluruh desa. Tim verifikasi ini terdiri dari warga pilihan yang memiliki keahlian sesuai jenis kegiatan.

Awalnya PLTMH hanya dibuat di satu dusun. Meski unit generator sudah tinggal dipasang, mereka mesti menyiapkan sejumlah perangkat, termasuk jalur air atau bendungan. “Tenaga teknisi kan terbatas,” kata Gak Mulyadi.

Warga dusun pun membagi diri menjadi kelompok-kelompok untuk berganti-ganti bekerja membangun sistem pembangkit itu. Sebagian warga harus berkorban menyerahkan lahan yang mereka miliki secara turun-temurun untuk dijadikan lokasi pembangkit seluas 500 meter persegi. Dengan sokongan tenaga dan lahan dari warga, biaya pembuatan pembangkit bisa ditekan. “Kalau dikerjakan kontraktor, biayanya mencapai 1,5 miliar rupiah,” kata Gak Mulyadi. “Ini cukup dengan Rp 350 juta.”

Kapasitas generator terpasang sekitar 50 ribu watt. “Air terjunnya 20 meter,” kata Gak Mulyadi. Setiap rumah di dusun itu mendapat jatah tiga titik lampu dan satu titik hiburan—biasanya disambungkan dengan televisi. Untuk iuran pemeliharaan, satu titik lampu dikenai Rp 5.000 per bulan. “Jadi Rp 25 ribu untuk satu bulan,” katanya.

Warga dusun juga membentuk tim piket yang memelihara dan menyalakan generator itu: listrik memang belum menyala 24 jam, hanya menyala sekitar pukul 5 sore sampai 7 pagi.

Karena kapasitas listrik tidak terlalu besar tapi wilayah desa sangat luas, hanya satu dusun yang bisa mendapat penerangan listrik. Dusun-dusun lain pun kemudian bergiliran mengajukan usul program yang sama untuk PNPM. Sebagian mendapat dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, sebagian lagi lewat PNPM Perbatasan.

Bahkan, bukan hanya merembet ke dusun lain, proposal program PLTMH juga menjalar ke desa lain di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Misalnya, tujuh dusun di Desa Idas, Kabupaten Sanggau, sudah bisa menikmati aliran listrik dari PLTMH setelah puluhan tahun tanpa penerangan.

“Kami bersyukur, masyarakat sudah bisa menikmati listrik dari hasil kerja keras dan swadaya mereka sendiri, selain mendapat dana stimulan dari PNPM,” ujar Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, saat meresmikan PLTMH di Desa Idas, seperti ditulis *Antara*, 10 Juli 2012.

Akan halnya Gak Mulyadi, prestasinya sebagai pengurus PNPM Mandiri Perdesaan membuat dirinya terpilih sebagai kepala desa pada 2013 dengan menghimpun 90 persen suara pemilih. ■

Kehadiran PNPM membuat warga yang terlibat konflik duduk bersama. Merumuskan program untuk kepentingan semua.

KONFLIK TINGGAL SEJARAH

Kecamatan Golewa di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu potret kerontangannya Nusa Tenggara. Suhu yang bisa mencapai 38 derajat celsius, tanah tandus yang tak bersahabat dengan tumbuhan, dan minimnya stok pangan, saling berpilin menjadi penyebab kawasan ini masuk kategori daerah termiskin di Indonesia. Setidaknya, Kementerian Negara daerah Tertinggal memasukkan Ngada dalam kategori Kabupaten Tertinggal.

Di Golewa yang kering, air bersih merupakan keajaiban, sekaligus sumber konflik. Itulah yang terjadi di tiga desa: Radabata, Were I, dan Dadawea. Hanya satu desa yang memiliki sumber mata air untuk menghidupi tiga desa. Musim hujan yang hanya tiga bulan menyisakan kemarau berkepanjangan, dan di saat kekeringan melanda, air tak lagi menjadi sumber kehidupan, tapi sebagai penyebab kematian. Konflik berebut air tak terhindarkan, hingga berujung maut.

Laporan *Kompas* 31 Agustus 2010 mengisahkan pengalaman seorang warga yang menjadi saksi konflik berdarah akibat berebut air. Peristiwa itu terjadi pada 2002, antara warga suku di Desa Were I dan Radabata. Seorang penduduk yang terlibat konflik tewas. "Ada korban yang dipenggal kepalanya dan dibawa ke tanah lapang. Bupati sampai turun tangan mendamaikan dan prosesnya lama

sekali," ujar Emilianus yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar.

Meski perdamaian diupayakan, dan pelaku sudah dihukum, benih-benih konflik terus membara. Selama kekeringan melanda, selama itu pula warga akan terlibat konflik berebut sumber air, dan tinggal menunggu korban selanjutnya berjatuh. Tapi itu cerita lama. Beberapa tahun terakhir, warga yang terlibat konflik justru hidup dalam harmoni, sejak mereka menikmati pasokan air bersih yang difasilitasi PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri yang masuk ke pedesaan membawa nilai-nilai penting, antara lain pelibatan semua pihak melalui musyawarah. Nilai-nilai demokrasi inilah yang kemudian menyatukan warga untuk merumuskan pembangunan sarana air bersih. Semua warga yang bertikai, walau awalnya masih canggung, berkumpul dalam satu forum untuk membuat perencanaan program. Program air bersih membuat warga yang sempat dibekap konflik menjadi bahu-membahu dan melupakan permusuhan.

Kini, kekurangan air bersih hanya cerita lama. Ribuan warga tiga desa itu bisa menikmati air bersih yang berasal dari sumur gravitasi di perbukitan Desa Were I. Jaringan pipa air sepanjang 9 kilometer dibentangkan melintasi tiap-tiap desa. Kolam-kolam penampungan dibuat dan tidak ada warga yang keberatan lahannya ditumpangi pipa dan ko-

lam. Warga pun tak harus berjalan berjam-jam ke sumber mata air, dan tak ada lagi gerobak pengangkut air bersih berseliweran.

Keberadaan sarana air bersih kian menyatukan warga tiga desa lainnya. Mereka pun membentuk Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) yang turut diawasi oleh sebuah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk merawat jaringan air. Lewat forum ini, warga berkumpul dan mencari solusi bila ada masalah atau gangguan saluran air. Warga di satu kampung akan langsung mengabarkan bila ada gangguan pipa di daerahnya sehingga intensitas komunikasi warga meningkat, dan ada rasa kebersamaan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Sukses mengubah konflik menjadi damai merupakan salah satu tujuan PNPM Mandiri. Di beberapa wilayah, kemiskinan berkaitan erat dengan konflik. Sejumlah daerah konflik atau sisa-sisa konflik pun mendapat perhatian khusus. Aceh, Sambas di Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua, adalah sedikit daerah yang dibekap konflik, baik etnis maupun konflik vertikal. Perlu kesabaran dan kerja lebih keras untuk memberdayakan warga miskin di daerah-daerah tersebut.

Bahkan, menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi

A Karim, pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah konflik juga menjadi percontohan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Perwakilan sejumlah negara berkunjung ke Indonesia guna mempelajari pelaksanaan PNPM Mandiri, khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik,” kata Tarmizi yang pernah menjadi Bupati Aceh Utara dan mantan Penanggung Jawab Gubernur Aceh tersebut, pada 10 Januari 2012 seperti dikutip dari *Harian Analisa*, Medan.

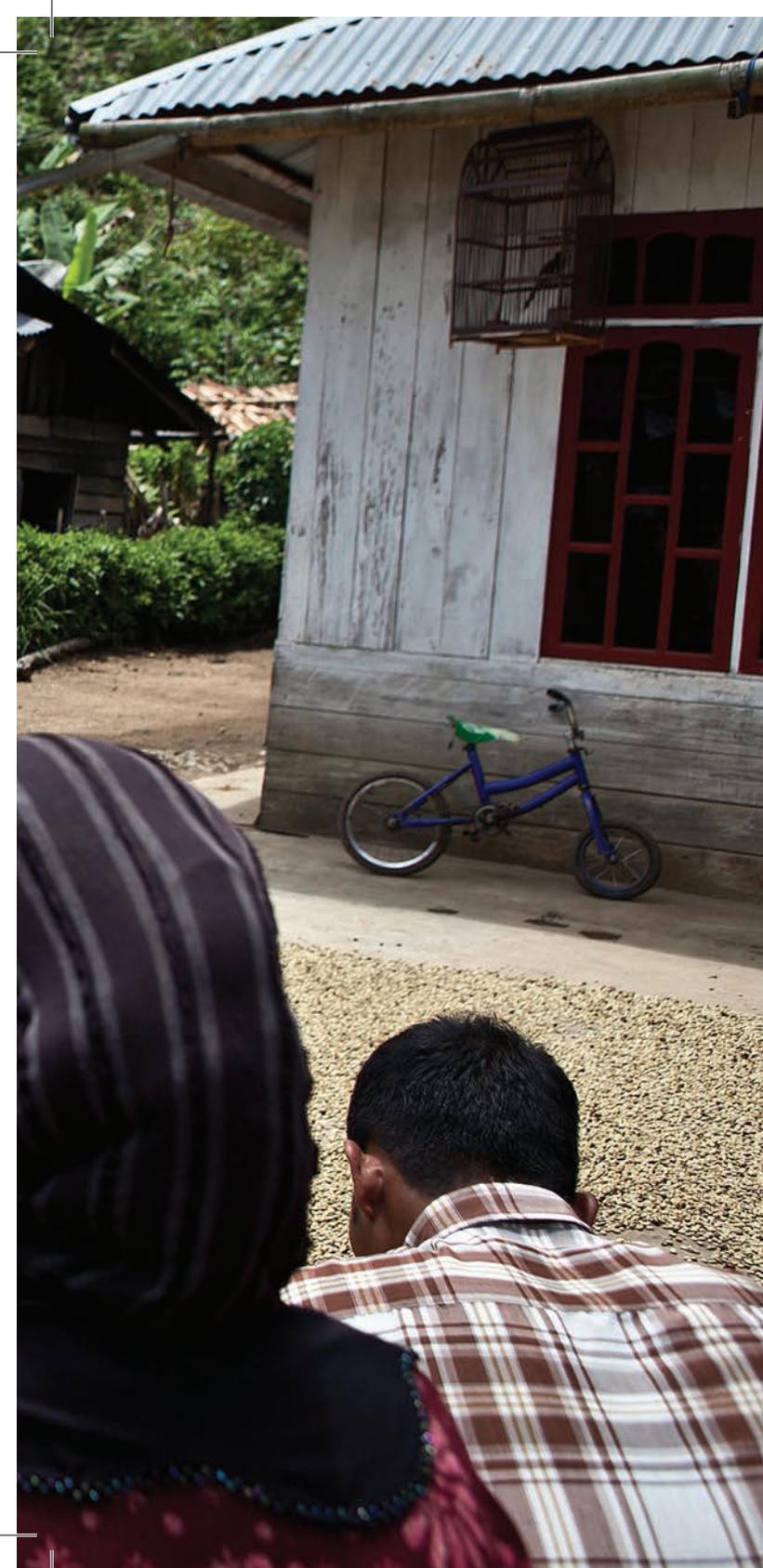
Untuk menyukseskan programnya, PNPM Mandiri pun membekali kemampuan resolusi konflik kepada para fasilitator yang terjun ke daerah konflik. Di Lhokseumawe misalnya, para fasilitator mengikuti Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik. “Fasilitator PNPM dapat memahami hakikat konflik, bentuk-bentuk konflik, sumber konflik, pola pemetaan konflik, teknik penanganan dan penyelesaian konflik, teknik mediasi,” kata panitia pelatihan, Sudarman Puteh, kepada *The Globe Journal*. ■



“PERWAKILAN SEJUMLAH NEGARA BERKUNJUNG KE INDONESIA GUNA MEMPELAJARI PELAKSANAAN PNPM, KHUSUSNYA ACEH YANG BARU SAJA TERBEBAS DARI PERSOALAN KONFLIK.”

Tarmizi Karim, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri





PEREMPUAN BERGERAK

Perempuan dipercaya sebagai salah satu kunci penting dalam mengatasi kemiskinan. PNPM Mandiri menjadi wadah agar perempuan bisa berperan aktif dalam setiap proses pembangunan. Peranan mereka tak lagi dipandang sebelah mata. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan program hingga proses evaluasi setiap kegiatan.

“PEREMPUAN JUGA
LEBIH PEKA TERHADAP
PEMBANGUNAN.”

**Illiza Saaduddin Djamal,
Wakil Walikota Banda Aceh**



Kurasia Buatan, perempuan dari Raja Ampat, Papua Barat percaya bahwa pendidikan menjadi kunci untuk mendobrak kemiskinan. Keterbatasan akses pendidikan membuat kehidupan warga di Raja Ampat tak berkembang. Sekalipun, mereka tinggal dan hidup dengan keberkahan alam yang melimpah.

Raja Ampat adalah surga wisata dunia. Alamnya tergolong perawan. Perairannya menyimpan potensi ikan yang melimpah. Sayangnya, keberkahan dan potensi ekonomi ini justru menjadi kutukan dan tak mendongkrak kehidupan warganya. Bertahun-tahun, kemiskinan menjadi jerat yang melilit kehidupan warganya.

Kurasia Buatan turun tangan. Ia bergabung menjadi fasilitator PNPMM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua Barat.

Dengan kesabaran dan dedikasi, ia mengikuti berbagai pelatihan sebagai pendamping masyarakat. Termasuk, merampungkan pendidikan tehnik yang difasilitasi oleh PNPMM Mandiri. Mulai dari jembatan, rabat beton hingga menaksir harga barang.

“Awalnya saya buta dengan urusan tehnik, apalagi saya lulusan menengah atas. Sekarang, saya bertanggung jawab dengan urusan program pembangunan,” katanya dengan nada penuh semangat.

PNPMM Mandiri membuka kesempatan bagi Kurasia

Buatan untuk membangun kampung halamannya sendiri. Ia bersama warga, turun tangan agar masyarakat bisa langsung mengecap pembangunan. Mulai dari nol hingga pengawasan jalannya setiap program.

“Tidak mudah membangun di Papua. Selain pendidikan yang terbatas, masalah lainnya adalah transportasi. Semuanya mahal,” katanya. Berbagai pengalaman suka dan duka pernah ia lewati. Mulai ancaman dibusur panah hingga terbawa arus yang mengancam nyawa hidupnya. “Saya cinta dengan kampung halaman saya sendiri. Saya ingin, warganya bisa berkembang.”

Kurasia Buatan dan perempuan lainnya di Indonesia bergerak untuk memutus rantai kemiskinan. Berbagai jalan mereka tempuh agar kemiskinan tak lagi melilit kehidupan warganya. Mereka mengambil jalan pedang sebagai pemimpin, pengajar, penggerak ekonomi hingga pendamping masyarakat.

“Di sini masyarakat masih buta huruf. Saya ikut mengajar agar mereka bisa baca dan tak mudah memberi tanda tangan,” kata Asnaini mantan kader desa dari Pegasing, Takegon, Aceh Tengah. Ia adalah perempuan pertama yang dipercaya oleh masyarakatnya menjadi pemimpin desa. Melalui berbagai program ekonomi, ia menggerakkan kehidupan warganya. Termasuk membuka layanan jaringan listrik hingga ke pelosok kampung.

Kepedulian terhadap lingkungan juga datang dari Vola Harindah, perempuan dari Desa Tinongko, Minahasa Utara. Ia bersama warganya, turun menyelamatkan hutan bakau dan memberikan pendidikan mengenai pohon “benteng alami” ini. Kebutuhan bahan bakar dan bahan baku untuk membangun menjadi alasan membatat puluhan hektar hutan bakau di pulauanya. Hasilnya, ikan semakin menjauh dan tsunami menjadi ancaman utama di pulau yang terletak di

bibir Pasifik itu.

"Kami membuat arang dari batok kelapa sebagai pengganti bahan bakar dari bakau. Anak-anak hingga orang tua juga turun tangan menanam ribuan bibit bakau yang kami semai sendiri," kata Vola Harindah.

Inisiatif Kurasia Buatan, Vola Harindah, Asnaini dan jutaan perempuan lainnya di Indonesia mulai membuahakan hasil. Masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Keberadaan mereka sebagai perempuan juga tak lagi dipandang sebelah mata. Dan justru menjadi inspirasi bagi masyarakatnya untuk melakukan perubahan dan pemberdayaan.

Saat ini, perempuan dan kemiskinan menjadi topik hangat dalam berbagai forum dunia. Menurut *The Global Gender Gap 2013* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* menunjukkan dua pertiga perempuan dunia berada di bawah garis kemiskinan. Dan perempuan Indonesia menempati peringkat ke-95 dari 144 negara di dunia dalam mengakses bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik.

Di Indonesia, tak sedikit perempuan juga berperan menjadi kepala keluarga. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA juga mencatat saat ini terdapat 6 juta rumah tangga miskin dikepalai seorang perempuan. Di hampir semua budaya, perempuan janda memiliki stigma negatif.

"Ketidaksetaraan gender mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses secara sistematis terhadap sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya pendidikan, tanah, informasi dan keuangan," kata Deputi Menko Kesra Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat. Kondisi ini, menurutnya, menempatkan perempuan tak mampu meningkatkan kesejahteraan.

PNPM Mandiri mendorong agar perempuan menjadi aktor dalam mengatasi kemiskinan. Setiap program juga mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam berbagai kegiatan. Untuk itu, pemerintah pusat menegaskan maksimal 25 persen dari Rp 11,5 triliun PNPM Mandiri adalah untuk memfasilitasi kegiatan simpan pinjam yang dijalankan kaum perempuan.

Dalam PNPM Mandiri, keterwakilan kaum perempuan memang sangat diutamakan.

bahkan, hingga tingkat desa melalui Musyawarah Khusus Perempuan atau MKP. Dua dari tiga usulan lahir melalui mekanisme MKP ini.

Hingga tahun 2013, PNPM Mandiri telah menjangkau 11 juta perempuan di Indonesia. Mereka terlibat aktif dalam program khusus simpan pinjam dengan pengembalian mencapai 94 persen dari total dana sebesar Rp 5,5 triliun.

"Perempuan juga lebih peka terhadap pembangunan," kata Pelaksana harian Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'adudin Djamal. Pada tahun 2007, ia membentuk wadah aksi perempuan untuk menampung aspirasi perempuan dalam pembangunan.

Melalui PNPM Mandiri, perempuan menjadi motor penggerak pemberdayaan. Mereka tak lagi dibayangi oleh kemiskinan yang akut, diskriminasi, kekerasan dan tersisih dalam berbagai program pembangunan. Sekalipun, perempuan ini mesti mengambil jalan pedang melalui jurus pemberdayaan. ■



"KETIDAKSETARAAN GENDER MENGAKIBATKAN PEREMPUAN TIDAK MEMILIKI AKSES SECARA SISTEMATIS TERHADAP SUMBERDAYA PRODUKTIF."

Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat

MENEBAR SEMANGAT



“PEREMPUAN MENJADI KUNCI
DALAM PEMBANGUNAN. MEREKA
BISA BANGKIT, ASALKAN DIBERIKAN
KEPERCAYAAN DARI KELUARGA,”



ASNAINI menunjukkan buah nanas
yang sedang di kembangkan
menjadi kripik olahan bersama
masyarakat sekitar.

CUT NYAK DIEN

Semangat Cut Nyak Dien mengalir di sosok Asnaini, Kepala Desa Pegasing, Takengon, Aceh Tengah. Perempuan Aceh ini iba dengan kondisi perempuan di desanya. Tak sedikit dari mereka yang masih buta huruf. Termasuk keluarga yang masih terlilit kemiskinan. Pendapatan warga dari hasil panen kopi maupun sawah tak cukup menopang perekonomian warganya.

“Mereka bukan pemilik. Hanya penggarap saja,” kata Asnaini, 43 tahun. Desa Pegasing sebenarnya daerah subur. Air mengalir sepanjang tahun. Di lembah-lembah tampak perkebunan kopi. Selain kopi, daerah ini juga terkenal sebagai penghasil buah nanas.

Asnaini turun tangan dan mulai menggerakkan perempuan-perempuan di Pegasing. Mulai membentuk kelompok baca tulis hingga lembaga simpan pinjam. Beruntung, masyarakat dan keluarganya mendukung upaya Asnaini membangun Pegasing. Posisinya sebagai perempuan juga tak menjadi hambatan.

“Perempuan menjadi kunci dalam pembangunan. Mereka bisa bangkit, asalkan diberikan kepercayaan dari keluarga,” katanya.

Kini, ia bersama 500 warga di Pegasing bekerja keras agar desanya bisa sejahtera dan makmur. Bantuan dana sebesar Rp 2 miliar dari PNPM Mandiri membantu pembangunan infrastruktur dan simpan pinjam. Mulai membangun jalan, irigasi pesawahan, sarana air bersih hingga ekonomi warga. Ia juga menginisiasi masuknya jaringan listrik ke salah satu dusun.

Desa Pegasing salah satu dari 70 ribu desa yang mendapatkan perhatian PNPM. Hingga saat ini total pinjaman bergulir untuk PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional sebesar Rp 6,6 triliun. Dana ini diberikan kepada 465 ribu kelompok dengan jumlah peminjam lebih dari 4,6 juta orang. Peranan perempuan juga semakin aktif dalam pembangunan.

“Sekarang, warga siap mengolah nanas menjadi keripik. Ini usaha sampingan bagi warga,” kata Asnaini, yang dulu kader desa sejak Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kini, ia menjabat sebagai Kepala Desa Pegasing.

Asnaini terus menyuarakan aspirasi perempuan agar terlibat dalam pembangunan. Termasuk masuk dalam skala prioritas perhatian pemerintah. Kini, usahanya

KOPERASI simpan pinjam yang di kelolanya banyak memberikan bantuan financial kepada ibu-ibu rumah tangga untuk berbagai keperluan.



IBU ASNAINI meratakan biji kopi yang dijemur di halaman rumah warga. Takengon merupakan salah satu daerah penghasil biji kopi terbaik di Indonesia.



MEMIMPIN rapat koperasi simpan pinjam dilakukannya setiap hari untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

berbuah hasil; pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pos pelayanan terpadu (Posyandu), memastikan badan desa menetap di kampung dan pengalokasian dana desa untuk kaum perempuan dan anak.

“Masyarakat jangan dibodoh-bodohi. Dana transparan saja. Pemimpin harus mengayomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Aceh, memberikan penghargaan sebagai Perempuan Aceh 2012. Asnaini dinilai layak atas komitmennya memperjuangkan hak perempuan dan pembangunan desa.

Kini, Pegasing semakin dikenal di Provinsi Aceh sebagai salah satu desa yang maju. Tak sedikit perempuan yang dulu buta huruf sudah mulai bisa membaca. Warga tak lagi mengambil air minum dari parit sawah. Perempuan di dusun juga bisa mandi di lokasi bangunan khusus.

“Budaya masyarakat masih melihat perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Dan ini tantangan,” katanya. Asnaini ingin membuktikan bahwa perempuan bisa menjalankan aktivitas sosial tanpa meninggalkan urusan keluarga. Dan Asnaini bersama perempuan Aceh lainnya, menjaga agar obor semangat Cut Nyak Dien tak lekas padam. ■

SRIKANDI RAJA AMPAT BERGELIAT

Perempuan di Raja Ampat bangkit dari keterpurukan. Mereka mendirikan berbagai kelompok usaha berbasis ikan. Kini, hasilnya mulai mereka rasakan. Perekonomian warga di kepulauan jauh lebih bergeliat. Mereka juga turun tangan dan bersuara saat menentukan pembangunan. Srikandi Raja Ampat menjadi ujung tombak mengatasi kemiskinan.

Seorang ibu, bak pelaut ulung, berdiri di atas sampan kecilnya. Melewati perairan yang tenang, di sela bebatuan yang menjulang ke langit. Tak lama, ia mengeluarkan seperangkat alat pancing; segulung tali benang dan kail. Di atas sampan itu, ia lemparkan tali dan kail ke dalam perut laut. Dalam sekejap, ikan tenggiri seberat dua kilo, langsung menyambar kailnya.

"Ikan Tenggiri ini kita olah menjadi kerupuk dan abon ikan," kata Fatima Rukabu dari Pulau Saonek, Waigeo Selatan. Hampir satu tahun ini mereka menjalankan

usaha olahan makanan ikan Tenggiri. Hasilnya, mereka jual dan titipkan ke pertokoan di Pasar Waisai, satu-satunya pasar yang paling ramai di Kepulauan Raja Ampat. Setiap bulannya, mereka mendapatkan untung bersih hingga satu juta rupiah.

"Lumayan membantu biaya anak sekolah," kata Fatima Rukabu. Usaha kelompok perempuan ini, terbentuk atas dukungan PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka mendapatkan

modal usaha dan pelatihan. Modal setiap kelompok berkisar dua juta rupiah dan sanggup menggerakkan 13 anggotanya.

"Dulu hanya suami saja yang mencari rejeki. Sekarang, semua perempuan di sini sudah punya usaha olahan ini," katanya.

Pulau Saonek, Waigeo Selatan adalah pulau kecil yang terletak persis di depan pusat ibukota Waigeo, Raja Ampat. Di pulau ini terdapat dua kelompok perempuan yang mengolah hasil tangkapan ikan Tenggiri. Dan merangkul sekitar 30 orang lebih perempuan. Mereka mendirikan kelompok usaha dan berbagi tugas. Mulai menangkap ikan, memasak dan membungkus hasil olahan. Hingga mencatat lalu lintas keuangan simpan pinjam.

Bantuan usaha simpan pinjam PNPM Mandiri ini, membuat kehidupan perempuan di Raja Ampat semakin bergeliat. Mereka bisa mengisi waktu luangnya dengan kesibukan membuat olahan ikan. Selain itu, mereka bisa mendapatkan untung jauh lebih besar ketimbang menjual ikan basah saja.

Kepulauan Raja Ampat memang kaya dengan sumber daya alamnya. Di perkirakan potensi tangkapan ikannya mencapai Rp 126 miliar per tahun. Pariwisata juga masih menjadi magnet sekaligus tulang punggung perekonomian di sini. Sayangnya, berbagai potensi

"KEDATANGAN PNPM MANDIRI PERDESAAN SANGAT MEMBANTU. KAMI DIAJARI MENENTUKAN KEBUTUHAN KAMI SENDIRI, MEMBUAT PROPOSAL, MEMBANGUN DAN MENGELOLA SEKALIGUS MENGAWASI KEUANGAN."

Kurasia Buatan, Fasilitator PNPM, Raja Ampat



ekonomi dan alamnya ini, belum mampu mendorong kesejahteraan. Pembangunan dan sarana layanan publik pun masih terbatas.

"Di sini biaya hidup mahal. Sekalipun ikannya banyak," kata Odie Seumahu perwakilan dari *PNPM Support Facility* atau PSF wilayah Papua Barat. Perempuan, menurutnya, menjadi target pemberdayaan PNPM Mandiri. Mereka punya potensi untuk mengatasi keterbatasan dan kemandirian. "Perempuan tahu persis dengan kebutuhannya."

Salah satu kader perempuan yang lahir dari PNPM Mandiri di Raja Ampat adalah Kurasia Buatan. Kini, ia bekerja sebagai fasilitator dan hampir tiga belas tahun mengabdikan hidupnya sebagai pendamping masyarakat.

"Kedatangan PNPM Mandiri Perdesaan sangat membantu. Kami diajari menentukan kebutuhan kami sendiri, membuat proposal, membangun dan mengelola sekaligus mengawasi keuangan," kata Kurasia Buatan.

Kurasia Buatan bertekad bulat untuk membangun Raja Ampat. Ia juga merampungkan pendidikan dan pelatihan teknik pembangunan dari PNPM Mandiri, yakni program *barefoot engineer*. Program ini dibuat untuk menciptakan tenaga teknik dari pemuda-pemudi tanah Papua, sehingga mereka siap membangun kampungnya. Selama enam bulan, ia digembleng mengikuti pendidikan

di Jayapura.

Untuk tahun 2014, ia bertanggung jawab untuk mendampingi warga di 22 kampung yang tersebar di Misool Selatan, Raja Ampat dengan nilai total alokasi dana bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 450 juta. Setiap kampung mendapatkan dana yang berbeda sesuai kebutuhannya. "Kita bangun kemandirian masyarakatnya bukan sekedar pembangunan kampungnya saja," katanya.

Tak sedikit rintangan yang harus dihadapi Kurasia saat menjalankan tugasnya. Mulai dari kendala akses transportasi, distribusi material sampai urusan polisi. "Warga pernah mengancam saya dengan membawa panah," kenangnya. Beruntung, kasus ini dapat diselesaikan dan pelakunya masuk penjara. Tantangan lainnya, ia pernah terseret arus laut yang hampir merenggut nyawanya.

Melalui PNPM Mandiri, ia berharap agar warga mampu mendongkrak taraf hidupnya. Keberkahan alam di Raja Ampat seharusnya bisa menjadi modal utama meningkatkan kesejahteraan warganya. Termasuk dukungan nyata pembangunan yang bertahun-tahun belum dirasakan oleh warganya.

"Pendidikan menjadi kunci mengatasi kemiskinan," kata Kurasia Buatan. Melalui pendidikan, menurutnya, kehidupan warga di Raja Ampat bisa jauh lebih sejahtera dan mampu mengelola keberkahannya dengan bijak. ■

BERMALAM DI TEPI SUNGAI

Desa di Kecamatan Amfoang, Kupang, masih terisolir dari pembangunan. Keberadaan desa ini menyebar di perbukitan dan dipisahkan oleh sungai. Jalan berbatu masih menjadi jalan utama menuju desa-desa di Amfoang.

Namun, medan yang berat ini tak menyurutkan pengabdian Nofri Keas sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amfoang Barat Laut. Ia tiap hari berkunjung dari satu kampung ke kampung lainnya, dan menggerakkan berbagai kelompok simpan pinjam perempuan, termasuk membuat laporan audit dari kegiatan ini.

"Saat musim hujan, jalan tidak bisa diseberangi, becek dan penuh genangan. Butuh dua sampai tiga hari bisa lewat," kata Nofri Keas. Tak jarang ia mesti menginap di rumah warga atau tidur dekat sungai hingga airnya surut.

Risiko perjalanan keliling kampung sungguh berat. Namun, ia tulus mengabdikan agar kesejahteraan perempuan di Amfoang bisa meningkat. Termasuk partisipasi mereka dalam pembangunan. Ia melihat, PNPM Mandiri telah membuka mata bagi dirinya dan ratusan perempuan lainnya.

Sejak 2010 ia bergabung dengan PNPM Mandiri. Kegiatannya menyalurkan pendanaan simpan pinjam termasuk menagih dana agar siklus keuangan bisa berjalan dengan baik. "Menagih, menyeter hasil tagihan dan laporan bulanan saya lakukan sendiri."

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, UPK terdapat di setiap kecamatan. Sedangkan di PNPM Perkotaan, UPK berada dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan. UPK dijalankan oleh anggota yang dipilih langsung oleh warga se-kecamatan. Biasanya, terdiri dari tiga orang (ketua, bendahara dan sekretaris). Mereka

memfasilitasi warga desa dan kecamatan di lokasi PNPM dalam mengelola dana bantuan langsung masyarakat dari PNPM serta kegiatan simpan pinjam yang dijalankan kaum perempuan. Mereka hanya mendapatkan insentif yang diambil dari dana operasional kegiatan sebesar 2 persen dari setiap BLM yang dialokasikan.

Kecamatan Amfoang meliputi enam wilayah, yakni Desa Soliu, Oelfatu, Saukibe, Timau, Faumes dan Honuk. Kondisi geografis desa-desa ini terbilang sulit. Pembangunan desa-desa ini masih terbatas dan warga masih terlilit kemiskinan.

"Sekarang jalan di desa mulai diperbaiki, gedung sekolah dan posyandu dibangun. Beberapa jembatan juga sudah dibuat," katanya mengenai aktivitas PNPM ini. Perempuan-perempuan di desa juga bergeliat membuka peluang usaha. Mulai membuka toko kelontong, berdagang buah-buahan hingga ternak ayam. Setiap desa memiliki 5 hingga 10 kelompok usaha.

Nofri Keas menilai semangat kelompok perempuan ini luar biasa. Mereka menjaga agar angsuran pinjaman berjalan lancar, sehingga pinjaman bisa berkembang lebih besar untuk menambah modal usaha.

Tahun 2014, misalnya, Kecamatan Amfoang Barat Laut akan menerima dana sebesar Rp 3,2 miliar dari PNPM Mandiri. "Masih banyak sekali yang belum selesai. Meski tak seperti dulu, tapi kami merasa program ini sangat baik bagi kami. Saya berharap akan dilanjutkan," katanya.

Kegiatan simpan pinjam perempuan di Amfoang salah satu dari 465 ribu kelompok sasaran PNPM

Mandiri Perdesaan. Hingga akhir Desember 2013, total modal pinjaman bergulir mencapai Rp 6,6 triliun dan menjangkau jumlah peminjam hingga 4,6 juta orang. PNPM Mandiri Perdesaan mewajibkan alokasi sebesar 25 persen dari dana kegiatan untuk mendukung kegiatan simpan-pinjam yang digerakkan oleh kaum perempuan.

"Hampir 75 persen penikmat PNPM adalah perempuan," kata Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra, Sujana Royat.

Perempuan memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan. Namun, seringkali posisi mereka terabaikan. Selain itu, tujuh juta perempuan di Indonesia juga berperan sebagai kepala keluarga. Jumlah ini mewakili lebih dari 14 persen dari total jumlah rumah tangga di Indonesia. Kondisi mereka berada dibawah garis kemiskinan.

"Mereka butuh modal untuk peningkatan usaha," kata Tri Wusananingsih dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau Pekka. Kehidupan di Amfoang memang tak mudah. Namun seiring perjuangan dan dedikasi Nofri Keas, bukan mustahil jalan panjang mengatasi kemiskinan bisa tercapai. ■



"SEKARANG JALAN DI DESA MULAI DIPERBAIKI, GEDUNG SEKOLAH DAN POSYANDU DIBANGUN. BEBERAPA JEMBATAN JUGA SUDAH DIBUAT."

Nofri Keas, Amfoang, Kupang

Petronella Peni, Sri Mulyani dan Nani Zulminarni duduk di atas panggung. Mereka bertiga, tengah mengikuti acara JSDF atau *Japan Social Development Fund* yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Washington DC, 2011.

PEMIMPIN DESA YANG

Petronella Peni adalah kepala desa dari Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Sementara Nani Zulminarni adalah koordinator nasional Pekka atau Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Kedua tokoh ini dinilai memiliki dedikasi untuk mendorong kemandirian, kesetaraan dan kepedulian terhadap kondisi perempuan di Indonesia.

Mereka berdua duduk sejajar dengan Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan RI dan kini menjabat sebagai petinggi Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat di acara JSDF yang membantu berbagai kegiatan di Indonesia. Termasuk program di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Lembaga JSDF ini telah bekerja hampir sepuluh tahun di Indonesia.

Termasuk sejumlah kegiatan di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Forum diskusi ini, ingin mendengar mengenai berbagai pengalaman dan pelajaran di setiap negara. Termasuk kisah perjuangan kedua tokoh perempuan ini.

“Saya ingin melakukan banyak perubahan. Ada masalah air bersih, infrastruktur, kesehatan,” kata Petronella Peni menjelaskan kepada peserta diskusi.

“SEMUA MASYARAKAT HARUS
TERLIBAT UNTUK MENCAPAI
MIMPI BERSAMA.”

**Petronella Peni Lolli, Fasilitator PNPB,
Pulau Adonara, Flores Timur**



MENGGUNCANG AMERIKA

Pulau Adonara adalah pulau kecil yang terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini seperti pulau eksotik lainnya di Indonesia. Namun, warganya tinggal dalam kondisi miskin dan pembangunan belum menyentuh pulau ini. Keberadaan Petronella menjadi motor perubahan. Ia satu-satunya perempuan yang menjadi pemimpin utama desa ini. Termasuk, mendobrak pandangan sosial budaya warganya yang merendahkan perempuan.

Di Adonara, dikenal dengan istilah *lamaholat*. Perempuan dinilai bodoh, tidak layak menjadi pemimpin, dan tidak mendapatkan hak waris. Tradisi turun temurun ini membuat posisi perempuan di Adonara rendah.

"Semua masyarakat harus terlibat untuk mencapai mimpi bersama," kata Petronella Peni. Sosok perempuan ini terkenal aktif membangun Adonara sejak tahun 1990. Ia dipercaya oleh warganya menjadi kepala desa sejak tahun 2007. Salah satu program utamanya adalah memperhatikan kelompok perempuan. Di tahun yang sama, beruntung desanya mendapatkan bantuan dari PNPM. Warga desanya, mengalokasikan untuk pembangunan jalan sepanjang 900 meter, dua posyandu dan akses listrik untuk rumah warga.

Penggunaan dana PNPM Mandiri bukan diputuskan sendiri namun oleh forum musyawarah desa dan kecamatan.

"Dari berbagai pengalaman itu saya meyakini bahwa pemimpin adalah panggilan untuk mengabdikan. Pemimpin

harus melayani bukan dilayani. Karena itu saya selalu berusaha duduk bersama masyarakat saya untuk merencanakan dan memutuskan bersama, dan kelak menikmati hasilnya bersama pula," katanya.

Semangat Petronella membuat kagum Sri Mulyani dan mengajaknya untuk berbagi pengalaman di Amerika Serikat. Menurut Sri Mulyani, Indonesia butuh sosok pemimpin seperti Petronella. Pemimpin yang berintegritas dan melayani warganya.

Petronella mendorong perekonomian warganya. Sejumlah program usaha kecil menengah ia hidupkan di Adonara lewat simpan pinjam khusus kelompok perempuan dari PNPM Mandiri. Ia ingin agar perempuan di Adonara bisa bangkit dari persoalan ekonomi.

Menurut Nani Zulminarni, terdapat enam juta perempuan kepala keluarga yang tergolong miskin. Mereka menghidupi tiga hingga lima anggota keluarganya. Sektor informal menjadi tumpuan kepala keluarga perempuan ini. Dan Petronella Peni adalah salah satu dari sekian juta perempuan ini. Ia adalah perempuan janda yang suaminya meninggal dunia akibat konflik.

Petronella juga aktif di Pekka. Ia melakukan pendampingan dengan perempuan di Adonara. Membentuk kelompok, melakukan berbagai pelatihan agar perempuan di Adonara bisa mandiri dan mampu menyuarakan suaranya. "Pembangunan harus bisa dinikmati bersama." ■

MENJAGA POHON PENJAGA KEHIDUPAN

Desa Tinongko, Minahasa Utara, terletak di bibir Samudera Pasifik. Desa yang sebagian besar dihuni oleh nelayan ini tergolong rawan bencana alam. Ganasnya ombak bukan mustahil bisa menyapu desa. Sayangnya, keberadaan hutan bakau sebagai benteng alami pemecah ombak dan pelindung abrasi, kondisinya semakin rusak.

Kondisi ini mendorong Vola Harindah dan suaminya turun tangan menyelamatkan hutan bakau di sekitar Desa Tinongko. Ia yakin, keberadaan bakau memberikan manfaat bagi manusia dan alam. Saat ini, 11 hektar bakau di Tinongko mengalami kerusakan. Warga seringkali menebang bakau untuk kebutuhan pembangunan dermaga dan rumah tangga.

“Tentu dermaga banyak manfaatnya. Tapi penebangan itu menimbulkan kekhawatiran. Apalagi, saat itu masyarakat banyak yang mengabaikan manfaat bakau,” kata Vola Harindah yang juga seorang guru ini. Akibatnya, warga mulai merasakan kesulitan mencari ikan di sela-sela akar bakau. Padahal, sebelum rusak, mereka dengan mudah mencari ikan untuk keperluan sehari-hari.

Penyelamatan bakau yang digagas oleh Vola Harindah mulai membuka mata masyarakat. Mereka mulai menghentikan aktivitas menebang pohon bakau. Dan ikut menyemai dan menanam bibit bakau di sekitar pulau. Termasuk kegiatan membuat energi alternatif dari arang limbah batok kelapa. Arang ini digunakan sebagai pengganti kayu bakar dari bakau.

“Ini sebagai antisipasi agar masyarakat tak lagi melirik

bakau untuk bahan bakar,” katanya.

Ia bersama perempuan lainnya di Desa Tinongko membentuk kelompok untuk dapat mengakses dana PNPM Mandiri. Lewat kelompok Japruk atau Jaringan Perempuan Usaha Kecil Baronang mereka melakukan kampanye penyelamatan bakau, termasuk menyediakan produksi arang batok kelapa. Bahan utama batok diambil dari sekitar pulau. Dan di pasarkan ke Manado.

Menanam bakau hingga membuat arang kelapa memang menjadi menu wajib kegiatan lingkungan di Tinongko. PNPM Mandiri, melalui PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan menysasar 75 kecamatan di 8 provinsi di Indonesia. Dana lingkungan ini bertujuan untuk pelestarian dan dipilih sebagai program percontohan selama empat tahun sejak 2008 silam. Dana setiap kecamatan mencapai Rp 500 juta per tahun.

“Saya memberikan pendidikan dan pelatihan tentang bakau pada anak-anak SMP dan SMA. Program ini mewajibkan mereka untuk menanam bakau setiap minggu,” katanya. Kini, ribuan bibit bakau jenis *Rhizophora mucronata* telah mereka tanam. Bibit ini, hasil penyemaian sendiri yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Generasi muda di desanya semakin sadar untuk

menjaga keberadaan bakau ini. Mereka tak segan menegur orang-orang tua yang akan menebang bakau sembarangan.

Pemerintahan Kanada lewat ajang *Green Champion* (CIDA) memberikan penghargaan kepada Vola Harindah atas pengabdianya menyelamatkan hutan bakau ini. Penghargaan ini memberikan motivasi yang besar bagi dirinya dan juga masyarakatnya untuk peduli terhadap isu lingkungan. Dan kini, si pohon bakau mulai tumbuh melindungi Desa Tinongko.

“Masyarakat masih berjuang agar semakin sadar dengan isu lingkungan, dan merasakan manfaatnya,” katanya.

Menanam bakau adalah menjaga kehidupan. Masa depan kehidupan Tinongko bergantung pada keberadaan bakau si benteng alami ini. Dan kelak, mereka akan menuai hasilnya. ■



“SAYA MEMBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG BAKAU PADA ANAK-ANAK SMP DAN SMA. PROGRAM INI MEWAJIBKAN MEREKA UNTUK MENANAM BAKAU SETIAP MINGGU.”

Vola Harindah, Fasilitator PNPM Lingkungan Perdesaan, Minahasa Utara

BEKERJA DENGAN HATI

Voni Yo Mbali rela berkeliling kampung memeriksa setiap ibu hamil. Meski berjalan kaki dan melewati sungai. Tantangan semakin sulit manakala banjir tiba. Termasuk kuatnya kepercayaan kepada dukun dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dusun Lahiding, Desa Kiri Tana, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur tergolong desa terpencil. Daerahnya masih berlembah dengan jalan setapak yang berpasir. Untuk berkunjung ke desa dengan penduduk sebanyak 300 jiwa ini, mesti melewati sungai. Sampan-sampan berukuran kecil menjadi transportasi utama melewati sungai ini.

“Kalau hujan lebat dan banjir tidak bisa ke desa ini,” kata Voni Yo Mbali. Voni adalah bidan yang bertugas di desa

ini sejak 2001 hingga 2009. Ia adalah satu-satunya bidan di Dusun Lahiding. Setiap hari ia bekerja dan berkunjung dari satu dusun ke dusun lainnya. Sarana yang terbatas dan akses perjalanan yang sulit tak menyurutkan niatnya untuk membantu perempuan hamil.

“Menolong orang tidak hanya tuntutan pekerjaan, tetapi ini merupakan panggilan jiwa,” katanya. Tak mudah bekerja di tempat terpencil seperti ini. Akses layanan yang terbatas menyebabkan

“MENOLONG ORANG TIDAK
HANYA TUNTUTAN PEKERJAAN,
TETAPI INI MERUPAKAN
PANGGILAN JIWA.”

**Voni Yo Mbali, Fasilitator PNPM,
Desa Kiri Tana, Sumba Timur**



tingginya angka kematian ibu hamil dan bayi di dusun ini.

“Dulu masyarakat tak mau dibantu petugas kesehatan. Mereka lebih suka dibantu dukun. Kalau diberikan penjelasan tentang kesehatan, mereka hanya tertawa,” katanya. Selain itu, banyak ibu hamil yang masih buta huruf atau hanya lulusan sekolah dasar.

Tapi Voni tak patah arang. Perempuan kelahiran 12 Oktober 1976 ini terus giat melakukan penyuluhan kesehatan dan menggerakkan kader-kader posyandu untuk menjadi ‘informan’ keberadaan ibu hamil di Dusun Laihiding. Beruntung untuk mengunjungi dusun ini, telah tersedia sebuah sampan hasil bantuan dari PNPB Generasi pada tahun 2007.

Kehadiran PNPB Generasi diakuinya sangat membantu. Kader Posyandu yang sebelumnya hanya bermodal semangat, kini mendapat biaya transportasi. Kondisi kesehatan bayi semakin terpantau. Peralatan sarana dan prasarana kesehatan semakin lengkap seperti dengan pengadaan alat timbangan bayi. Saat ini sudah terdapat empat buah posyandu.

“Beruntung desa ini adalah desa agraris yang sering menanam sayuran pada musim hujan, seperti terung, tomat, kacang panjang dan labu siam. Jadi konsumsi

sayuran terjaga. Dana dari PNPB juga kami gunakan untuk perbaikan gizi bagi balita dan anak-anak,” terangnya.

Voni menilai, kekurangan petugas kesehatan, baik dokter, bidan dan perawat juga menjadi faktor utama. BPS mencatat, 1 dokter di Sumba Timur harus melayani penduduk sebanyak 6 ribu orang, sedangkan 1 orang perawat melayani 1.000 orang dan 1 orang bidan melayani 1.000 orang.

Voni Yo Mbali memang bermental baja. Untuk meningkatkan keahliannya, ia melanjutkan pendidikan di Kupang hingga lulus diploma tiga kebidanan.

“Saya patut berbangga. Delapan tahun bertugas di Kiri Tana, banyak kemajuan. Dusun Laihiding punya posyandu sendiri, partisipasi masyarakat juga mulai menggeliat. Yang menjadi catatan, seharusnya dibangun jembatan di atas sungai Kambaniru agar memudahkan saat membantu persalinan.”

Kini, ibu dua anak ini telah berpindah tugas ke puskesmas lainnya. Namun ia berjanji akan terus melayani kesehatan dengan hati. Termasuk berkeliling kampung untuk memeriksa setiap ibu hamil dan bayi. “Semoga dengan cara seperti ini dapat menekan angka kematian ibu dan bayi,” harapnya. ■





IV

CARA TAK BIASA

Ibarat ayam mati di lumbung padi. Kemiskinan di Indonesia terjadi ditengah kekayaan sumber daya alamnya. Berbagai keterbatasan seperti pendidikan, infrastruktur, ekonomi hingga sosial budaya menjadi masalah utama mengatasi kemiskinan selama ini. Lewat jalan tak biasa ini, mereka ingin mengubah keadaan menjadi kekuatan untuk melawan kemiskinan.

“SELAIN MEMANTAU SECARA LANGSUNG, WARGA DESA MELUNG MENGAWASI PEMBANGUNAN SERTA MELAPORKAN INDIKASI PENYELEWENGAN SECARA *ONLINE* BILA DITEMUKAN, BAIK MELALUI *GADGET* MAUPUN KONEKSI INTERNET DI DESA.”

Agung Budi Satrio, Blogger Desa Melung, Banyumas



Berbagai program pembangunan dari pemerintah telah diluncurkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Termasuk memberikan dana yang bersumber dari anggaran negara maupun bantuan internasional. Namun, upaya ini tidak akan berhasil dan berdampak luas, jika masyarakat tak ambil bagian untuk mengatasi kesulitan dari keterbatasannya sendiri.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, masyarakat harus mengidentifikasi potensi dan masalah mereka untuk keluar dari kemiskinan. 1001 jalan berbagai inisiatif warga lahir untuk mengurai benang kemiskinan. Mereka menemukan caranya sendiri yang unik dan berbeda sebagai jalan mengatasi keterbatasannya. Termasuk, memaksimalkan segala potensi dari kekuatan yang ada. Dengan prinsip “open menu” dimana masyarakat bebas menentukan bentuk kegiatan

yang dibiayai PNPM. Kini, warga miskin di penjuru Indonesia, mengejar agar mimpinya bisa terwujud.

“Warga bisa merasakan manfaat radio ini karena banyak informasi yang disampaikan. Jadi bisa tahu banyak hal. Program mengakomodir kebutuhan warga,” kata seorang warga, Rihadi dari Sragi, Pekalongan tentang radio komunitas binaan PNPM. Radio komunitas menjadi media utama membangun partisipasi warga.

“Pendekatan kreatif ternyata mendorong warga berpartisipasi dalam PNPM,” kata Ronny Iwan Setiawan dari Lombok. Mantan jurnalis televisi ini melakukan pelatihan dan pembuatan video. Warga merekam persoalan di sekitar mereka dan menjadi media tontonan bersama untuk membangun solidaritas. Hasil rekaman video ini ternyata mendorong warga lebih peduli dengan kesehariannya.

Namun, inovasi tidak hanya tergantung pada peranan teknologi. Masyarakat juga memanfaatkan keberadaan seni, budaya dan lingkungan sebagai pendorong pemberdayaan. Melalui serangkaian kegiatan kreatif, pendekatan ini juga membuahkan hasil yang sama. Bahkan, menjadikan ciri khas dan teladan bagi daerah lainnya di Indonesia.

“Kita awali dengan dua ekor burung hantu. Sekarang mencapai 200 ekor,” kata Soetoejo, Kepala Desa Tlogoweru, Demak. Burung hantu menjadi sahabat petani. Predator alami ini membasmi hama tikus yang kerap kali menghancurkan pertanian mereka sepanjang tahun. *Tyto Alba*, si burung hantu ini berhasil mengurangi hama tikus. Dan membuat hasil panen mereka semakin melimpah.

“Seni dan budaya tetap hadir jika bangsa ini terbuka dalam kreativitas dan inovasi,” kata Sufinitri Rahayu dari Yayasan Kelola.

Bab ini mengisahkan cara tak biasa yang sederhana namun sarat nilai. Mulai kisah dari Desa Patanyamang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang tak terjamah listrik. Mereka menggunakan tenaga listrik air sebagai energi utama.

Warga Sragi, Kabupaten Pekalongan yang mendirikan radio komunitas sebagai media rakyat dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. Hingga kisah dokter Yosep Usen Ama seorang kepala dinas kesehatan dari Kabupaten Flores Timur yang menggunakan pesan pendek untuk memantau kesehatan ibu hamil di daerah kepulauan.

Berbagai kisah ini menyimpan nilai yang luarbiasa. Cara-cara “Out of the box” yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya untuk mengatasi kemiskinan. Lewat berbagai jalan ini, warga berjuang mengatasi kemiskinan setiap hari. Bahkan, tak sedikit menjadi contoh bagi daerah lainnya.

“Cara kreatif ini juga menghidupkan dunia kesenian. Dan seniman harus peduli dengan persoalan sekitarnya,” kata Ki Purbo Asmoro, seorang pedalang wayang kulit dari Solo, Jawa Tengah. Ia mengangkat tema-tema mengenai korupsi lewat wayang. Di hadapan ribuan orang, ia mencoba membangun kepedulian dan menyebar semangat anti-korupsi.

Tentu, berbagai cara ini adalah jalan panjang melawan kemiskinan. Namun, dengan semangat kebersamaan dan niat untuk berubah, bukan tak mustahil warga bisa segera mewujudkan mimpinya. Dan bangkit dari keterpurukan yang selama ini melilit kehidupan mereka.

1001 jalan terbentang. Dan saatnya, kemiskinan menjadi jejak masa lalu dari kehidupan mereka. ■



“KAMI TAHU DARI INTERNET DAN TERTARIK GAGASAN DESA MUNGUR, NGAWI YANG MEMANFAATKAN BURUNG HANTU UNTUK MENGHALAU TIKUS HINGGA MEMUTUSKAN MENGIKUTI PELATIHAN DAN BELAJAR DI SANA MESKI MEROGOH KAS DESA RP 8 JUTA.”

Soetedjo, Kepala Desa Tlogoweru, Demak

TYTO ALBA,

Petani dari Tlogoweru, Demak, Jawa Tengah, menangkarkan beberapa burung hantu jenis *Tyto Alba* yang kini berkembang ratusan ekor.

Keberadaan burung predator ini berhasil membasmi hama tikus yang kerap kali menghancurkan lahan pertanian. Kini, warga mulai memanen manfaat hasil kerja si *Tyto Alba*.



◀ **SOETEDJO** dan Pujo Harto menunjukkan burung hantu jenis *Tyto Alba* yang ditangkarkan untuk digunakan sebagai pembasmi hama tikus di sawah.

SI BURUNG HANTU SAHABAT PETANI

Peluh di kening Darminingsih, 60 tahun, menetes deras. Wajah petani Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ini sumringah meski terik matahari menyengat. Sese kali, diselingi gurauan dan tawa dari tiga pekerja lainnya.

Kebahagiaan menyaksikan gendutnya bulir padi dan panen melimpah, juga dirasakan warganya sejak empat tahun terakhir ini. Kegetiran puluhan tahun menjelang panen padi dan jagung pun hilang.

“Satu bahu (petak) bisa menghasilkan 70 karung dan bisa untung Rp 15 juta. Tidak merugi dan nombok lagi,” ujar Darminingsih dengan logat Jawa.

Sebelumnya, dia selalu meratapi sisa panen yang *wurung* (gagal) karena padi dan jagungnya habis disikat hama tikus. Tiap musim panen selalu kehilangan setengah hasil panennya. Serangan tikus begitu masif hingga memperburuk perekonomian warga.

“Setelah diperiksa hanya tongkolnya saja. Panen satu petak hanya tujuh karung. Itupun mengais bulir padi atau jagung yang tersisa. Panen jarang berhasil. Tapi, sejak ada *Tyto* semua berubah,” kenangnya.

Tyto, tak lain adalah burung hantu. Nama latinnya, *Tyto Alba* yang berfungsi sebagai predator alami. Keberadaan burung hantu ini difungsikan untuk membasmi hama tikus yang kerap kali menghancurkan pesawahan milik warga seluas 225 hektar. Keberadaan *Tyto Alba* ternyata memiliki dampak nyata terhadap pertanian di desa ini.

“Upaya gopyokan, pestisida, hingga mewajibkan warga menyeter 15 ekor buntut tikus tak maksimal. Padahal

terkumpul 20 ribu ekor tikus tiap panen,” kata Kepala Desa Tlogoweru, Soetedjo.

Tahun 2010 ia merapatkan barisan dengan warganya. Jalan tengahnya; mengajak Si *Tyto Alba*, predator alami. Sejak saat itu, warga mulai menangkarkan keberadaan burung ini. Dan mempelajari perilaku si burung hantu.

“Kami tahu dari internet dan tertarik gagasan Desa Munggur, Ngawi, yang memanfaatkan burung hantu untuk menghalau tikus hingga memutuskan mengikuti pelatihan dan belajar di sana meski merogoh kas desa Rp 8 juta,” jelas Soetedjo.

Warga menangkarkan burung hantu dari dua ekor dan bereksperimen dengan berbagai rantai makanan. Mulai dari ayam hingga burung merpati. “Hasilnya tetap tikus yang dimangsa,” kata Pujo Harto, perawat burung.

Tak butuh waktu lama, *Tyto Alba* langsung bekerja. Panen pertama di akhir tahun 2010 menampakkan hasil menggembirakan. Bahkan dua tahun berselang, pertumbuhan hasil panen mencapai 7,6 ton tiap hektar.

“Dalam setahun tiga kali masa panen bisa menghasilkan 46,2 juta rupiah tiap hektar. Dengan modal pengembangbiakan burung hantu sebesar 87 juta rupiah bisa menghasilkan panen 10,3 miliar rupiah. Total bisa mencapai 15 miliar rupiah per tahun,” catat Soetedjo.

Kehadiran *Tyto Alba* berdampak nyata bagi perekonomian warga Desa Tlogoweru. Tak sedikit rumah papan milik petani berganti dengan rumah tembok. Desa ini juga menjadi rujukan bagi desa lainnya di Demak. Bahkan, peneliti dari luar negeri belajar mengenai perubahan di desa ini.



“Dari situ banyak bantuan mengalir dari sejumlah pihak termasuk program PNPM Mandiri untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas dan pelayanan publik di desa,” katanya. Bahkan, beberapa desa tetangga terinspirasi untuk menggunakan dana PNPM Mandiri untuk membeli burung hantu.

Tak berpuas diri, Soetedjo terus mengajak warga berbenah mewujudkan desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi desa dan pemberdayaan warga hingga berhasil menjadi desa percontohan nasional dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Tak hanya melalui program pengembangbiakan *Tyto Alba* saja. Tapi juga program investasi lain untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, seperti kincir angin dan pembangunan 800 sumur pantek untuk irigasi dan pertanian.

“Kami juga memanfaatkan lahan kosong untuk perikanan, peternakan, dan tanaman obat,” jelas Soetedjo yang diganjar predikat kepala desa inovatif tingkat nasional di tahun 2012.

Soetedjo mengakui, pengelolaan dengan keterbatasan dana dan tenaga menjadi kendala terbesar. Dia dan 14 tim lapangan berhasil mengembangkan *Tyto Alba* hingga mencapai 220 ekor. “Dengan penambahan 500 ekor pertahunnya dibiarkan menyebar di desa sekitar.”

Pemerintah Desa Telogoweru menerbitkan Peraturan Desa No. 4 tahun 2011 tentang larangan menembak burung. Bahkan peringatan larangan ini dipasang di hampir sudut jalan desa. Perdes itu harus datang dari inisiatif warga sendiri. Warga mau melaksanakan karena merasa aturan ini bermanfaat bagi mereka.

“Kuncinya, pelibatan warga dalam menyusun program, seperti diterapkan dalam PNPM, menanamkan kepedulian dan komitmen bersama membangun desa untuk kemajuan bersama. Itu yang tidak banyak dilakukan,” tandasnya. ■



PETANI memulai musim tanam padi di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

WARGA menjemur gabah yang baru saja di halaman rumahnya.



PAPAN peringatan larangan menembak burung banyak terpasang di setiap sudut desa.



MENCANGKUL SAMBIL BERMAIN INTERNET

Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengembangkan akses internet untuk warganya. Ketersediaan akses internet ini telah membuka pintu informasi. Termasuk menggerakkan partisipasi warga dan transparansi pembangunan desa.

Desa Melung seperti kebanyakan desa lainnya di kaki Gunung Slamet. Air mengalir sepanjang tahun dan area pesawahan yang menghijau. Udara sejuk menggigit kulit. Tak salah jika pada masa Belanda, daerah ini menjadi tempat istirahat. Dan sangat cocok mengembangkan tanaman kopi.

Desa Melung termasuk desa yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah. Namun akses yang terbatas menyebabkan desa ini terisolir bertahun-tahun. Harga panen dikuasai para tengkulak. Akses informasi seperti koran juga terbatas. Satu-satunya pembangunan adalah jalan sejauh delapan kilometer hasil warisan masa Belanda. Desa seluas 1.320 hektar dengan penduduk 2 ribu lebih jiwa ini pun tak tersentuh dunia luar.

Namun itu cerita dulu. Kini, salah satu desa penerima PNPM ini justru menjadi inspirasi bagi banyak desa lainnya di Indonesia. Desa yang terletak di 600 meter di atas permukaan laut itu terhubung layanan internet. Keberadaan akses internet bagi warganya telah membuka pintu dunia luar.

Dari mulai petani, pelajar sekolah hingga perangkat desa. Lewat internet mereka mencari berbagai informasi untuk mengembangkan potensinya. Termasuk menggali dan mendokumentasikan aktivitas warga di Desa Melung.

“Dulu mengandalkan surat kabar untuk informasi harga sayur dan lain-lain. Tapi harus ke Purwokerto yang jaraknya 15 kilometer dari sini,” kata Kepala Desa Melung, Khoerudin.

Gagasan internet datang dari Agung Budi Satrio yang juga mantan kepala desa selama 10 tahun. Ia melihat, keberadaan internet bisa menjadi kekuatan agar desa ini berkembang. Selain itu, warga memiliki akses informasi yang mudah dan murah.

Pada tahun 2007 ia mulai membangun jaringan kabel internet dari rumahnya. Bermodal kas desa sebesar Rp 1.5 juta dia kembangkan internet untuk menjangkau empat dusun. Pada tahun 2009, Budi bersama warga mendirikan antena pemancar dan penerima agar warganya bisa mengakses internet melalui sinyal wi-fi. Tak salah, jika saat ini warga bisa asik mengakses internet sambil menyangkul sawahnya.

“Ini berawal saat kami mengalami kesulitan menyediakan data yang akurat. Bahkan, data jumlah penduduk desa dan potensi desa, disini tidak ada yang valid,” ungkap Budi. Mereka mengembangkan data dan potensi desa berbasis internet.

Inisiatif Budi didukung PNPM Mandiri Perdesaan melalui dana Ruang Belajar Masyarakat (RBM) di tingkat kabupaten. Dana ini digunakan untuk pelatihan internet dan



AGUNG Budi Satrio (membawa komputer) penggagas desa internet bersama warga Melung.



WARGA menikmati fasilitas internet gratis di kantor Desa Melung.



DELAPAN titik *hotspot* terpasang di seluruh penjuru desa hingga di tengah lokasi persawahan yang sejuk dan subur.

berbagai sistem operasi komputer. Manfaat keberadaan akses internet ini mulai dirasakan oleh warga Melung. Setiap sore, warga berkumpul di balai desa untuk belajar komputer dan internet. Petani juga membawa ponsel sambil mengecek berbagai media sosial.

Tak berhenti di sana, Budi Satrio juga mengembangkan Gerakan Desa Membangun. Gerakan ini lahir untuk memperkuat jaringan informasi dan data mengenai desa. Ia juga memelopori pendirian *desa.id* sebagai domain desa-desa di Indonesia secara gratis.

“Selain memantau secara langsung, warga Desa Melung mengawasi pembangunan serta melaporkan indikasi penyelewengan secara *online* bila ditemukan, baik melalui *gadget* maupun koneksi internet di desa,” kata Budi dalam acara Semangat Anti Korupsi yang diselenggarakan PNPM Mandiri dan KPK di Jombang.

Berkat sarana internet ini, Desa Melung mampu menggelar pilkades murah dan bersih, meningkatkan kemampuan warga dan perangkat desa. Termasuk mendorong partisipasi warga dan transparansi pembangunan desa.

Untuk memudahkan warga, pengelolaan sistem teknologi informasi di Melung berbasis open source yang mudah diaplikasikan seperti *Linux*, *Ubuntu*, dan sistem operasi lokal berbahasa Jawa, *BlankOn Banyumas*.

Lewat situsnya, www.melung.desa.id mereka mempromosikan segala potensi desanya. Termasuk hasil pertanian organik, kopi dan wisata alam.

“Warga memanfaatkan mencari informasi tentang pertanian organik dan usaha. Hasil pertanian organik sudah disuplai ke swalayan di Purwokerto,” imbuh Rofik Hidayat [25], Koordinator Gapoktan Pager Gunung.

Kini, Melung menggaung hingga penjuru dunia. Daerah yang jauh dari peradaban terasa dekat. Seperti suara ayam melung dalam kisah turun temurun desa yang kokohnya terdengar hingga di kejauhan. ■



WARGA bermain internet menggunakan fasilitas *wifi* yang terpasang di delapan titik di sekitar desa hingga di tengah sawah.



PESAN PENDEK BAGI IBU HAMIL

Bidan Joria Parmin, dari Larantuka, Flores Timur terbiasa menerima kabar mendadak dari ibu yang akan melahirkan. Bahkan dengan kondisi janin yang kritis.

Artinya, dia harus siaga membantu persalinan atau menjemput pasien rujukan di pelabuhan untuk diantar ke RSUD Larantuka, di Flores Timur. Jika kabar itu telambat diterimanya, bukan mustahil berujung maut.

Terbatasnya akses menuju pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil menyebabkan keterlambatan penanganan. Mereka harus menyeberang arus selat Gonsalu yang sangat deras dengan perahu motor berukuran kecil.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi juga menjadi persoalan yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi di Nusa

Tenggara Timur (NTT) menempati urutan tertinggi. Dalam profil kesehatan nasional 2001-2006, angka kematian ibu dan anak pada saat kelahiran mencapai 300 per 100 ribu jumlah kelahiran di Indonesia.

Minimnya pengetahuan, akses informasi kesehatan ibu hamil menjadi penyebab tingginya angka kematian di NTT. Kondisi ini mengusik dr Yosep Usen Ama, untuk berinovasi menyelamatkan masa depan ibu dan anak di wilayah Flores Timur.

Di tahun 2010, Kepala Dinas Kesehatan ini menggagas pendirian program 2H2 Center. Sebuah program yang memfokuskan pelayanan ibu melahirkan dua hari sebelum dan dua hari pasca melahirkan. Masa dimana ibu dan anak paling rentan terhadap kematian.

Cara kerjanya sangat sederhana. Ibu hamil di seluruh Flores Timur di data dan dikirim lewat pesan pendek untuk dimasukkan ke dalam komputer induk. Komputer itu yang mencatat perkiraan waktu persalinan. Tim pengelola 2H2 Center hanya tiga orang. Mereka staf dinas kesehatan yang diberi fasilitas telepon genggam untuk memantau perkembangan ibu hamil secara bergilir, membuat data kelahiran dan menjemput pasien rujukan dari Pulau Solor dan Adonara ke RSUD Larantuka. Tim juga mengandalkan para bidan desa yang tersebar hampir di separuh wilayah kabupaten.

Tujuannya, untuk mengurangi tingginya angka

kematian ibu dan anak di NTT khususnya kabupaten Flores Timur dengan melibatkan kepedulian sosial, seperti camat, pastor, dan pemimpin agama setempat. Biaya untuk membangun koordinasi juga terbilang murah. Dana Rp. 3,5 juta diambil dari biaya rutin. Tidak ada pos biaya khusus APBD untuk program itu.

“Tidak butuh biaya besar karena hanya memberikan informasi. Juga tidak perlu rumah singgah. Camat bisa tanya kepala desa tentang perkembangan ibu hamil di desa masing-masing, Pastor bisa mengunjungi ibu hamil di sela-sela pelayan. Dan bidan desa terus memantau ibu hamil di wilayah kerjanya,” jelas dr Yosep. Biaya-biaya lain, seperti biaya pemeriksaan kehamilan rutin, makan tambahan, dan juga biaya transportasi untuk mengantar ibu hamil ke titik penjemputan yang dikoordinir 2H2 Center disediakan oleh PNPM Generasi. Dengan demikian, kerjasama antar program berjalan efektif.

Dengan pendekatan sederhana itulah Dinas Kesehatan meminimalisir keterlambatan penanganan pasien karena terlalu lama di perjalanan, atau tidak segera tertangani layanan kesehatan. Informasi via sms ini juga memastikan tidak ada ibu yang melahirkan tanpa bantuan medis. “Ibu hamil bisa cepat ditangani untuk mendapat pelayanan di puskesmas atau rumah sakit. Ambulan bahkan bersiap di titik penjemputan saat

dibutuhkan,” kata Joria Parmin.

Yosep mengatakan, program 2H2 Center merupakan terobosan dan satu-satunya program yang diinisiasi pemerintah Flores Timur untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Hasilnya, di tahun 2013 angka kematian ibu dan bayi menurun. Dari 14 orang kematian ibu melahirkan di tahun 2009, kini tinggal 6 orang. “Angka itu terus turun dan banyak nyawa terselamatkan khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil,” tuturnya.

Keberhasilan program besar berbiaya minim sebagai salah satu gebrakan cerdas Pemkab Flores Timur dianugerahi *Indonesia Milenium Development Goals Award* (IMA). Tak hanya menurunnya angka kematian ibu dan bayi, program itu mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan.

Kini, pekerjaan Joria Parmin yang juga staf 2H2 Center lebih mudah. Cukup menekan tombol telepon selulernya untuk memberi kabar kepada sopir ambulans yang biasa bertugas menjemput pasien rujukan. ■



“IBU HAMIL BISA CEPAT
DITANGANI UNTUK
MENDAPAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS ATAU
RUMAH SAKIT. AMBULAN
BAHKAN BERSIAP DI TITIK
PENJEMPUTAN SAAT
DIBUTUHKAN.”

Joria Parmin, Bidan, Flores Timur

BERBICARA MELALUI VIDEO

Malam itu, anak-anak hingga orang dewasa berbondong-bondong menuju lapangan desa. Tak sabar mereka ingin menikmati secuil kisah dari layar putih berukuran 2 x 3 meter yang dipasang di ujung dusun.

Di gambar bergerak itulah, potongan demi potongan gambar warga Dusun Pandanan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terekam. Di tengah keriuhan layar tancap, ada yang tersipu, tergelak dan tersenyum kecut menyak-

sikan kisah mereka sendiri. Dari situlah, mereka menyadari satu hal: kampung halaman mereka ternyata kaya potensi sumber daya alam dan manusia.

Mengajak partisipasi warga dari awal pembuatan hingga pemutaran film dengan penggunaan video menjadi terobosan satu dari program pendekatan budaya Inisiatif Komunitas Kreatif (IKK), yang digagas sejak Mei 2008 untuk mendukung PNPM Mandiri Perdesaan.

"Harus ada hal baru yang bisa menarik perhatian dan keterlibatan warga," ujar Ronny Iwan Setiawan, fasilitator Komunitas Kreatif II di Lombok Utara.

Tak mudah mengajak warga yang tinggal di kabupaten yang baru lahir enam tahun ini, bersuara. Sebagian besar masih dihimpit kemiskinan yang menggantungkan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan tradisional. Warga yang bekerja sebagai buruh tani ini hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 25 ribu perhari.

Kekayaan potensi alam dan ragam budaya tak mendongkrak perekonomian warga lokal. Sebanyak 43 persen warga Pandaan tergolong miskin. Padahal wilayah seluas 810 kilometer, di bibir pantai ini memiliki maskot wisata Gilli Trawangan di Desa Tiga Gili yang menjadi magnet wisatawan.

Mantan jurnalis televisi ini pun tergerak mendedikasikan keahliannya. Dengan gaya santai seperti warga lainnya. Dia mulai mengenalkan dan berbagi pengalaman pada sekelompok remaja di Dusun Pandanan mengenai reportase dasar lewat video. Gayungpun bersambut. Ibarat anak-anak yang "getol" belajar mengenal dunia, warga antusias untuk belajar pada Ronny.

Pembelajaran dikemas dengan cukup sederhana. Lelaki berambut gondrong ini biasanya mengumpulkan mereka di *berugag*. Saung kecil di beranda rumah tem-

"HARUS ADA HAL BARU
YANG BISA MENARIK
PERHATIAN DAN
KETERLIBATAN WARGA,"

**Ronny Iwan Setiawan,
Fasilitator Komunitas Kreatif II
di Lombok Utara**



pat bersantai yang disulap menjadi ruang belajar terbuka. Sebuah papan kecil menjadi sarana coretan dan bait kalimat untuk menjelaskan cara kerja merekam aktivitas warga. Dari hal teknis alat hingga tips membingkai isu liputan untuk diwujudkan dalam gambar bermakna.

Siapa saja yang tertarik bebas belajar. Tak segan dia mendampingi sekaligus memberi pelatihan kepada anak-anak muda di desa yang ingin belajar video. “Meski awalnya malu tapi lama-lama mereka antusias dan terbiasa. Apalagi rekaman video yang dikerjakan ini menjadi medium warga mengenal desanya,” ujar lelaki yang tak segan setiap hari menempuh jarak 20 kilometer dari Mataram ke desa ini.

Bahkan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Ayah satu anak ini menyusun modul video sederhana agar lebih mudah dicerna. Modul ini menjadi panduan para fasilitator pendamping program lainnya.

Hasilnya, bisa disaksikan bersama di lapangan desa. Video menjadi medium efektif bagi warga untuk lebih mengenal desanya dan menyampaikan aspirasi. Warga menyaksikan hasil rekaman video tentang persoalan keseharian untuk didiskusikan. Mulai dari tontonan film inilah, warga diharapkan bisa aktif dan antusias terlibat dalam program pemberantasan kemiskinan.

“Antusias warga dalam program kreatif ini dapat mendorong partisipasi warga dalam mendukung PNPM,” imbuh Ronny.

Lewat film, komunitas belajar para pemuda desa dan ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Belajar Komuni-

tas Kreatif (KBKK) memotret dan merekam keseharian warga dan desanya. Lalu secara kontinyu menyuguhkannya kembali di hadapan mereka. Tentang apa saja. Dari regekan suara bayi di posyandu hingga irigasi desa.

Ya, dari lontaran spontan selama kegiatan pemutaran film inilah warga dusun yang sebelumnya tak pernah berkumpul dan berinteraksi membicarakan masalah bersama menjadi *guyub*. Tak hanya sekadar aktivitas menonton, suara mereka diajag temu warga ini dicatat, ditampung pemerintah desa dan pegiat PNPM. Semua hal itu nantinya akan dimusyawarahkan untuk perbaikan warga.

Program ini terbukti mendorong partisipasi dan menghimpun suara warga miskin dan terpinggirkan. Sebelumnya, kegiatan ini telah berjalan di 29 kecamatan di Suamtera Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah.

“Tujuannya membuka saluran ekspresi sekaligus partisipasi kaum miskin dan marginal. Salah satunya dengan membuat program yang dapat mendorong keterlibatan pemuda lokal,” kata Direktur Yayasan Kelola, Amna S. Kusumo.

Ronny menambahkan, video dapat menjadi pemantik api dialog warga. Tanpa melihat perbedaan sosial di masyarakat. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Di di tengah kegembiraan, dan berbagai ekspresi yang terekam kamera video. Warga tak sadar telah menemukan kunci untuk semakin terbuka dan bebas berbicara di depan umum untuk kepentingan bersama. ■

MEMBANGUN DESA DI UDARA

Selembar karpet merah dan aneka kudapan terhidang di ruang studio PPK FM Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah. Siang itu, warga sudah berkumpul dan bersila dengan gaya lesehan. Beberapa laptop dan mik terpasang siap mengudara.

Studio radio komunitas ini memang selalu ramai dengan kegiatan diskusi. Mereka sepakat untuk menghidupkan ruang milik koperasi desa ini. Warga berkumpul untuk berdiskusi tentang apapun. Mulai rencana pengaspalan jalan hingga persiapan menjelang pemilu. Mereka juga tak sungkan mengundang para pengurus desa. Di ruang itu, warga saling bertukar pikiran.

Keberadaan radio komunitas ini menjadi corong warga. Dan berdampak besar terhadap pembangunan dan kehidupan di wilayah Sragi, Pekalongan. Warga semakin aktif dan cerdas membicarakan pembangunan dan persoalan warganya.

“Dulu sulit menyampaikan aspirasi kalau bukan perangkat desa atau karang taruna. Saya pikir radio komunitas bisa jadi cara mencapai tujuan itu. Apalagi saya suka dengan dunia radio. Makanya, berusaha dapat ijin frekuensi meski dana minim,” ujar Sunarto,

Radio komunitas Sragi menjadi ujung tombak membangun partisipasi warga dalam berbagai pembangunan. Di ruang sederhana, mereka membangun suara agar warganya kritis dan cerdas.

salah satu aktivis radio komunitas ini.

Radio ini menjadi jembatan bagi 16 desa di Kecamatan Sragi. Warga bisa mendengar langsung setiap perbincangan dari ruang studio. Termasuk memberikan pendapat sekaligus hiburan ketika mereka bekerja. Warga dengan mudah mengirimkan pesan pendek atau mengontak langsung ke ruang studio.

Jangan bayangkan studio ini seperti ruang siaran televisi. Ruang kerjanya sederhana; mixer kecil, komputer laptop dan kipas angin untuk mengusir rasa gerah. Di ruang kecil ini, Sunarto dan warga lainnya bekerja dan mengabdikan untuk warganya.

Kegiatan radio komunitas ini semakin kuat sejalan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Sragi. Radio ini menjadi media pemberdayaan. Dimana informasi menjadi kunci untuk mendorong warganya terlibat dalam berbagai program pembangunan. Termasuk mengawasi kegiatan PNPM di lapangan agar transparan dan tepat sasaran.

“Warga aktif melaporkan kegiatan di lapangan. Dan menulis blog,” katanya.

Berbagai ide kreatif lahir dari radio ini. Salahsatunya program “Waroeng Obrol” dimana warga bisa bertatap muka dengan penyiar. Obrolan mereka langsung

terekam dan tersiar secara langsung. Kegiatannya bisa di studio atau alun-alun kecamatan. Waroeng Obrol mendorong dan menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis warga secara langsung.

"Kami masih berproses ke arah itu agar gerak akses ke pemerintah semakin mudah. Tujuannya, untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Misalnya, Pemilu bersih dan diskusi bagaimana menjadi pemilih cerdas untuk mencari sosok pemimpin," katanya.

Radio ini telah bertahan hingga tujuh tahun dan terus melakukan berbagai inovasi. Bahkan, mereka mampu dan lapor ke Unit Kerja Presiden untuk menyuarakan semangat anti korupsi dan pengawasan pembangunan. Termasuk mengajak warganya untuk mendeklarasikan melawan korupsi.

"Warga bisa merasakan manfaat radio ini karena banyak informasi yang disampaikan. Jadi bisa tahu banyak hal. Program mengakomodir kebutuhan warga," kata seorang warga, Rihadi.

PNPM Mandiri mendorong berbagai sektor untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satunya penggunaan radio komunitas. Di berbagai tempat, PNPM Mandiri juga menggandeng Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan organisasi lokal *Combine Resource*

Institute (CRI) untuk mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam setiap proses PNPM Mandiri. Kerjasama dengan kedua lembaga tersebut telah berlangsung sejak 2008 dan kini telah mencakup 15 provinsi, di antaranya, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. menggunakan media seperti seni dan budaya.

Di udara, Sunarto dan warga Sragi terus mendorong pembangunan desa. Mereka siap memasang telinga dan terus mengudara agar kehidupan warganya semakin sejahtera. Di corong mik sederhana, Sunarto siap menyapa warga dengan santai.

"*Selamat siang warga PPK FM Sragi dimana pun berada. Dari Bulak Pelem, di kawasan KUD Sragi, DJ Narto muncul bersama panjenengan semua. Kali ini kita akan mengupas kegiatan PNPM,*" dengan logat Jawa yang kental. ■



"DULU SULIT MENYAMPAIKAN ASPIRASI KALAU BUKAN PERANGKAT DESA ATAU KARANG TARUNA. SAYA PIKIR, RADIO KOMUNITAS BISA JADI CARA MENCAPAI TUJUAN ITU. APALAGI SAYA SUKA DUNIA RADIO MAKANYA BERUSAHA DAPAT IJIN FREKUENSI MESKI DANA MINIM."

Sunarto, Penyiar Radio Komunitas PPK FM, Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah

TANPA PENCURI DI SEBERANG MADURA

Tidak ada layanan perbankan di pulau terpencil di seberang Madura ini. Meski begitu, prinsip-prinsip perbankan yang ketat diterapkan dalam unit usaha simpan-pinjam warga.

Hidup di wilayah pulau terpencil tidaklah mudah. Semua urusan harus melibatkan pulau lain. Mulai urusan administrasi hingga perdagangan, semua tergantung orang kota. Bahkan soal hasil tangkapan ikan pun mesti melibatkan wilayah lain yang lebih ramai.

Ini curahan hati Mutawaji, warga Pulau Gili Iyang, yang terletak di seberang timur daratan Madura. Secara administratif, gugusan pulau ini masuk Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Mencapai pulau ini tidak mudah. Harus berlayar 4,5 jam dari Sumenep. Itu pun saat cuaca bersahabat. Kalau cuaca buruk, tidak ada kapal yang lewat. Meski dekat dengan Jawa dan Bali, pulau ini sangat terpencil. Jangankan perkantoran elit, bank saja tidak hadir di sana.

Kebutuhan terus meningkat. Pinjaman resmi tidak ada. Tentu saja, pilihan jatuh pada rentenir. Mutawaji menceritakan, sudah belasan, bahkan puluhan tahun orang-orang Gili Iyang, yang umumnya bekerja sebagai nelayan miskin terjerat lintah darat. Tak ada pilihan lain.

“Orang butuh modal, pinjam ke orang kaya setempat dengan bunga tinggi sekali. Jika pinjam Rp 1 juta, bunganya Rp 100 ribu per bulan,” katanya. Akibat tingginya bunga yang dikenakan, bukannya berkembang, usaha mereka malah menjadi macet. Orang kampung tak lagi kaya dengan usaha barunya, justru bangkrut terbelit

bunga pinjaman.

Melalui kelompok pengajian Jami'iyah Istighotsah, mereka saling *curhat* sulitnya melawan rentenir. Memang, pengajian tiap Selasa malam ini menjadi ajang *curhat* masalah di lapangan. Mulai sikap agama hingga soal ekonomi. Dari situ, semua tahu kemiskinan terus membelit lantaran rentenir.

Dari hasil komunikasi secara terbuka tersebut, gagasan simpan-pinjam lahir. Pada pertengahan 2007, jemaah membentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Gotong Royong, sebagai wadah simpan-pinjam warga. Semua bergulir seadanya. Kas simpan-pinjam tak banyak. Kerap kekurangan dana untuk menolong warga.

Pada 2010, UEP mendapat suntikan modal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 35 juta. Warga anggota cocok dengan sistem peminjaman yang mudah tanpa agunan.

Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Timur, Anis Yudhawati, membenarkan program simpan-pinjam ala Gili Iyang secara perlahan membantu warga keluar dari lilitan rentenir. Tak lagi meminjam kepada lintah darat.

Sistem simpan-pinjam ini punya keunikan. Siklus masa simpan setahun didasari penanggalan bulan Islam, Hijriyah. Awal buka buku pada Syawal atau Lebaran dan penutupan kas pada 27 Sya'ban, sebelum masuk

Ramadan. Pada saat itu, peminjam wajib membayarkan pinjaman dan uang jasa yang besarnya telah ditentukan.

Karena tak ada bank di pulau itu, pengumpulan dan penyimpanan dana dilakukan secara konvensional, dalam pertemuan seminggu sekali. "Saat ke sana, saya lihat uang ratusan juta itu dipegang langsung, *cash*," kata Anis.

Uang ratusan juta rupiah itu pun disimpan di rumah anggota yang ditunjuk kelompok. Warga kelompok simpan-pinjam ini tak khawatir terhadap pencurian. Mereka yakin tak bakal ada pencuri yang berani masuk. "Orang mau mencuri terus larinya ke mana. *Wong* untuk keluar dari pulau itu hanya ada satu titik dermaga, dan itu harus melewati rumah anggota. Susah juga," ujar Anis menirukan lontaran kepala desa setempat.

Menurut Anis, lingkungan yang agamis dan guyub membuat warga bahu-membahu menjaga uang. Sistem boleh konvensional tapi tetap ketat. Misalnya verifikasi calon peminjam mirip yang diterapkan perbankan. Apakah pinjaman digunakan untuk menggulirkan usaha atau hanya foya-foya. Kalau untuk foya-foya, pinjaman bisa disetop.

Program simpan-pinjam ini berjalan baik, nyaris tanpa masalah. Pernah sekali terjadi kasus penyelewengan. Anis mengatakan salah satu anggota meminjam Rp 6,5 juta, tapi belakangan tak dapat mempertanggungjawabkannya. Sang peminjam akhirnya menjaminkan kapalnya.

"Anggota ini akhirnya dikeluarkan dan semua anggota kelompok borongan *nanggung* duit pinjaman Rp 6,5 juta itu," kata Anis. Lalu, sebagai pembelajaran sosial, kapal yang dijaminakan dihancurkan dan dibakar.

"Ini kemudian jadi pembelajaran. Orang tak berani lagi dan berusaha menjaga komitmen serta nama baik kelompok," ujar Anis. Guna menegakkan kedisiplinan, kelompok itu juga menerapkan sistem yang unik. Nama penunggak pinjaman diumumkan secara terbuka setiap usai salat Jumat. Cara ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya malu dan penunggak segera terlecut melunasi kewajiban.

Uang jasa yang kian berkembang tiap tahun, menyesuaikan jumlah jasa simpanan itu, disisihkan untuk kegiatan sosial, setelah dipotong untuk membayar anggota yang menyimpan kas. Pada masa awal, uang jasa dimanfaatkan untuk mendatangkan kiai dalam sebuah pengajian. Tapi belakangan, uang jasa dimanfaatkan untuk kegiatan fisik, misalnya membangun madrasah, jembatan, hingga masjid. ■



"ORANG MAU MENCURI TERUS LARINYA KE MANA. *WONG* UNTUK KELUAR DARI PULAU ITU HANYA ADA SATU TITIK DERMAGA, DAN ITU HARUS MELEWATI RUMAH ANGGOTA. SUSAH JUGA."

Anis Yudhawati, Fasilitator PNPB Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Timur





V

LABORATORIUM DEMOKRASI AKAR RUMPUT

Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat menjadi roh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Keterlibatan dan suara warga menjadi penentu dalam setiap keputusan di akar rumput. Mulai tahap perencanaan hingga pengawasan. Selain itu, melalui proses demokrasi ini mereka mendorong para pemimpin lokal agar memihak pada kepentingan publik.

“INI ADALAH BONUS
BAGI KITA UNTUK
MEMBANGUN
DEMOKRASI DI TINGKAT
GRASS ROOT. INI
KEKUATAN YANG LUAR
BIASA. KARAKTER INI
JANGAN HILANG.”

**Boediono,
Wakil Presiden Republik Indonesia
(2009-2014)**



Lima tahun telah berlalu, tapi masih terekam jelas dalam ingatan Dumadi Tri Restiyanto bagaimana sebuah perdebatan sengit terjadi dalam perumusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Ketika itu, dia bertugas sebagai pendamping lokal di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Di Desa Langenrejo, 24 perempuan yang hadir dalam Musyawarah Khusus Perempuan tak kunjung mencapai kata sepakat dalam sebuah rapat pada 30 April 2009. Mereka beradu argumen memilih sejumlah usulan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang akan digarap oleh kelompok perempuan. Usulan yang masuk antara lain pembentukan koperasi simpan-pinjam, posyandu, dan pelatihan keterampilan.

“Ada perdebatan sengit. Perbedaan pendapat cukup alot,” kata Dumadi lewat telepon pada 25 Maret 2014. Karena tak tercapai kata sepakat, keputusan pun diambil dengan cara pemungutan suara. Dua belas orang memilih program pelatihan keterampilan, sepuluh memilih posyandu, dan dua lainnya abstain. Pelatihan keterampilan mendapat suara mayoritas dengan alasan para ibu sudah terbiasa mengurus anak-anak, sehingga keberadaan posyandu dirasa belum mendesak.

Meski program sudah terpilih, perdebatan belum usai. Debat berikutnya mengarah pada penentuan

siapa pengurus yang bertanggung jawab melaksanakan program dan bagaimana pelaksanaan hingga pengawasannya.

Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, perdebatan sengit, hingga berujung pada voting atau pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan salah satu nilai yang dikembangkan melalui PNPM. Keterlibatan warga merupakan roh dari program yang dijalankan agar program tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, serta menjadi milik dan tanggung jawab warga untuk merawatnya.

Nilai seperti inilah yang disebut oleh Wakil Presiden Boediono sebagai praktek demokrasi akar rumput. Bahkan, dalam perjalanannya, PNPM mampu membangkitkan komunitas-komunitas kecil dalam proses pengambilan keputusan. “Ini adalah bonus untuk membangun demokrasi di tingkat grass root. Ini kekuatan luar biasa. Karakter ini jangan hilang,” kata pejabat yang rajin menyempatkan diri menengok kegiatan PNPM setiap berkunjung ke daerah ini.

Berkembangnya proses demokrasi akar rumput ini terekam dari data Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri. Sejak program itu dimulai pada 1998 hingga 2012, proses demokrasi ini telah melibatkan masyarakat di lebih dari 43 ribu desa serta 8.446 kelompok swadaya masyarakat di perkotaan. Peserta yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebanyak 74 persen adalah kelompok masyarakat paling miskin.

Keterlibatan semua pihak, terutama warga miskin, merupakan koreksi atas kebijakan masa silam, ketika keputusan ditentukan pemerintah pusat atau pejabat,

sedangkan rakyat hanya diminta turut menyukseskan. Tanpa disadari, kebijakan itu membuat rakyat kehilangan kreativitas, bahkan pusat kerap tak mengerti apa kebutuhan mereka sesungguhnya. Untuk menutupi celah dalam setiap proses pengambilan keputusan, ditunjuk pendamping lokal yang akan memberi masukan kepada warga.

Tentu model demokrasi tak selalu melalui voting. Ketika kata mufakat hampir mustahil dicapai, ada saja kearifan lokal yang menjadi tuah, sehingga semua peserta rapat tak perlu berhitung kekuatan suara. Di Kabupaten Badung, Bali, misalnya, rapat dikawal oleh para tetua. Sosok-sosok yang dihormati ini memastikan semua pihak didengarkan suaranya dan mengajak seluruh peserta berpikir jernih sehingga tercapai kesepakatan untuk memilih program prioritas.

Tapi tak semua proses pengambilan keputusan berjalan mulus. Di negeri yang masih berbenah dalam praktek demokrasi ini, berbagai masalah dan eksekusi dari proses bermufakat itu sudah pasti muncul. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, misalnya, Musyawarah Antar Desa yang digelar di Kecamatan Secangkang diwarnai *walk-out* sejumlah perwakilan desa karena tersinggung oleh seorang kepala desa ketika berdebat. Pertemuan pun terpaksa dijadwal ulang.

Di beberapa daerah, proses penggalan masalah desa sulit dilakukan karena warga tak terbiasa menyuarakan pendapatnya, dan peran pendamping lokal kurang maksimal. Dalam kondisi ini, Musyawarah Desa hanya menjadi forum pengumuman, bukan perdebatan untuk menentukan program. Persoalan lainnya adalah ketimpangan

dalam perdebatan. Ketika banyak orang belum terbiasa menyampaikan pendapat, hal itu dimanfaatkan oleh peserta yang pandai bicara.

Toh, berbagai masalah justru diyakini akan menguatkan tradisi demokrasi PNPB Mandiri. Bahkan, menurut sosiolog Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman, musyawarah dan perdebatan membuat warga terbiasa mengambil keputusan berdasarkan kesadaran akan beragamnya kepentingan dan pertimbangan rasional dalam kegiatan pembangunan. "Ini menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin lokal dan aktivis sosial yang memihak kepentingan orang banyak," katanya seperti ditulis Kompas, 16 September 2011.

Dampak positif lainnya, cara-cara demokratis dalam proses pengambilan keputusan ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2013. Poinnya, amanatkan pembangunan sumber daya manusia desa yang bisa mengurus dirinya sendiri. "PNPM membuat warga desa jauh lebih siap karena sudah terlibat dan berpartisipasi dalam proses penganggaran program di desa masing-masing," ujar Budiman Sudjatmiko, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa. ■



“PNPM MEMBUAT WARGA DESA JAUH LEBIH SIAP KARENA SUDAH TERLIBAT DAN BERPARTISIPASI DALAM PROSES PENGANGGARAN PROGRAM DI DESA MASING-MASING.”

Budiman Sudjatmiko,
Wakil Ketua Pansus RUU Desa
(2009-2014)



“MUSYAWARAH DAN PERDEBATAN MENJADI AJANG UNTUK MELAHIRKAN PEMIMPIN LOKAL DAN AKTIVIS SOSIAL YANG MEMIHKAN KEPENTINGAN ORANG BANYAK.”

Meuthia Ganie-Rochman,
Sosiolog Universitas Indonesia

MENJAGA OBOR GOTONG ROYONG

Gotong royong menjadi kebiasaan masyarakat Tengger sejak lama.

Warga bahu membahu dalam berbagai kegiatan apapun. Mulai mempersiapkan upacara adat hingga membersihkan debu pasca letusan gunung api. Tak salah jika semangat turun tangan ini menjadi contoh bagi pemberdayaan tingkat nasional.

Seorang warga membawa plastik sepanjang 10 meter. Berjalan menuruni lembah dengan kondisi jalan setapak yang terjal dan curam. Sesekali melewati pohon bambu dan semak belukar. Di ujung sungai yang kering kerontang sudah menunggu beberapa warga lainnya. Mereka bahu membahu memasang pipa air di atas ketinggian 30 meter. Dengan peralatan sederhana; tangga bambu, setas tali, paku dan palu.

Sepanjang tahun, akses air bersih memang menjadi masalah utama di Gunung Bromo. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal dekat kawasan puncak. Musim kemarau membuat air tak mengalir hingga ke dalam rumah. Bertahun-tahun warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Persoalan semakin rumit ketika musibah letusan Gunung Bromo. Lahar dingin menyapu saluran pipa air.

“Untung mata airnya masih ada. Tapi lokasinya sulit,” kata Sunoyo, warga Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo. PIPANISASI air sepanjang lima kilometer ini bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 71 juta. Warga juga urun rembug memberikan sumbangan dan tenaga untuk pemasangan pipa air. Warga berharap agar pipanisasi air ini segera menyelesaikan krisis air selama tiga tahun terakhir ini.

Di atas tebing itu, warga memasang pipa satu persatu. Modal tangga bambu menjadi penyangga utamanya. Pekerjaan pipanisasi air seperti ini beresiko tinggi. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Apalagi warga bekerja dengan apa adanya.

“Beresiko kalau terjatuh. Tapi perjuangan ini untuk masyarakat,” katanya.

Tak ada air memang tak ada kehidupan. Krisis air di Bromo berdampak pada ekonomi warga. Mereka kesulitan untuk menyiram kebunnya. Penginapan tempat wisatawan juga mengandalkan pasokan air dari daerah lainnya. Tak heran jika truk-truk pengangkut air hilir mudik sepanjang hari.

“Sekarang pipanya sudah terpasang. Warga sudah menikmati aliran airnya,” kata Mahfud Effendi, pendamping PNPM Mandiri. Menurutnya, pengerjaan pipanisasi air ini tergolong cepat. Warga tak pernah mengeluh sekalipun pekerjaannya tergolong berat.

Masyarakat Tengger memang terbiasa hidup bergotong royong. Mulai urusan bercocok tanam, memperbaiki rumah, berbagai persiapan upacara adat hingga urusan pembangunan. Warga selalu kompak dan mendahulukan urusan kepentingan bersama. Semangat turun tangan ini memang masih terjaga dan melekat dalam masyarakat Tengger. Mereka mengenalnya dengan istilah gugur gunung.

“Tak perlu perintah dari pemerintah. Warga sudah saling membantu,” kata salah satu pemimpin adat Tengger, Supoyo. Warga Tengger adalah pewaris Majapahit di Jawa. Mereka bertahan di Bromo sejak abad ke-13. Sejak lama, menurutnya, budaya gotong royong ini menjadi perekat dan penggerak kehidupan sosial masyarakat Tengger. Tak salah jika berbagai program pembangunan, baik dari pemerintah maupun inisiatif dari warga selalu berjalan lancar. Prinsip ini dikenal dalam catur guru bak-



◀ **WARGA** Tengger (berpakaian adat) bersama fasilitator PNPB.



PETANI bergotong royong memanen kentang. Selain untuk keperluan rumah tangga, air bersih yang dialirkan dari mata air juga untuk keperluan pertanian.



SEORANG ibu menggendong air bersih yang baru saja diambilnya untuk keperluan masak dan mencuci.

ti, dimana masyarakat dan pemimpin patuh pada prinsip kerukunan dan nilai guyub.

“Kebiasaan ini tak pernah saya temukan di daerah lain,” kata Buradi, koordinator PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Probolinggo.

Masyarakat Tengger telah menikmati berbagai hasil PNPM Mandiri Perdesaan. Mulai dari pembangunan sekolah, pipanisasi air, pembangunan puskesmas hingga dana bantuan simpan pinjam.

“Pengembalian simpan pinjam juga sangat lancar hampir 98 persen,” kata Mahfud Effendi. Warga memanfaatkan dana ini untuk keperluan usaha dan pertanian. Masyarakat Tengger memang terkenal sebagai petani sayuran. Setiap bulannya mereka menghasilkan panen kentang, lombok hingga kol dan dipasarkan hingga ke Surabaya, Bali, Jakarta bahkan Kalimantan.

Pada tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan gotong royong terbaik tingkat nasional kepada masyarakat Tengger. Pemerintah Indonesia kagum dengan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini dan tidak pupus oleh zaman.

Di atas tebing itu, semangat gotong royong membuahkan hasil. Air yang menetes dari tebing mulai mengalir. Sunoyo dan ratusan warga lainnya mulai menikmati kenangannya air segar. Mereka tak lagi kesulitan menyirami perkebunan sayurannya. Apalagi mesti mengeluarkan uang banyak demi setetes air. ■



SEORANG pria mengambil air bersih di tangki penampungan air untuk menyiram ladang miliknya.



DALAM KAWALAN TUAH SAKATO

Musyawarah untuk mufakat menjadi kunci sukses program. Berbalut tradisi demokrasi lokal.

“DI SINI, MUSYAWARAH HENDAKNYA BERAKHIR DENGAN MUFAKAT. JADI, KALAU HARI INI MASIH ADA YANG TIDAK SEPAKAT, PERTEMUAN DILANJUTKAN,”

Ary Chandra Kurnia,
koordinasi fasilitator
Provinsi Sumatera Barat



Tuah Sakato. Nama lambang ini sangat populer di Sumatera Barat. Berbentuk perisai persegi lima, lambang ini juga memiliki nilai dan makna luhur bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan lambang ini mencerminkan budaya dan kebiasaan yang dipegang teguh oleh masyarakat Minang, sebuah tradisi yang berbeda jauh dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Makna slogan atau lambang Tuah Sakato adalah mengutamakan permufakatan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah.

Di provinsi atau daerah lain, demokrasi diterjemahkan dalam bentuk musyawarah yang kerap berujung pada voting [suara terbanyak] dalam proses pengambilan keputusan. Tradisi Tuah Sakato berbeda karena tidak mengenal voting dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan bersama.

Demikian halnya dalam pelaksanaan [PNPM] Mandiri. Di setiap daerah, para fasilitator menekankan betapa pentingnya

sebuah program direncanakan, dikerjakan, dan dirawat bersama melalui mekanisme demokrasi yang sudah biasa dijalankan. Tapi, di Sumatera Barat, para fasilitator justru kerap mengurut dada dan dituntut punya kesabaran lebih untuk mengikuti konsep musyawarah

yang sudah menjadi tradisi itu.

“Di sini, musyawarah hendaknya berakhir dengan mufakat. Jadi, kalau hari ini masih ada yang tidak sepakat, pertemuan dilanjutkan,” ujar Ary Chandra Kurnia, koordinator PNPM di Provinsi Sumatera Barat. Sudah menjadi tradisi, keputusan rapat harus bulat, sehingga berapa lama pun akan ditempuh untuk terus mencapai mufakat itu. Padahal PNPM Mandiri Perdesaan juga dibatasi waktu karena, antara lain, berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Ary mengatakan kondisi ini membuat para fasilitator ditantang untuk inovatif sehingga kearifan lokal berupa musyawarah mufakat tetap berlangsung tapi program bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Teman-teman fasilitator harus pintar-pintar menyalahi hal ini. Mereka juga dituntut memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya lokal,” katanya. Para fasilitator juga terus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ada batasan waktu yang harus dipenuhi.

Tapi musyawarah yang berpanjangan-panjang untuk mencapai mufakat itu justru menjadi faktor penting suksesnya PNPM Mandiri di Sumatera Barat. Ketika ada masalah atau konflik yang menyebabkan tersendatnya program, penyelesaiannya tak perlu menunggu lama. Konflik akan diselesaikan sendiri oleh masyarakat karena sedari awal mereka sudah bermufakat untuk menuntaskan proyek. “Karena keputusan tidak diambil secara instan,” ujar Ary.

Demokrasi berbasis musyawarah untuk mufakat sudah menjadi bagian dari sejarah panjang budaya masyarakat Minang. Pada masa lalu, sistem pemerintahan daerah ini terdiri atas banyak nagari yang otonom. Musyawarah antar nagari merupakan cara yang wajib digunakan untuk mengambil keputusan yang biasa digelar di balai adat. Di sini ada peribahasa populer: “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”. Tak aneh jika istilah Tuah Sakato, kesepakatan yang harus dipatuhi semua orang, begitu melekat erat pada warga Minangkabau.

Kini, dalam kegiatan PNPM Mandiri, Tuah Sakato menjadi kekuatan untuk mengawal eksekusi proyek. Apalagi musyawarah dihadiri oleh unsur pimpinan masyarakat, yaitu para penghulu atau *ninik mamak*, alim ulama (pemuka agama), dan cerdik pandai (pemikir). Mereka, yang disebut Tiga Tungku Sejarangan, inilah yang akan membantu menyelesaikan masalah. Mereka merupakan sosok yang dihormati masyarakat karena kebijaksanaan, usia, dan hubungan kekeluargaan yang masih dekat.

Bahkan, jika diperlukan, tokoh masyarakat ini ikut terjun menyelesaikan masalah. Misalnya ketika program air bersih tak bisa berjalan karena seorang warga menolak lahannya dilalui pipa. Para pemimpin yang punya hubungan keluarga atau suku dengan si penolak itu akan melakukan pendekatan dan membujuk supaya ia merelakan tanah itu demi kepentingan bersama. Bagi para pemimpin, langkah tersebut sekaligus untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan masyarakat

karena apa gunanya menjadi pemimpin bila kaumnya sendiri tak mematuhi.

Kalaupun masalah belum terselesaikan juga, rapat adat akan digelar untuk mencari jalan keluar. Dalam sejumlah kasus, misalnya terjadi penyimpangan dana, pelaku akan dihadapkan ke sidang adat dan diberi hukuman.

Demikian kentalnya peran adat dalam pelaksanaan proyek-proyek itu menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah diterima menjadi milik masyarakat Sumatera Barat. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program PNPM Mandiri juga sangat kuat di provinsi yang terletak di pantai barat Sumatera ini.

Kuatnya dukungan itu diakui oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tokoh Minang yang pernah menjadi Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat. Dia menuturkan pengalamannya ketika menjabat bupati dan daerahnya menjadi salah satu *pilot project* PNPM Mandiri. “Pada saat itu, kami membangun saluran air bersih dengan melibatkan masyarakat. Mereka merelakan tanahnya dilewati saluran air dan digunakan untuk membangun bak-bak penampungan.”

Menurut Gamawan, cerita itu sangat berbeda ketika program atau proyek yang sama diputuskan dan menjadi kebijakan pemerintah. Keputusan tersebut sulit dilaksanakan karena semua warga yang dilalui saluran air meminta ganti rugi lahan. “Mereka juga tidak mau merawat hasil proyek karena dianggap milik pemerintah, bukan milik masyarakat,” kata Gamawan. ■

Mereka berada di garda depan, melewati segala hambatan dan tantangan.

PARA PENYEBAR VIRUS OPTIMISME

Posturnya hanya setinggi 125 sentimeter, dengan bobot 27 kilogram. Tapi suaranya nyaring terdengar di tiap pertemuan warga. Sesekali ia merasa perlu berdiri di atas meja untuk merebut perhatian semua orang. Mereka yang mendengar awalnya hanya tertarik melihat sosok Amat Rahmat yang beda, bahkan menganggapnya lucu. Tapi, semakin lama Amat bicara, warga kian menaruh hormat dan salut atas gaya serta muatan pidatonya yang menumbuhkan optimisme masyarakat desa.

Amat Rahmat, 43 tahun, adalah Asisten Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelumnya, lebih dari lima tahun, Dia malang melintang sebagai fasilitator kecamatan di Tasikmalaya, Bogor, hingga Majalengka. Amat selalu dikenang oleh warga kecamatan tempatnya pernah bertugas. Dia berhasil mengorganisasi dan mendorong warga untuk menyuarakan keinginan mereka dalam musyawarah PNPM Mandiri ditingkat desa dan kecamatan.

“Awalnya saya pernah dikira anak-anak, ke mana-mana dibonceng sepeda motor,” kata insinyur pertanian itu. Namun dia tak ambil pusing terhadap komentar warga karena ada misi penting yang dijalankannya. “Buat saya, sesuai dengan ajaran agama saya, yang penting adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain,” ujarnya. Berkat semangat dan prestasi yang ditunjukkannya, Amat kerap menuai pujian warga, hingga ada yang menjulukinya si Cabe Rawit.

Tentu keberhasilan Amat tak hanya mampu mendorong masyarakat untuk bermusyawarah dan menyatukan suara, tapi juga mendampingi warga untuk melaksanakan program hingga tuntas. Namun musyawarah warga sangat penting karena menjadi titik krusial suksesnya PNPM Mandiri Perkotaan. “Kesepakatan warga, apalagi yang dicapai melalui mufakat, akan menjamin proyek-proyek yang digarap bisa selesai dan tepat sasaran bagi kebutuhan warga.”

Mengumpulkan warga, lalu mencapai kata sepakat untuk sebuah program, tentu bukan perkara gampang. Apalagi selama ini masyarakat cenderung apatis terhadap proyek pembangunan yang dilancarkan pemerintah. Amat bisa menghimpun warga yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dalam melaksanakan sebuah proyek sesuai dengan kebutuhan mereka.

Persoalannya, dalam pembelajaran berdemokrasi, prosesnya tak selalu berjalan lancar. Perbedaan pendapat yang tajam kerap terjadi. Namun di sinilah posisi Amat menjadi penting dalam memainkan peran untuk memastikan musyawarah berlangsung damai dan menghasilkan mufakat. Aneka pengalaman unik pun ia rasakan. Amat masih ingat ketika dikejar-kejar seorang tentara. “Dia mengusulkan program yang tak relevan dengan kebutuhan warga sehingga ditolak,” ujarnya.

Kerja keras untuk mendorong masyarakat agar

bersuara juga dilakukan oleh Juniangsih, sukarelawan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dia menghadapi masyarakat yang menganggap diri mereka miskin dan tak bisa berbuat apa-apa. "Masyarakat terbiasa disuapi oleh pemerintah, sehingga selalu ingin diberi. Padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan," ujar perempuan yang saban hari berjualan lotek itu seperti dikutip *Pikiran Rakyat*.

Juniangsih pun mulai membangkitkan kesadaran warga dari warungnya sendiri. Kepada setiap pembeli loteknya, dia menyampaikan program kegiatan PNPM. Dia juga mengatakan pentingnya keterlibatan warga dalam menentukan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Dari pemahaman di warung, dia lalu menggelar pertemuan dengan sejumlah warga yang menghasilkan sejumlah usulan. Usulan-usulan inilah yang kemudian diperjuangkan untuk memperoleh dana dari PNPM Mandiri Perkotaan.

Nun jauh di pedalaman Papua, perjuangan lebih keras dan penuh dedikasi ditunjukkan oleh para fasilitator. Bayangkan, mereka harus berjalan kaki berhari-hari dari satu kampung menuju kampung lain. Bentang alam pegunungan yang memisahkan tiap kampung, sulitnya akses transportasi dan komunikasi, serta masyarakat yang hidup dalam keterbelakangan membuat fasilitator harus menguras otak dan tenaga untuk mengumpulkan warga dan menyampaikan kabar ihwal PNPM Mandiri

serta perlunya musyawarah.

Yusuf Pasorong, fasilitator di Distrik Doufu, Kabupaten Puncak Jaya, pernah disambut oleh todongan anak panah ketika hendak masuk sebuah kampung. "Saya pikir itu akhir hidup saya," ujar pria berkulit cerah dan berambut lurus itu. Lepas dari maut, Yusuf harus berhadapan dengan kenyataan ketika warga mengajukan usulan-usulan yang tak relevan untuk PNPM Mandiri, misalnya membeli senapan untuk hadiah mas kawin atau membeli babi untuk pesta kampung.

Amat, Juniangsih, dan Yusuf tentu hanya contoh fasilitator yang berperan besar dalam mendorong proses demokratisasi dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM. Di seluruh Indonesia, ada ribuan sarjana yang berperan dan berusaha keras seperti mereka.

Dengan disahkannya Undang-Undang Desa pada Desember 2013, peran fasilitator menjadi semakin strategis dalam mendampingi masyarakat desa. Sebab, setiap desa akan mendapatkan geyuran dana besar, miliaran rupiah, setiap tahun dari pemerintah pusat untuk membangun desa mereka. ■



“KESEPAKATAN WARGA, APALAGI YANG DICAPAI MELALUI MUFAKAT, AKAN MENJAMIN PROYEK-PROYEK YANG DIGARAP BISA SELESAI DAN TEPAT SASARAN BAGI KEBUTUHAN WARGA.”

**Amat Rahmat,
Asisten Fasilitator PNPM
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat**

Hidup dipagari pegunungan dan dibalut keterbelakangan membuat warga kampung luput dari perhatian pemerintah. PNPM membuat mereka berani bicara.

SUARA DARI PELOSOK

“SELAMA INI PEMBANGUNAN DILAKUKAN DENGAN PEKERJAAN PROYEK-PROYEK YANG SUDAH DITETAPKAN PEMERINTAH, DAN ITU TIDAK MENYENTUH PERMASALAHAN YANG ADA.”

Frans Kristantus, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Papua



Siang yang cerah di pengujung Februari 2009. Ratusan warga Kampung Dolinggame, Kecamatan Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, menuruni jalan setapak dari pinggang-pinggang bukit di Pegunungan Tengah, Papua. Di bawah sengatan matahari dan embusan angin sejuk, mereka berkumpul di lapangan pertemuan kampung untuk membahas pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 150 juta.

Terletak di pelosok Pegunungan Puncak Jaya, Dolinggame merupakan salah satu kantong permukiman suku Dani yang sulit dicapai dari seluruh penjuru angin. Tak cuma jauh dari pusat kabupaten, yakni Kota Mulia, untuk menjangkau Kecamatan Ilu saja warga harus menuruni lembah dan mendaki bukit berjam-jam.

Mulia, adalah kota terbesar di Puncak Jaya. Dari Jayapura, kota kabupaten itu harus dicapai dengan perjalanan udara satu jam lewat Wamena dengan pesawat perintis. Di Wamena, tak ada penerbangan reguler menuju Puncak

Jaya. “Pesawat kecil yang berkapasitas 12 penumpang, hanya akan terbang ke Puncak Jaya jika semua kursi terisi atau disewa,” kata Kiki, petugas Bandar Udara Mulia.

Sulitnya akses menuju Puncak Jaya menjadi kambing hitam segala permasalahan di kawasan ini: keterbelakangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan daftara masalah ini terus bertambah. Bersama ratusan warga yang menyusuri lembah dan bukit, Dahina, seorang ibu yang menggendong bayi perempuan sambil menuntun anak lelaki, adalah potret warga pedalaman di Pegunungan Tengah, Papua. Mereka jauh dari sentuhan modernitas serta awalnya awam akan arti pembangunan, musyawarah untuk mufakat, apalagi istilah demokrasi.

Hari itu mereka meniti jalan terjal untuk menjalani proses demokrasi. Berkat kerja keras para fasilitator yang melakukan pendekatan kepada pemuka suku dan perangkat desa, warga kampung bisa dikumpulkan, termasuk para perempuan yang selama ini tak didengarkan suaranya. Mereka duduk rapi, sebagian tak mengenakan penutup dada, dan kebanyakan laki-laki hanya mengenakan koteka. Di hadapan mereka, seorang fasilitator berbicara lantang membuka pertemuan lewat corong pengeras suara.

Semua warga kampung tampak begitu takzim mendengarkan uraian fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. Suasana terasa begitu hening saat fasilitator

PEGUNUNGAN PAPUA

berpidato. Ketika warga diminta berbicara dan menyampaikan pendapat, suasana berubah menjadi riuh. Secara bergantian, warga melemparkan usulan. Seorang perempuan setengah baya yang mengaku bekerja bercocok tanam mengusulkan pembuatan jalan dan pengadaan transportasi publik sehingga ia bisa membawa hasil bumi. "Supaya bisa kami jual di kota [Ilu]," ujarnya.

Tak mau kalah, seorang pria berkoteka mengangkat tangan dan menguraikan kepedihan hatinya karena anak-anaknya tak mengenyam pendidikan. Ia tidak ingin keturunannya, juga anak-anak lain di kampung, terus hidup dalam kebodohan dan keterbelakangan. Pria itu mengusulkan agar dana PNPM digunakan untuk membangun sekolah dasar dan menyediakan pakaian yang memadai bagi anak-anak bersekolah.

Meski banyak usulan hanya bisa ditampung, pertemuan warga kampung telah menularkan virus demokrasi kepada warga di pelosok yang selama ini nyaris tak terdengar suaranya. Dengan mendengarkan suara warga, kegiatan pembangunan yang dipilih akan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi daerah. "Selama ini pembangunan dilakukan dengan pekerjaan proyek-proyek yang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu tidak menyentuh permasalahan yang ada," kata Frans Kristantus, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Papua.

Namun, melalui PNPM Mandiri, musyawarah menjadi bermakna sangat strategis bagi warga sehingga mereka merasa memiliki program yang dipilih, dikerjakan, dirawat, dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama. "Semua menjadi tanggung jawab bersama," kata Syamsuddin Daerlan, salah seorang fasilitator di Puncak Jaya.

Lewat musyawarah tersebut, warga Kampung Dolinggame siang itu akhirnya memilih usulan pengembangan ternak kelinci. Usulan ini dipilih karena masyarakat akhirnya sepakat bahwa peningkatan gizi anak dan keluarga harus diprioritaskan, dan berdasarkan verifikasi, ternak kelinci paling cocok untuk dilakukan di desa tersebut. "Ternak kelinci lebih bermanfaat untuk menambah gizi," kata Yoson Kogoya, fasilitator PNPM Mandiri Kecamatan Ilu. Di sini, harga seekor kelinci berkisar Rp 300 ribu. Selama ini sumber protein lainnya harus didatangkan dari luar kota dengan ongkos mahal karena diangkut pesawat. "Dengan beternak Kelinci, semoga keluarga saya bisa makan daging," ujar Dahina, sambil mengusap kedua anaknya.

Melalui musyawarah serupa, masyarakat berhasil membangun jalan setapak yang menghubungkan kampung dengan distrik, termasuk sebuah jembatan gantung yang membuka isolasi kampung. ■

Politisi dan pejabat mengklaim
perannya dalam sukses PNPM.
Pengurus dan fasilitator pun tergoda berpolitik.

JUALAN POLITISI LOKAL DAN NASIONAL

Entah karena kehabisan bahan berpidato, salah seorang calon anggota DPR RI yang berorasi di depan warga Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, berapi-api mengklaim diri sebagai pemrakarsa sejumlah program yang digulirkan pemerintah. Program-program yang dimaksud antara lain Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, hingga PNPM.

Kontan saja aksi klaim itu mendapat kecaman berbagai pihak. “Cara-cara seperti ini tidak hanya pembodohan kepada rakyat,” ujar aktivis lokal Yudilfan Habib seperti dikutip *Padang Ekspres*, pertengahan Maret 2014. Media yang sama juga memuat kekesalan Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo. “Kegiatan-kegiatan tersebut murni dari pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Masyarakat harus mengetahui ini agar tidak dibohongi oleh seseorang,” ujar Alis.

Lain lagi di Pekan Baru. Maret 2011 lalu, media *online* ternama melaporkan acara penyaluran dana PNPM menjadi ajang kampanye calon walikota dan pasangannya. Panitia acara, lewat pengeras suara mengklaim bahwa masyarakat mendukung calon tersebut. Warga yang hadir dalam acara geram dengan

polah panitia. “Masyarakat jangan dibohongi,” kata Imron, warga Tampan, Pekanbaru.

Kesuksesan PNPM menjadi jualan para politisi baik di tingkat lokal maupun nasional. Program masif yang menyentuh puluhan ribu desa dengan total anggaran per tahun belasan triliun itu memang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. “Memang ada saja upaya mempolitisir, tapi bukan soal mudah mengawasi hal seperti ini karena luasnya jangkauan PNPM,” kata Enurlela Hasanah mantan konsultan nasional PNPM.

Disamping pemanfaatan PNPM oleh para politisi dan pejabat tertentu, para fasilitator PNPM pun tergoda untuk ambil kesempatan dengan menjadi calon anggota legislatif. Sebagai fasilitator, terjun ke masyarakat untuk menggali permasalahan memang menjadi makanan sehari-hari. Kegiatan “blusukan” yang dilakukan selama bertahun-tahun, membuat mereka dikenal dan dekat dengan warga. Jadi, tak perlu banyak modal untuk menjadi anggota legislatif.

Salah satu pelaku PNPM yang menjadi caleg adalah Nurahman Joko Wiryanu dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Provinsi Jawa Timur. Pria asal Malang ini menjadi caleg DPR-RI di daerah pemilihan Jawa Timur V dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Namun Joko mengaku menjadi anggota dewan bukan demi materi, melainkan mempermudah langkahnya dalam memperjuangkan model pembangunan partisipatif yang selama ini dipraktikkan PNPM.

Joko mengungkapkan untuk menjamin keberlangsungan model perencanaan pembangunan partisipatif, tak ada pilihan lain baginya kecuali melalui perjuangan politik. “Apalagi dengan adanya Undang-Undang Desa 2013 yang isinya syarat dengan dunia pemberdayaan. Maka untuk memperkokoh pelaksanaan UU tersebut perlu dilakukan dengan berpolitik,” katanya. Ia pun memilih mundur dari PNPM setelah namanya dipastikan masuk dalam daftar caleg tetap.

Selain Joko, ada 1.500-an pelaku dan fasilitator PNPM banting setir menjadi caleg. Banyaknya “caleg PNPM” ini membuat Kemenko Kesra, sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan PNPM mengeluarkan edaran larangan berpolitik praktis dengan memanfaatkan aset atau nama PNPM. Pada Oktober 2013. Dampaknya, sekitar 1.300 caleg mengundurkan diri dari PNPM. “Jika *nyaleg* atau menjadi juru kampanye partai, yang bersangkutan harus mundur,” kata Menko Kesra Agung Laksono kepada *Antara*, 10 Januari 2014.

Menurut Agung, surat edaran itu dikeluarkan untuk

mencegah terjadinya konflik kepentingan, dan campur aduk antara kegiatan PNPM yang menggunakan uang negara dan kampanye yang seharusnya dibiayai partai atau uang sendiri. Larangan ini bukanlah bentuk pengekan hak politik, karena sudah diatur dalam undang-undang pemilihan umum, bahwa masyarakat yang bekerja dengan menggunakan uang APBN atau APBD dilarang berpolitik praktis.

Soal pengurus atau fasilitator yang menjadi caleg, Enurlaela mengatakan hal itu justru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperkuat posisi tawar mereka terhadap anggota dewan. “Warga yang sudah dekat dengan caleg itu bisa menuntut komitmen apa yang akan dilakukan apabila si caleg terpilih,” ujarnya. Dengan demikian, diharapkan akan terpilih anggota dewan yang memiliki komitmen kuat kepada publik karena latar belakang kedekatannya dengan warga. ■



“APALAGI DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG DESA 2013 YANG ISINYA SYARAT DENGAN DUNIA PEMBERDAYAAN. MAKA UNTUK MEMPERKOKOH PELAKSANAAN UU TERSEBUT PERLU DILAKUKAN DENGAN BERPOLITIK.”

Nurahman Joko Wiryanu, mantan Koordinator PNPM Mandiri Provinsi Jawa Timur

Tsunami dan konflik politik selama 30 tahun merontokkan Aceh. Di tangan perempuan Aceh, mereka bangkit dari keterpurukan.

MENGHIMPUN SUARA PEREMPUAN

Illiza Saaduddin Djamal tak akan lupa kejadian tsunami yang berlangsung pada minggu pagi di tahun 2004. Gelombang besar dari arah laut tiba-tiba datang dan menghancurkan pesisir Aceh. Dalam sekejap, musibah alam ini telah memakan korban 100 jiwa lebih. Dan menghancurkan berbagai infrastruktur kota dan rumah warga.

Tsunami menjadi titik balik bagi masyarakat Aceh. Sekaligus mendorong upaya perdamaian dan penghentian konflik di bumi Rencong. Selama hampir tiga tahun lebih, warga Aceh bersama pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga internasional turun tangan membangun dan menata Aceh. Mulai pembangunan fisik, rehabilitasi hingga pemulihan trauma akibat tsunami dan konflik politik.

Perempuan Aceh ini, melewati hari demi hari perjuangan dari masa pemulihan ini. Ia tahu peristiwa tsu-

nami dan konflik yang berkepanjangan meninggalkan duka yang mendalam. Korban pertama dari dua kejadian besar ini adalah perempuan dan anak-anak.

“Tapi kita punya modal sejarah. Perempuan bisa menjadi pemimpin,” kata Illiza Saaduddin Djamal yang kini menjabat sebagai Walikota Banda Aceh ini.

Masyarakat Aceh tak bisa larut dalam kesedihan. Mereka harus bangkit dari keterpurukan. Hampir 20 ribu proyek dari ratusan organisasi lokal, pemerintah dan internasional ikut andil dalam pembangunan Aceh secara massif. Perempuan, menurutnya, dinilai memiliki posisi yang strategis dalam berbagai pembangunan di Aceh.

“Perempuan memiliki sensitifitas dibandingkan dengan lelaki. Misalnya, perempuan sadar dan tahu bahwa kamar mandi, tak boleh berdekatan dengan ruang tamu,” kata Illiza katanya. Kesadaran dan kebutuhan ini, menurutnya menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional saat melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban tsunami.

Termasuk menghidupkan kembali keberadaan inong

“TAPI KITA PUNYA MODAL SEJARAH. PEREMPUAN BISA MENJADI PEMIMPIN,”

**Illiza Saaduddin Djamal,
Wakil Walikota Banda Aceh
(2007-2014)**



balee. Sebuah wadah tempat dimana perempuan Aceh berkumpul dan berekspresi. Di tempat ini, perempuan membangun kesadaran sekaligus bisa menyampaikan suara mengenai kebutuhan dan rencana dalam berbagai program pembangunan. Inong balee bagian tradisi panjang bagi budaya Aceh.

Pemerintahan kota Banda Aceh mengalokasikan dana sebesar Rp 150 juta bagi setiap gampong melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk kemudian dipakai PNPM Mandiri. Perempuan menjadi perhatian utama di program ini untuk ikut mengurangi kemiskinan di perkotaan.

"Sejak awal, perempuan menjadi prioritas dan komitmen saya. Perempuan tahu dan sadar dengan kebutuhannya," katanya.

Ia mengaku tak mudah membangun Aceh pasca tsunami dan perdamaian. Banjirnya bantuan dan peredaran uang membuat tingkat inflasi Aceh meroket. Kebutuhan barang melonjak tinggi. Tiga tahun pertama sejak 2004, Badan Pusat Statistik Banda Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi di Aceh mencapai 14 persen. Dengan tingkat kemiskinan penduduk mencapai 6,61 persen. Namun, angka kemiskinan kembali ke angka 9 persen pada tahun 2013.

"Kemiskinan menjadi persoalan. Baik di kota maupun di desa," katanya.

Sejak 2007 ia merintis wadah Pusat Pengembangan Perempuan atau WDC. Wadah ini dibentuk untuk mendorong nilai kesetaraan dan partisipasi perempuan

dalam pembangunan. Lewat organisasi ini, berbagai program peningkatan kapasitas perempuan lahir. Mulai bidang ekonomi, politik, hukum hingga akses informasi. Prinsip WDC ini lahir untuk mendorong keadilan gender, demokrasi, transparansi, solidaritas dan non partisan.

"Puluhan tahun tidak ada kepercayaan terhadap perempuan. Apalagi duduk di eksekutif," katanya. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk membangun peranan perempuan. Ia merasa sudah waktunya, perempuan mengambil peran aktif dalam pembangunan.

Strategi ini ternyata berhasil. Perempuan di Banda Aceh terlibat aktif dalam berbagai inong balee di setiap wilayah. Mereka menghimpun berbagai suara dan terlibat dalam berbagai proses pembangunan. Keterlibatan mereka membuat pembangunan lebih tepat sasaran.

"Perempuan lebih detail ketimbang laki-laki. Mereka membuat perencanaan jauh lebih matang," katanya.

Musyawarah Rencana Aksi Perempuan atau Musrena Banda Aceh menjadi model partisipasi perempuan dalam pembangunan. Gerakan ini telah mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia maupun internasional. Ia berharap gerakan ini bisa diadopsi oleh daerah lainnya di Indonesia. Mengingat dampak nyata dari keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

"Maka, melibatkan perempuan ternyata menjadi kekuatan. Dari hal kecil ternyata berdampak besar," kata Illiza Saaduddin Djamil. ■





VI

ORANG TERPINGGIRKAN BICARA

Ketika mereka yang terpinggirkan tidak mendapatkan akses dalam pembangunan, negara wajib berada di belakang mereka. PNPM Mandiri menuntun mimpi mereka.

“PROGRAM INI UNTUK
MELENGKAPI PNPM MANDIRI
DENGAN MEMANFAATKAN
KEUNGGULAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT
YANG BERBASIS DI TINGKAT
AKAR RUMPUT.”

**Agung Laksono, Menko Kesejahteraan Rakyat
(2009-2014)**



Sudah lebih dari 70 tahun Sutilah hidup di negeri ini. Namun perempuan dari Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, itu sering dianggap tak pernah ada. Pelbagai bantuan dan program pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), lewat begitu saja. Tak pernah sekali pun mampir ke rumah perempuan tua yang hidup miskin itu.

Mantan bintang panggung kelompok ketoprak Mudo Widodo itu dianggap tak “berhak” menerima bantuan tersebut karena satu hal: dia dianggap “berbau” Partai Komunis Indonesia (PKI). Berpuluh tahun silam, Sutilah pernah tampil bersama grup kesenian Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Di Gunung Kidul, tak sedikit orang yang bernasib seperti Sutilah. Dalam bukunya, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Arbi Sanit menulis PKI menang besar dalam Pemilihan Umum 1955 di Gunung Kidul. Partai komunis itu berhasil meraup 101.351 suara di daerah pegunungan kapur yang gersang tersebut. Dari total 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantara Tingkat II Gunung Kidul, PKI menguasai lebih dari separuhnya, yakni 18 kursi.

Pada 1965, Hadi Siswanto, kini 77 tahun, bekerja sebagai guru di Gunung Kidul. Tapi peristiwa pada 30 September 1965 menjungkirbalikkan hidup Hadi dan keluarganya. Dia dicurigai sebagai anggota PKI dan dijebloskan ke Kamp Pertani Wonosari selama dua tahun tanpa pernah diadili. Keluarganya telantar.

“Setelah saya dipecat dengan tidak hormat sebagai guru, harta benda terpaksa dijual untuk menghidupi anak dan istri,” kata Hadi. Dari seorang guru, Hadi terpaksa bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi keluarga. Kini, penghasilannya sebulan tak lebih dari satu juta rupiah.

Sutilah, Hadi, dan ribuan orang lainnya adalah korban dari silang sengketa politik berpuluh tahun lalu. Mereka sudah membayar sangat mahal atas satu kejadian kala itu, entah itu kesalahan mereka entah bukan. Namun, setelah mereka keluar dari kamp atau ruang tahanan, hukuman masih berlanjut. Mereka kehilangan akses untuk mendapatkan semua haknya sebagai warga negara Indonesia.

Para mantan tahanan kasus politik, mantan tahanan kasus kriminal, pekerja seks, suku-suku minoritas yang miskin, korban konflik, korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok minoritas agama, dan anak-anak jalanan adalah warga negara di negeri ini yang terlupakan. Bahkan tidak jarang mereka dianggap tak pernah ada.

Sebagian dari mereka tak memiliki kartu identitas, sehingga tak pernah tercatat dalam statistik pemerintah selalu luput dari sentuhan program pemerintah. Hak-hak mereka, bahkan hak paling dasar pun, seperti hak untuk hidup dengan aman dan mendapatkan pekerjaan, sering tak bisa mereka nikmati.

“Setiap saya berjalan melewati desa, orang-orang di

jalan akan berbisik, 'Tuh, ada *jablay*.' Saya seperti tidak dianggap sebagai manusia," Ani, mantan pekerja seks di Jakarta Timur, mengenang bagaimana masyarakat memperlakukannya. *Jablay* adalah sebutan dengan konotasi negatif, bernada merendahkan, bagi perempuan.

Pada 23 Maret 2011, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli. "Program ini untuk melengkapi PNPM Mandiri dengan memanfaatkan keunggulan lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di tingkat akar rumput," kata Menko Kesra Agung Laksono saat meluncurkan program tersebut.

Sujana Royat, Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan sasaran PNPM Peduli adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terlupakan itu.

"Jadi PNPM Peduli ini untuk melawan ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu nyata, baik oleh sistem maupun ketidakadilan oleh macam-macam sebab," kata Sujana. "Ketika mereka yang terpinggirkan tidak mendapatkan akses dalam pembangunan, negara wajib berada di belakang mereka. Menuntun mimpi mereka."

PNPM Mandiri secara umum juga sudah mensyaratkan keterlibatan kelompok marjinal dalam setiap prosesnya. Namun, harus diakui bahwa keterlibatan kelompok ini masih belum maksimal karena berbagai faktor, termasuk keterbukaan masyarakat umum dan kepercayaan diri kelompok ini.

Menurut Sujana, yang penting adalah mengembalikan kepercayaan diri dan martabat mereka. Sebab, kesulitan hidup membuat mereka berpikir negatif. "Saya ini sudah sampah kok, ngapain dibantu," kata Sujana.

Cara-cara lama dengan pendekatan proyek dan *top-down* ditinggalkan. PNPM Peduli menggunakan pendekatan PNPM Mandiri secara umum, dengan difasilitasi lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan lebih luas untuk menentukan apa yang mereka kehendaki, apa yang terbaik menurut mereka sendiri. Untuk mengikis korupsi, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program akan diberi tahu pertama kali berapa jumlah anggaran yang akan mereka nikmati. "Jadi masyarakat lebih dulu tahu daripada sang bupati," ujar Sujana.

Selama lebih dari satu setengah tahun berjalan, ribuan orang dari kelompok terpinggirkan itu telah menikmati manfaat PNPM Peduli. Hingga September 2013, ada sekitar 14 ribu lebih orang yang menerima manfaat dari PNPM Peduli. Di antaranya 8 ribu perempuan, 5 ribu laki-laki dan 456 transgender.

Ani dan teman-temannya mantan pekerja seks yang tergabung dalam Yayasan Bandung Wangi telah memiliki pekerjaan baru. Untuk bertahan hidup, dengan modal pinjaman dari PNPM Peduli kepada kelompok Bandung Wangi, mereka membuka kios kecil untuk berjualan pulsa telepon. Walaupun penghasilan tak sebesar dulu, mereka senang karena bisa hidup dengan tenang dan aman. ■



"JADI PNPM PEDULI INI UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN. KARENA KETIDAKADILAN ITU NYATA, BAIK OLEH SISTEM MAUPUN KETIDAKADILAN OLEH MACAM-MACAM SEBAB."

Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

KOLOK TAK LAGI TERPINGGIRKAN

Kaum marjinal menjadi perhatian bagi PNPM Mandiri. Mulai dari korban 65 hingga warga tuli bisu di Desa Bengkala, Bali. Keberadaan mereka kini berbalik menjadi motor masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Wayan Gentar Ika, 65 tahun baru saja pulang dari kebun. Ia duduk di balai desa mendengar percakapan. Sesekali ia bicara menggunakan bahasa isyarat. Tangannya cekatan menyampaikan sesuatu. Sementara itu, I Made Arpana, Kepala Desa Bengkala menjawab pertanyaan Gentar dengan bahasa isyarat yang sama. Sambil sesekali bergurau.

Gentar adalah salah satu warga yang menderita tuli bisu sejak lahir. Di Desa Bengkala, Buleleng, Bali tercatat masih ada 43 jiwa yang menderita tuli bisu. Mulai dari anak-anak hingga orang tua seperti Gentar. Penderita tuli bisu di Bengkala dikenal dengan istilah kolok dan termasuk yang terbesar di dunia. Keberadaan mereka menjadi perhatian sejumlah akademisi Indonesia maupun mancanegara. Mereka melacak kenapa warga di desa ini menderita tuli bisu.

“Namun hasil penelitiannya belum menjawab mengapa mereka mengalami tuli bisu,” kata Kepala Desa Bengkala, I Made Arpana. Menurutnya, sulit melacak jejak sejarah penderita kolok ini. Bisa jadi orang tuanya normal. Namun, terjadi pada salah satu anaknya atau kebalikannya.

I Made Arpana lahir dan besar di desa ini. Sejak lama, ia hidup berdampingan dengan warga kolok. Dari pergaulan sosial, warga belajar bahasa isyarat kolok secara alami.

“Bahasa isyarat kolok itu bahasa ibu, artinya bahasa Bali. Hanya digunakan di desa ini saja,” katanya. Warga tidak pernah memandang sebelah mata terhadap kolok. Sejak lama mereka bisa hidup berdampingan. Bahkan, bisa hidup saling membantu, baik di ladang atau mengurus hewan ternak.

“Pekerjaan saya merawat saluran air dan mencari rumput untuk hewan ternak,” kata Wayan Gentar Ika dengan bahasa isyarat. Gentar menjadi sosok andalan bagi warga untuk mengurus kampung. Mulai kesehariannya mengurus saluran air yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan hingga berbagai upacara adat.

I Made Arpana mendorong agar warga kolok bisa terlibat dalam pembangunan desa. Termasuk meningkatkan martabatnya. Sosok seperti Gentar dan warga kolok lainnya menjadi perhatian utama di Desa Bengkala ini.

Saat ini tengah diupayakan pendokumentasian

▶ **KOLOK** Gentar (tengah) bersama I Made Wisnu Giri (kiri) pengajar bahasa kolok dan Made Widiana, kader desa PNPM Bengkulu.

bahasa kolok agar tak punah dan mudah dipelajari oleh warga. Buku ini menjadi rujukan utama bagi siapapun yang hendak belajar bahasa isyarat lokal ini. Uniknya, pendokumentasian ini bukan dari kalangan akademisi. Melainkan dari inisiatif warga lokalnya yang tiap hari mengajar bahasa kolok untuk anak-anak sekolah dasar.

“Ada tantangan tersendiri mengajar anak-anak kolok. Kita harus melayani mereka dan sabar. Tapi mereka anak-anak yang pintar,” kata I Made Wisnu Giri, pengajar bahasa kolok di sekolah dasar. Saat ini, anak-anak kolok sudah bisa membaca dan menulis. Bahkan mereka bisa menggunakan telepon genggam untuk mengirimkan pesan pendek.

“Warga kolok selalu hadir dalam pertemuan warga. Mereka senang bisa terlibat dalam berbagai kegiatan,” kata Made Widiana, kader desa PNPM Bengkulu. Tak pelak, keberadaan Gentar menjadi aset bagi warga Bengkulu. Meski tuli bisu, ia satu-satunya orang yang mengetahui jalur pipa air bersih di desa itu. “Pipanya ada di bawah tanah. Kalau air di rumah ini rusak, berarti kita harus memeriksa pipa ini,” kata Gentar dengan bahasa isyarat. Dengan lihai dan cekatan, dia menunjukkan rumah dan jalur pipanya.





SETIAP rumah di Desa Bengkala kini sudah dapat menerima aliran air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.

Melalui PNPM Mandiri, Gentar dan sejumlah warga Kolok dilibatkan dalam proses pembangunan di Desa Bengkala. Mereka tidak hanya diberikan dana stimulan untuk membangun sarana – prasarana yang paling dibutuhkan, namun juga pelatihan seperti pengelolaan dana dan kegiatan lainnya. Berbagai pelatihan ini membuat Gentar semakin terampil sebagai pengelola dan pemelihara sarana air.

Keterlibatan warga Kolok di Desa Bengkala dalam perencanaan dan pemeliharaan fasilitas desa menjadi bukti keterlibatan kelompok terpinggirkan justru membawa nilai lebih bagi sebuah desa untuk lebih maju, tidak saja dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sisi akademis, dimana desa ini sudah akan menerbitkan buku bahasa isyarat/Kolok secara mandiri. ■



PROSES belajar mengajar di sekolah dasar negeri di desa Bengkala selain menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa isyarat tradisional kolok.

▶
GENTAR berdiskusi dengan warga perihal pemeliharaan penampungan air bersih yang mengalir di rumah mereka.





ANGGOTA Yayasan Tanpa Batas.



Seorang perempuan menenun sehelai kain di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beberapa warga lainnya duduk berteduh di bawah pohon. Siang itu, sinar matahari terasa menyengat di Desa Noelbaki, lokasi kamp pengungsian warga Timor Timur. Mereka adalah warga yang ikut mengungsi saat referendum 1999 ke Indonesia.

Tiga belas tahun mereka masih bertahan di lokasi pengungsian ini. Tinggal dibalik rumah yang terbuat dari bilah bambu beralaskan tanah. Saat ini, mereka bekerja sebagai buruh tani atau tukang ojek di terminal.

Warga eks pengungsi Timor Timur ini tersebar di enam kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data Bappenas, jumlah pengungsi ini mencapai 24.524 kepala keluarga. Sebanyak 4 ribu lebih kepala keluarga masih tinggal di kamp pengungsian.

“Mereka tinggal di tempat yang tak layak huni. Pendidikan juga terbatas. Dan kini, ada 8 kasus masalah HIV/AIDS,” kata Deni Sailana dari Yayasan Tanpa Batas. Sejak 2003 yayasan ini mengkampanyekan kesehatan reproduksi dan advokasi masalah HIV/AIDS di NTT.

Posisi NTT persis berada di jantung antara Papua, Australia, Timor Leste, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Posisi strategis ini menyebabkan NTT rawan terjadinya kasus penyebaran HIV/AIDS dan masalah kesehatan reproduksi.

PERANG MELAWAN HIV/AIDS DI PULAU TIMOR

Menurutnya, kasus penyebaran HIV/AIDS dan masalah kesehatan reproduksi di NTT semakin meroket dari tahun ke tahun. Menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sejak tahun 1997 hingga 2013 tercatat 2745 kasus HIV/AIDS. Dengan kasus kematian sebanyak 535 jiwa. Kebanyakan usia produktif antara 21 hingga 45 tahun.

Mereka yang terkena HIV/AIDS kebanyakan ibu rumah tangga sebanyak 581 jiwa. Sisanya karyawan swasta sebanyak 580, petani sebanyak 380 dan perempuan seks komersil sebanyak 130 orang.

“Masalah utamanya adalah kemiskinan, pendidikan dan budaya,” kata Deni Sailana. Di Timor, menurutnya dikenal dengan istilah sunat *sifon* atau sunat tradisional. Praktik sunat tradisional ini dilakukan oleh dukun kampung. Dan menyarankan agar si pasien berhubungan badan dengan tiga orang perempuan. “Ada pembenaran dan mereka percaya akan menyembuhkan luka,” katanya. Praktik dan mitos ini ternyata memperparah penyebaran kasus HIV/AIDS dan gangguan kesehatan reproduksi. Korban paling banyak adalah perempuan.



Yayasan Tanpa Batas dengan dukungan PNPM Peduli bergerak agar masyarakat sadar bahwa praktik seperti ini tidak benar. Salahsatunya merangkul para dukun sunat ini mengajarkan praktik sunat sehat. Mulai dari peralatan yang higienis hingga menghentikan perilaku mitos keperkasaan. Selain itu, bersama relawan dan staf juga terus mengkampanyekan soal isu ini ke tempat lokalisasi dan wilayah pesisir.

"Kami latih manajemen keluarga agar keuangan bisa dikontrol, risiko-risiko kesehatan hingga edukasi di gereja," katanya. Tak mudah melakukan kampanye kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS di NTT. Warga masih sungkan berbicara kesehatan reproduksi. Selain itu, akses dari satu kampung ke kampung lainnya berjauhan.

Yayasan Tanpa Batas menjadi mitra PNPM Peduli. Program ini menjangkau kaum marginal yang selama ini tersisihkan dalam pembangunan. Program ini telah menjangkau 15 ribu lebih di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

"Kita terus bikin edukasi agar masyarakat sadar. Sebelumnya, warga tidak mengetahui kondisi dirinya sendiri. Sekarang mulai ada perubahan perilaku. Mereka mau periksa kesehatan reproduksinya," kata Deni Sailana. ■



MASYARAKAT yang tinggal di lokasi pengungsian korban konflik Timor Timur di Desa Noelbaki, Kupang Tengah menerima penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual.

ANAK-ANAK muda menerima penyuluhan perihal bahaya penyakit menular seksual.



IBU-IBU yang tinggal di lokasi pengungsian korban konflik Timor Timur di Desa Noelbaki, Kupang Tengah menerima penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual.



MENCERDASKAN ANAK RIMBA

Melalui program PNPM Peduli, anak-anak Suku Anak Dalam diajak belajar membaca dan menulis.

Mereka turun-temurun hidup di hutan di Jambi dan perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat. Mereka, yang dikenal dengan sebutan Orang Rimba, sebenarnya lebih suka tinggal di dalam hutan, dengan cara hidup mereka yang sederhana. Sebab, tanah hutan bagi Orang Rimba atau suku Anak Dalam merupakan rumah yang sudah mereka kenal sejak lahir. Seperti kata seorang suku Anak Dalam tak jauh dari Sungai Makekal di Jambi.

*Hatop belangit, lantoi begebun.
Iyoi, kami adat Rimba.*

[Langit menjadi atap, bumi menjadi lantainya. Itulah adat di Rimba.]

*Kalu balok rimba kami, maju kiamat.
Kalu pemerintah tetap kami de dusun, bunuh adat nenek puyong kami.*

Bunuh hidup kami samo lah, bunuh hidup kami.
[Jika hutan kami dibabat, mereka menghancurkan dunia kami. Jika pemerintah menempatkan kami di desa, itu sama saja membunuh adat kami. Sama saja membunuh kami.]

*Adat kini sodah bebeda.
Jedi, kami deri nenek puyong dulu duduk de rimba.
Sampo putoi patah leher kami, piado endok ikut hidup de dusun.*

[Adat kita sudah berbeda. Sejak dulu nenek moyang kami sudah hidup di hutan. Karena itu, sampai patah leher kami, kami tak ingin hidup di dusun.]

Tapi sekarang rumah mereka semakin terpojok oleh perambahan hutan dan perkebunan. Di luar hutan mereka, Orang Rimba sering disebut sebagai orang Kubu, sebuah sebutan yang sebenarnya dianggap sebagai penghinaan bagi Orang Rimba. Pengertian Kubu yang berarti Bodoh, jelas tidak enak didengar, karena ada kesan merendahkan, oleh karena itu mereka enggan disebut sebagai Orang Kubu, mereka lebih suka menyebut dirinya sebagai "Anak Dalam", "Orang Rimbo" atau "Orang Kelam", sedangkan orang desa di sekitarnya disebut "Orang Terang".

"Kami ingin menetap di sini. Tapi kalau babi makin susah ditemukan, dengan apa lagi kami harus hidup?" kata Peneto, seorang kepala kelompok atau rombongan di Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Kalaupun ada babi dan binatang buruan lain, butuh waktu berburu lebih lama. "Kami harus berburu lintas kabupaten untuk mendapatkan seekor babi atau kijang. Itu pun harus buang waktu 3-7 hari," kata Syargawi, kepala rombongan di Kabupaten Sarolangun.

Paham bahwa hidup di hutan tak lagi gampang dan perlu beradaptasi dengan cara hidup baru, Peneto dan anggota rombongnya membuka diri. Ia tak keberatan anak-anak dalam rombongnya belajar membaca dan menulis lewat program PNPM Peduli. "Supaya mereka

tidak bodoh seperti kami yang sudah tua ini, dan supaya kami tidak gampang dibohongi terus.”

Sulit menghitung berapa jumlah Orang Rimba di Jambi dan Sumatera Barat. Sebab, mereka hidup menyebar dalam hutan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan lembaga swadaya masyarakat Warsi pada 2010, populasi suku Anak Dalam sebanyak 2.196 jiwa. Mereka tersebar dalam 17 rombongan atau kelompok di Bukit Dua Belas, Bukit Tiga Belas, dan wilayah sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera, yang meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi serta Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagian Orang Rimba ini telah meninggalkan hutan dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Bahkan sebagian anak suku Anak Dalam belajar di sekolah dasar pemukiman transmigrasi. “Awalnya mereka tak mau ke sekolah karena takut, tapi terus saya dorong. Dulu hampir setiap hari saya antar-jemput mereka ke sekolah, tapi sekarang sudah bisa pergi sendiri. Mereka senang sekolah,” kata Syargawi.

Pada awal tahun ajaran 2013/2014, lewat program PNPM Peduli bermitra dengan komunitas SSS Pundi, 20 Orang Rimba dari beberapa rombongan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo masuk ke sekolah formal. SSS Pundi akan memberikan beasiswa berupa seragam dan semua kebutuhan sekolah mereka hingga lulus sekolah dasar. Masih ada sekitar 30 anak suku

Anak Dalam yang bakal menyusul mereka pada tahun ajaran 2014/2015.

Fasilitator PNPM Peduli di Kabupaten Dharmasraya, Pandong Spendra, mengatakan pemerintah setempat juga telah mengupayakan pengesahan status kependudukan bagi warga suku Anak Dalam, berupa surat keterangan tanda komunitas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga telah memberikan lahan garapan seluas 100 hektare kepada beberapa rombongan suku Anak Dalam.

Perlahan, Orang Rimba mulai mengenal cara hidup modern, termasuk cara bercocok tanam dan memelihara ternak, juga hidup yang lebih sehat. Biasanya mereka mandi, mencuci, dan memasak menggunakan air rawa atau sungai. Lewat fasilitator SSS Pundi, Orang Rimba mulai mengenal sumur dan fasilitas MCK—mandi, cuci, kakus. Dengan antusias, mereka membantu pembangunan fasilitas MCK, juga mempelajari bagaimana memakai dan membuat sumur.

Selain memberikan beasiswa untuk bersekolah formal, PNPM Peduli melalui SSS Pundi juga memberikan pelatihan baca tulis untuk anak-anak Rimba secara informal. ■



“AWALNYA MEREKA TAK MAU KE SEKOLAH KARENA TAKUT, TAPI TERUS SAYA DORONG. DULU HAMPIR SETIAP HARI SAYA ANTAR-JEMPUT MEREKA KE SEKOLAH, TAPI SEKARANG SUDAH BISA PERGI SENDIRI. MEREKA SENANG SEKOLAH,”

Syargawi, Kepala rombongan di kabupaten Sarolangun

Lebih dari 40 tahun, mereka terpinggirkan. Perasaan terkucil dan minder sekian lama mereka rasakan. Namun semangat memperbaiki kehidupan mampu mengalahkan perasaan itu.

MENGUBUR LUKA LAMA

“**A**da ratusan orang yang datang malam itu. Ada Wanra, anggota ABRI, polisi, dan sejumlah orang mengepung rumah saya. Mereka menuding-nuding saya sebagai pelarian,” Margiyo mengenang peristiwa lebih dari 48 tahun silam. Malam itu, 11 Oktober 1965, Margiyo dituduh dari rumahnya di Dusun Tanggulangin, Desa Genjahan, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Orang-orang itu menuduh Margiyo punya hubungan karib dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hampir dua pekan sebelumnya, di Jakarta, sejumlah jenderal Angkatan Darat diculik. PKI dianggap menjadi dalang di balik layar. Suara hujatan dan caci maki itu, tak luntur dari

benak Margiyo sekalipun sudah hampir setengah abad lewat. Orang-orang itu berdatangan dengan sepeda motor, ada pula yang mengendarai mobil.

Margiyo tak paham benar mengapa dia disangkut pautkan dengan PKI. Dia menduga kejadian malam itu ada kaitannya dengan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Politik Djurnalistik Indone-

sia. “Mungkin pemilik perguruan tinggi itu ada kaitannya dengan politik. Saya tidak tahu,” kata Margiyo. Tanpa sempat membawa apapun, dia digelandang ke kantor polisi Ponjong. “Saya menduga malam itu pasti akan dibunuh. Karena ketika itu, kalau ada yang dituduh seperti saya pasti tidak pernah kembali.”

Dari tahanan di kantor polisi Ponjong, Margiyo dipindahkan ke tahanan di Wonosari, ibukota Gunung Kidul. Di sana, ada ribuan tahanan yang diduga tersangkut PKI. Dengan rupa-rupa cara, petugas memaksa Margiyo mengakui sebagai anggota PKI dan menyimpan sejumlah dokumen terlarang.

“Tapi saya tak terlibat atau melakukan semua itu. Daripada mengakui lebih baik saya mati,” kata Margiyo. Selama lima tahun, dia menjadi tahanan politik, berpindah dari satu tahanan ke tahanan lain di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keluar dari tahanan, walaupun tak ada pengadilan yang membuktikan kesalahannya, Margiyo menerima ‘hukuman’ lain dari lingkungannya.

Di Gunung Kidul, tak sedikit orang-orang yang bernasib seperti Margiyo. Margiyo dan para mantan tahanan politik itu terus terpinggirkan, didiskriminasi, dan tak pernah sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai warga negara. “Banyak yang di-PKI-kan padahal dulu hanya sekolah dan nonton pertunjukan Lekra [Lembaga Kebudayaan Rakyat],” kata Zaenuri Ikhsan, penasehat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya

“SETELAH KELUAR DARI TAHANAN, SAYA BERTEKAD MENJADI TELADAN, UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA SAYA ORANG BAIK-BAIK.”

Margiyo, Mantan Tahanan Politik



Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Gunung Kidul.

Dalam bukunya, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Arbi Sanit menulis PKI menang besar dalam Pemilihan Umum 1955 di Gunung Kidul. Partai komunis itu berhasil meraup 101.351 suara di daerah pegunungan kapur yang gersang tersebut. Dari total 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantara Tingkat II Gunung Kidul, PKI menguasai lebih dari separuhnya, yakni 18 kursi.

Bermitra dengan Lakpesdam Nahdlatul Ulama Gunung Kidul, lewat PNPM Peduli, pemerintah 'menyentuh' para mantan tahanan politik dan keluarganya. Lakpesdam NU memberdayakan para mantan tahanan politik dan keluarganya dengan rupa-rupa program peningkatan pendapatan.

Ada 150 orang yang terlibat dalam tiga program aktivitas yakni, menjahit, pembuatan pupuk organik dan pembuatan keripik singkong. Mereka terbagi menjadi lima kelompok yakni Kelompok Perempuan Mawar Indah Kepek Wonosari 30 orang, Kelompok Sido Maju Genjahan Ponjong 30 orang, Kelompok Nggowo Berkah Pringombo Rongkop 21 orang, Kelompok Menur Genjahan Ponjong 25 orang dan Kelompok Sumber Rejeki Bohol Rongkop 44 orang.

Menurut Ikhsan, semula tak gampang mengajak mereka aktif dalam kelompok tersebut. Perasaan terkucil dan minder yang sudah sekian tahun mereka

rasakan tak seketika mencair. Namun semangat untuk memperbaiki kehidupan, mengalahkan perasaan itu.

Walaupun yang diperoleh belum seberapa besar, tapi hasilnya sangat positif. Mereka tak lagi rendah diri. Masyarakat maupun pemerintah setempat juga menerima mereka dengan tangan terbuka. Margiyo, misalnya, bersama-sama para mantan tahanan politik di kelompok Sido Maju Ponjong, semakin terampil mengolah pupuk organik. "Setelah keluar dari tahanan, saya bertekad menjadi teladan, untuk membuktikan bahwa saya orang baik-baik," kata Margiyo.

Di ruang tamu seluas 6 meter x 6 meter, Triwinarni dan beberapa temannya tampak antusias mengerjakan pesanan baju seragam sekolah. Mereka adalah anggota Kelompok Mawar Indah di Kepek, Wonosari. "Kemarin ada pesanan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dewi Pratama Gunung Kidul. Tapi, karena baru belajar, ya, hanya bisa rampung separuh dari 40 pesanan baju," kata Tri, beberapa waktu lalu.

Untuk setiap baju yang dia jahit, Tri menerima upah Rp 5 ribu. Ia mendapatkan Rp 30.000 setelah menyelesaikan enam baju selama tiga minggu.

"Mungkin hasilnya kecil, tetapi kebahagiaan lahir justru saat ada pihak yang percaya menjahitkan baju kepada kami. Dulu kepercayaan ini sulit kami dapatkan. Membentuk kelompok seperti ini saja kami tidak berani karena takut dituduh komunis baru," kata anak eks tahanan politik ini. ■

"MUNGKIN HASILNYA KECIL, TETAPI KEBAHAGIAAN LAHIR JUSTRU SAAT ADA PIHAK YANG PERCAYA MENJAHITKAN BAJU KEPADA KAMI. DULU KEPERCAYAAN INI SULIT KAMI DAPATKAN. MEMBENTUK KELOMPOK SEPERTI INI SAJA KAMI TIDAK BERANI KARENA TAKUT DITUDUH KOMUNIS BARU,"

Triwinarni, anak eks tahanan politik

Dari balik jeruji penjara, puluhan anak diberi pelatihan keterampilan. Tujuannya, agar mereka bisa kembali ke bangku sekolah atau mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari bui.

*Mungkin tak mungkin
Cepat atau lambat
Kami pasti pulang*

*Sanak yang tinggal
Kawanku yang tinggal
Janganlah bersedih*

*Kami lagi terbuang
Rindu jelas rindu
Dengan kamu di desa*

Lewat sepenggal lirik lagu *Jangan Bersedih* itulah barangkali anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, merintih, sekaligus menegaskan janji mereka: suatu hari pasti pulang.

Walaupun kini hidup di balik jeruji penjara, mereka masih kelewat muda untuk menyerah.

Mereka dipenjarakan karena rupa-rupa kesalahan dan menjalani vonis hukuman dari 1 sampai 8 tahun penjara. Mulai kasus pencurian hingga pembunuhan. "Saya mau jadi dokter, Pak," ujar Ik, 14 tahun, salah satu penghuni Lapas Curup. Dengan semringah, dia menjawab pertanyaan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Remaja ini belum sebulan menghuni Lapas Curup karena kasus pencabulan.

Kompleks Lapas Curup sebenarnya kurang ideal sebagai penjara anak-anak. Yang jadi soal, pusat rehabilitasi terdekat lokasinya kelewat jauh, sehingga

MENYALAKAN

terpaksa mereka menghuni Lapas Curup. Walaupun mereka menghuni blok terpisah dari narapidana dewasa, masih ada celah untuk menerobos ke penjara dewasa.

Jalan hidup anak-anak ini masih panjang. Menurut laporan awal Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)-Provinsi Bengkulu, sebagian anak-anak ini sebenarnya masih menyimpan harapan untuk kembali ke bangku sekolah. Sedangkan mereka yang sudah beranjak dewasa berharap bisa memperoleh pekerjaan setelah keluar dari bui.

Namun mereka ragu akibat cap yang melekat sebagai "alumni" lembaga pemasyarakatan. Apakah teman, tetangga, kerabat, dan masyarakat bisa menerima mereka dengan tangan terbuka tanpa diskriminasi? Namun, lewat PNPM Peduli, yang bekerja sama dengan PKBI Bengkulu, Kementerian Hukum dan HAM mempersiapkan remaja-remaja yang terpinggirkan ini untuk kembali ke masyarakat.

Selain memberikan bekal sejumlah keterampilan kepada anak-anak ini, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, mengatakan, tujuan utama program pembinaan di penjara remaja ini adalah menanamkan dan membangkitkan kepercayaan diri.

"Meyakinkan mereka supaya tetap memelihara mimpi dan memegang teguh cita-citanya," kata Sujana. Jangan sampai, ujar Sujana, penjara membuat mereka merasa terbuang dan merontokkan semangat mengejar cita-cita. Selain mendapatkan konseling untuk menjaga mental anak-anak ini, Direktur PKBI Bengkulu, Harmudya,

LILIN DARI BALIK PENJARA

mengatakan, mereka memperoleh bekal keterampilan sesuai dengan minat, seperti bermain musik, fotografi, dan keterampilan menggunakan komputer.

Selain di Lapas Curup, program serupa diuji coba di lembaga pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Program pembinaan narapidana remaja di Lapas Curup ini akan menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan lain. "Sambil kita perbaiki jika masih ada kekurangan, saya ingin kerja sama semacam ini direplikasi di lapas lain di Indonesia," ujar Denny kala itu.

Selama satu setengah tahun program di Lapas Curup berjalan, Harmudya mengakui masih sulit mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam hal perubahan perilaku. Apalagi sebagian anak-anak yang bermasalah hukum ini hanya "singgah" di Lapas Curup selama tiga atau empat bulan.

Kalaupun ada perubahan positif, menurut Harmudya, anak-anak itu menjadi lebih terbuka dan percaya diri berhadapan dengan orang. Mereka tak canggung lagi menyampaikan pikirannya kepada petugas.

Pekerjaan rumah untuk program pembinaan remaja-remaja dalam lembaga pemasyarakatan ini memang masih lumayan banyak. Kondisi di lapangan memang masih jauh dari ideal. "Lapas untuk anak masih menjadi satu dengan lapas umum," kata Harmudya. Interaksi dengan narapidana dewasa sangat sulit dihindari. Karena Lapas Curup merupakan lapas umum, petugas jaga pun belum terbiasa untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak bermasalah ini.

Fasilitas lapas anak juga masih sangat terbatas.

Lapangan kecil memang ada untuk aktivitas. Tapi lapas tersebut belum memiliki ruangan khusus untuk konseling pribadi atau aktivitas lain, sehingga sulit bagi anak-anak ini untuk berbagi cerita pribadi dengan petugas konseling.

Selain terbatasnya fasilitas, kapasitas penjara untuk remaja belum memadai. Belasan, bahkan puluhan, anak harus tinggal berjejal di sel-sel yang seharusnya hanya dihuni maksimum empat narapidana. Gubernur Bengkulu Junaidi Ham-syah sebenarnya sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM membangun lapas baru. Tanah juga sudah tersedia di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Namun pembangunan lapas baru di Bengkulu, termasuk lapas khusus anak-anak dan remaja, masih terhambat alokasi anggaran negara. ■

*Kalau Yang Kuasa izinkan kami pulang
Siapa yang tak terima
Jangan bersedih
Kawan, jangan bersedih*



“SAMBIL KITA PERBAIKI JIKA MASIH ADA KEKURANGAN, SAYA INGIN KERJA SAMA SEMACAM INI DIREPLIKASI DI LAPAS LAIN DI INDONESIA,”

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014)



PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd)
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN TABUKAN TENGAH

REKAPITULASI DANA BLM TA. 2007 S/D TA. 2012

NO	NAMA KAMPUNG	TAHUN 2007				JLH DANA	SPP & NON SPP			TAHUN 2008			BLM PEMULIHAN			TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012				
		JENIS	Dimensi				JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)	Unit	JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)	Unit	JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)	Unit	JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)	Unit	JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)	Unit
			JENIS	Panjang (m)	Lebar (m)																					
1	BOWONGKALI	SPP/Dasawisma Mawar I	628.00	1.50	15,473,685.00	SPP/Dasawisma Mawar III			4,005																	
		Jalan Setapak Dusun I			90,946,556.00	Air Bersih																				
		SPP/Mahentungang	479.00	1.50	21,061,632.00	Air Bersih				1,038.00																
2	KULUR II	Jalan Setapak Dusun IV			57,987,283.00	SPP/Angrek																				
3	KULUR I				13,894,737.00	Dasawisma I																				
4	BIRA																									
		SPP/Krisan																								
5	KUMA																									
6	KUMA I																									
		SPP/Nasareth																								
7	BUNGALAWANG																									
		SPP/Exmatus																								
8	PELELANGENG																									
		SPP/Senglemaung																								
8	MIULU																									
		Air Bersih Lind III																								
		SPP/Zaitoun Jaya																								
		Air Bersih Lind I																								



VII

DI TITIK NOL KORUPSI

Dengan tingkat penyimpangan yang rendah, di bawah 0,5 persen, PNPM Mandiri telah menjadi contoh yang baik dalam program pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan cara membuka akses terhadap informasi seluas mungkin dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengawasi penggunaan dana PNPM Mandiri.

“BANYAK KASUS YANG TERBONGKAR ATAS LAPORAN MASYARAKAT DAN BANYAK JUGA YANG TIDAK JADI KORUPSI KARENA DIKONTROL PENUH OLEH MASYARAKAT.”

Bambang Widjoyanto, Wakil Ketua KPK (2011-2015)



Terletak di Klaten, Jawa Tengah, Bayat merupakan sebuah kecamatan yang cukup populer pada 2013. Kecamatan ini mendapat sorotan luas dari berbagai media lokal dan nasional terkait dengan penyelenggaraan PNPM Mandiri. Sayangnya, bukan berita positif yang mengemuka melainkan sorotan negatif yang meluas.

Bayat dikenal sebagai kecamatan dengan nilai penyimpangan paling besar, diduga sekitar Rp 3,3 miliar. Gara-gara penyelewengan ini, sejumlah pihak turun tangan guna menginvestigasi kasus tersebut. Tak hanya tim dari Pemda Klaten, tim dari pusat juga terjun mengusut penyimpangan tersebut. Mereka melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendali PNPM Mandiri Kemendagri dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil investigasi diketahui bahwa penyimpangan dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bayat. Atas temuan tersebut, pelakunya diberhentikan, pihak kecamatan juga diberi sanksi. Mereka juga diwajibkan mengembalikan aset dan diselewengkan yang diproses secara hukum. Jika tidak ada penyelesaian, dana PNPM Mandiri untuk Kecamatan Bayat dibekukan sampai waktu tidak tentu.

Sebenarnya, penyimpangan dana bukan hanya terjadi di Kecamatan Bayat. Namun, menurut catatan Pokja Pengendali PNPM Mandiri, penyelewengan terjadi di berbagai kecamatan di 37 kabupaten dan kota. Kebetulan Bayat merupakan kecamatan dengan penyimpangan terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Ini tidak bisa ditoleransi. Ini menjadi tugas suci, jihad bersama. Kami minta dukungan masyarakat dan KPK untuk mengawasi,” kata Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat dalam paparannya kepada media massa di Klaten, pada 9 Oktober 2013. “Modus operandi macam-macam, misalnya pembentukan kelompok fiktif, membuat proyek, dan membuat laporan keuangan fiktif. Padahal proposalnya dibuat sangat bagus.”

Menurut catatan Pokja Pengendali, total dana PNPM yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada 2007-2013 mencapai Rp 260 miliar. Dari jumlah itu, 48 persen atau sekitar Rp 138 miliar telah dikembalikan. Sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan.

Dibandingkan dengan dana PNPM Mandiri yang disalurkan pada 2007-2013 sebesar Rp 56,3 triliun, jumlah dana yang diselewengkan memang tergolong sangat kecil, tidak sampai 0,5 persen.

Menurut Scott Gugenheim, salah satu ahli kemiskinan yang turut memberikan sumbangan pemikiran soal PNPM Mandiri, kecilnya angka korupsi di PNPM Mandiri bisa terjadi karena tidak melibatkan banyak pintu birokrasi. Penyaluran dana PNPM Mandiri dirancang langsung dari pemerintah pusat ke desa, tidak melewati provinsi dan kabupaten, seperti pada program-pro-

gram pemerintahan yang lain. “Penyaluran dana PNPM dirancang langsung dari pemerintah pusat ke desa tidak melewati provinsi dan kabupaten. Itu mungkin yang menyebabkan korupsi di PNPM rendah,” katanya.

Sejauh ini, dalam kurun 2007-2013, pemerintah sudah menggelontorkan dana lebih dari Rp 56 triliun untuk program pemberdayaan masyarakat miskin di desa dan kota. Dana ini telah disalurkan kepada lebih dari 6 ribu kecamatan dan 7 ribu desa di seluruh Indonesia. Pada 2014 ini, alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri sebesar Rp 9,74 triliun. Dana itu, dari APBN Rp 9 triliun dan APBD Rp 740 miliar.

Ke depan, Sujana Royat menekankan komitmen tata kelola antikorupsi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri menjadi tekad bersama yang tidak lagi bisa ditawarkan. Untuk mencegah kasus korupsi, Pokja PNPM bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menggulirkan “Gerakan Toleransi Nol Terhadap Korupsi.” Gerakan ini dimaksudkan sebagai peringatan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri.

Salah satu bentuk dari gerakan tersebut adalah digelar sebuah acara nasional bertajuk “Gelar Semangat Anti Korupsi,” berupa rangkaian *workshop* dan pagelaran seni/wayang. Acara gelar semangat yang digelar di Lampung (2013) dan Surabaya serta Jombang (2014) lalu, juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Menurut Denny Indrayana, gerakan sipil melawan korupsi dalam pelaksanaan PNPM sangat penting dilakukan, termasuk melalui pengawasan bersama oleh

masyarakat. “Masyarakat juga jangan mau dijadikan korban korupsi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto justru memuji cara yang telah dijalankan PNPM Mandiri dalam memberantas korupsi merupakan praktik terbaik. Sebab, pemberantasan ini dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga turut membangun optimisme baru terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Banyak kasus yang terbongkar atas laporan masyarakat dan banyak juga yang tidak jadi korupsi karena dikontrol penuh oleh masyarakat,” kata Bambang.

Selama ini ada tiga kesalahan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pemberantasan diserahkan kepada penegak yang tidak adil. Kedua, pemberantasan korupsi hanya sebatas penanganan represif, padahal selain penanganan juga diperlukan pencegahan. Ketiga, pemberantasan yang tidak melibatkan partisipasi publik.

“Terhadap ketiga kesalahan tersebut, PNPM Mandiri bisa menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya. ■



“GERAKAN SIPIL MELAWAN KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PNPM SANGAT PENTING DILAKUKAN. MASYARAKAT JUGA JANGAN MAU DIJADIKAN KORBAN KORUPSI.”

Denny Indrayana
Wakil Menteri Hukum dan HAM
(2011-2014)



“PENYALURAN DANA PNPM DIRANCANG LANGSUNG DARI PEMERINTAH PUSAT KE DESA, TIDAK MELEWATI PROVINSI DAN KABUPATEN. ITU YANG MENYEBABKAN KORUPSI DI PNPM RENDAH.”

Scott Gugenheim, salah satu mitra pembangunan penggagas PNPM Mandiri

MELAWAN KORUPSI LEWAT WAYANG KULIT

Wayang kulit tak lagi berpakem pada cerita klasik saja. Tapi juga merespon berbagai isu ke-kinian. Seperti yang dilakukan oleh Ki Purbo Asmoro dari Solo. Dengan gaya humor namun menyentil, ia mengolah berbagai cerita korupsi dengan unik.

A lunan musik gamelan mengiringi pementasan lakon Tripama Kawedar. Dua tokoh wayang berdiri tegak di atas gedebok pisang. Lampu sorot menembak wayang kulit hingga bayangannya berpendar pada selembur kain putih. Beberapa sinden bernyanyi menyampaikan lirik tentang korupsi dalam bahasa Jawa.

Ki Purbo Asmoro hadir meramaikan pagelaran wayang kulit di acara Gelar Semangat Anti Korupsi 2014 di Jombang, Jawa Tengah. Ia membawakan kisah klasik Tripama, puisi terkenal karangan Pangeran Mangkunegara IV dari Surakarta. Puisi klasik ini ditulis pada tahun 1878 yang menceritakan tentang kepahlawanan dari sosok Sumantri, Kumbakarna dan Karna. Tiga tokoh wayang legendaris dari epos berbeda.

Pagelaran ini bagian dari program komunitas kreatif PNPM Mandiri. Komunitas kreatif berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai seni budaya lokal untuk mendorong proses perubahan. Dan melibatkan peranan individu, organisasi lokal masyarakat, kelompok budaya, masyarakat adat hingga kelompok seni lainnya. Keberadaan mereka diharapkan bisa menjadi kekuatan agar keluar dari jerat kemiskinan.

“Pesan yang bisa kita ambil dari tokoh pewayangan ini adalah suri tauladan ketiga tokoh satria yang sangat jujur, pemberani dan tegas, untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara,” kata Ki Purbo Asmoro.

Malam itu, ribuan orang larut dan menyimak cerita klasik ini. Sambil sesekali menyeruput kopi untuk menghindari rasa kantuk. Anak-anak, remaja hingga

orangtua datang menyaksikan acara seni budaya ini. Termasuk perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tokoh agama dan budayawan.

Pertunjukan wayang kulit Ki Purbo Asmoro yang didukung oleh Yayasan Lontar, tak lepas dari tema korupsi. Tema sepanjang hayat yang selalu menarik untuk diceritakan. Apalagi berbagai skandal korupsi di Indonesia ini menjalar dari pusat hingga ke daerah. Lewat wayang, Ki Purbo Asmoro ingin mengkampanyekan semangat anti korupsi kepada masyarakat luas.

“Wayang sangat fleksibel dan fanatik. Kita mudah menyampaikan tema apapun. Termasuk korupsi dan itu penting,” kata Ki Purbo Asmoro di rumah kediamannya.

Ki Purbo tak letih berkesenian lewat wayang kulit. Apalagi ia berkesempatan blusukan ke berbagai daerah. Dan bertemu dengan banyak kalangan. Di atas panggung itu, ia menyelipkan cerita korupsi dengan gaya santai namun tetap menyentil. Ia juga tak sungkan mengajak bicara dengan penonton maupun pengiringnya.

“Tanpa mengganggu pakem wayangnya,” katanya.

Ki Purbo Asmoro menilai korupsi memiliki dampak yang sangat nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi korupsi di Indonesia seperti kanker. Transparency International mencatat, Indonesia berada di tingkat 32 dari 177 negara, setara dengan Mesir. Sedangkan di ASEAN, Indonesia lebih baik dari Kamboja, Laos, Timor Leste dan Vietnam. Namun jauh dari Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand. Seniman, menurutnya punya tanggung jawab untuk urun tangan melawan korupsi.

“Saya selalu tekankan kalau kasus korupsi. Lewat

tembang maupun puisi,” katanya.

Ki Purbo Asmoro sejak kecil memang sudah jatuh cinta dengan pewayangan. Darah senimannya, ia dapatkan dari ayahnya yang juga pedalang di Pacitan, Jawa Timur. Tak heran ia menguasai panggung pewayangan. Mulai dari Trenggalek hingga menggelar pertunjukan di Amerika Serikat.

Hingga saat ini, ia membantu berbagai kegiatan program PNPM. Melalui wayang ia sampaikan nilai dan tujuan program pemberdayaan. Ia melihat, program ini penting untuk membantu masyarakat. Apalagi warga sendiri yang menentukan dan mengawasi kegiatan programnya.

“Program ini berguna dan jelas menolong mereka,” katanya. Termasuk menghidupkan nafas seni dan budaya sebagai alat pemberdayaan. Malam itu masyarakat larut dalam cerita hingga pukul empat pagi. Menikmati berbagai lakon perseteruan kebaikan dan kejahatan. Warga tetap bertahan walau udara malam menusuk kulit. Uniknya, pertunjukan ini juga disiarkan melalui internet ke 45 negara secara langsung dan 100 radio komunitas di Jawa.

Wayang memang tak lekang oleh zaman. Keberadannya masih bertahan hingga saat ini. Dan Ki Purbo Asmoro setia melestarikan wayang kulit sebagai medium seni sekaligus kritik sosial. Di atas panggung itu, syair sinden dan guyonan tentang korupsi menjadi bagian cerita yang penting dan bermakna. ■



 **DALANG** Ki Purbo Asmoro



NAKANU, OBAT ANTI KORUPSI

Budaya Nakanu, yang melekat di warga Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur menjadi ruh penggerak pemberdayaan warga di pulau ini. Mulai membangun jalan desa hingga semangat melawan anti korupsi.

Si Pulau Hantu adalah julukan menakutkan di Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur. Pulau yang berjarak sedepa dari Kupang ini, sejak lama dimitoskan sebagai pulau paling angker. Kapal kayu yang bersandar di pelabuhan, hanya sesekali berani mengantarkan warga. Pembangunan dari pemerintah pun, bertahun-tahun tak menyentuh pulau berpasir putih mulus itu. Akibatnya, Pulau Semau menjadi pulau yang kering kerontang. Dan si hantu kemiskinan, menjadi teror utama di pulau ini.

“Pulau itu tidak berkembang. Padahal menyimpan potensi yang luar biasa,” kata David Joni Ati, Ketua Ikatan Keluarga Besar Helong. Pulau Semau termasuk wilayah kantong kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Padahal, pulau ini menyimpan kesuburan akan tanahnya. Warga menanam berbagai jenis palawija seperti jagung, cabe, bawang merah, mangga hingga budidaya rumput laut.



DAVID Joni Ati, Ketua Ikatan Keluarga Besar Helong dan camat Pulau Semau

DARI PULAU SEMAU

Namun, hasil panen tani ini belum menjadi berkah bagi kehidupan warganya. Akses transportasi dan infrastruktur jalan yang terbatas membuat warga kesulitan memasarkan panennya. Tengkulak, menguasai dan menanggung untung dari hasil panen ini.

"Tapi sekarang tidak. Warga mulai memasarkan sendiri. Mereka tahu kepastian harga panennya," kata Marco, Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau Selatan. 14 desa di pulau ini mulai bersolek diri dengan berbagai pembangunan, mulai dari jalan, posyandu, bangunan sekolah hingga usaha simpan pinjam dari PNPM Mandiri Perdesaan. Sentuhan ini membuat kehidupan warga jauh lebih bergeliat. Mereka tak lagi kesulitan membawa hasil panennya hingga ke dermaga.

"Sekarang, kapal lebih sering datang ke pulau ini membawa hasil panen. Kualitas bawang di sini sangat bagus," kata David Joni Ati.

Membangun Pulau Semau tak semudah membalikkan tangan. Peristiwa penyelewangan dana simpan pinjam sebesar Rp 170 juta menjadi pejalaran berharga bagi warga Kecamatan Semau Selatan. Kejadian ini sempat memberi penalti dan mengancam keberlangsungan PNPM Mandiri Perdesaan.

"Warga berkumpul dan mereka menyanggupi bersama untuk mengembalikan dana yang diselewangkan. Tapi dengan syarat tetap diproses secara hukum supaya ada efek jera," kata David Joni Ati. Dari kantong warga

mereka menyumbang dana pribadi dan terkumpul hingga Rp 140 juta. Urunan dan inisiatif warga ini, membuat pemerintah memberikan apresiasi, dan menyelamatkan nafas program PNPM yang ada.

"Ini atas kecintaan warga terhadap pulaunya. Mereka merasakan dampak dari pembangunan," katanya.

Inisiatif warga ini dikenal dengan istilah *Nakanu* atau gotong royong. Warga urun rembug dan terlibat berbagai kegiatan pembangunan. Bahkan, merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan hingga pembangunan sarana posyandu hingga bangunan sekolah.

"Mereka memikul untuk menyelamatkan pulaunya. Semangat Nakanu menjadi jati diri masyarakat," kata David Joni Ati, mantan kepala sekolah ini. Ia lahir dan besar di Pulau Semau ini. "Perubahan pembangunan sangat terlihat."

Warga Pulau Semau, berharap agar peristiwa penyelewangan itu tidak terjadi lagi. Mereka mendorong berbagai program pembangunan berjalan transparan. Dan mengingatkan agar pelaksana PNPM bisa bekerja secara terbuka.

Semangat Nakanu menjadi ruh partisipasi warga. Kini, mereka selalu hadir dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Warisan leluhur ini menjadi obor agar mereka tak lagi gelap dalam pembangunan. Dan Nakanu menjadi obat anti korupsi dari Pulau Semau. ■

Melihat penyimpangan pelaksanaan PNPM Mandiri oleh kelompok elit desa, fasilitator di Kalimantan Barat menentangnya. Dampak perlawanannya pun melegakan. Kegiatan PNPM Mandiri berjalan lancar.

RUNTUHNYA SANG DIKTATOR DESA

“SAYA RUTIN *NONGKRONG* DENGAN PARA KEPALA DESA. MEREKA SEMPAT *LEDEKIN* SAYA, KOK KEGIATANNYA HARUS DIJALANKAN JUJUR BANGET YA, APA NGGAK BISA DIMAINKAN.”

Nyimas Maisarah, Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat



Raut wajah Nyimas Maisarah berkerut, tegang menahan kesabaran. Suatu siang, di hadapannya, seorang mantan lurah belasan tahun itu terus membentak, menuding-nuding Nyimas. Kata-kata kasar juga terlontar dari mulut elit desa itu.

Nyimas tetap berusaha menguasai diri. Membiarkan mantan pejabat desa itu puas menyampaikan amarahnya. Tiba-tiba Nyimas tak kuasa menahan air matanya menetes. “Saya sedih, mau *nangis*,” kata Nyimas mengisahkan kejadian yang dialaminya pada 2009 itu.

Bukan lantaran takut dimarahi, dia sedih karena sang pejabat sudah tua. Nyimas jadi ingat orang tuanya. “Seperti ribut dengan orang tua saya,” ujarnya.

Orang tua yang marah-marah itu terusik oleh teguran Nyimas, fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Elit desa itu menjalankan

program kegiatan PNPM Mandiri bak dinasti, tak mau mendengarkan masukan orang lain. Parahnya lagi, anak sang mantan lurah dilibatkan dalam struktur inti program.

Nyimas berpendapat praktek program dijalankan oleh mantan lurah secara tunggal. Dia juga mengintervensi seluruh kegiatan. Tentu ini tak sesuai dengan yang diharapkan. Dia terlalu dominan, mengatur semuanya. “Sekretariat program saja di rumah pribadinya, ini tak kondusif. Dana Simpan-Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP) dan kegiatan operasional dikelola sendiri,” ujar Nyimas.

Melihat kesewenang-wenangan tersebut, sebagai fasilitator, Nyimas tak bisa tinggal diam. Nyimas pun menegurnya. Dia memprotes pola kerja dinasti tersebut serta meminta hal itu segera diakhiri. Nyimas meminta mantan lurah itu menaati mekanisme yang telah ditetapkan, tidak boleh menyertakan anggota keluarga dalam satu tim.

Mendengar teguran itu, sang mantan pemimpin desa tidak terima dan menunjukkan surat keputusan dari bupati dan camat untuk memperkuat posisinya. Tapi Nyimas tidak bergeming. Surat keputusan memang sah, tapi pelaksanaan program menyeleweng jauh.

Dibentak dan dimarahi, Nyimas tak surut melawan.

Melalui musyawarah antar desa di tingkat kecamatan, akhirnya desa tersebut tak terpilih kembali untuk menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Tekanan kepada Nyimas juga datang dari pemasok material bahan bangunan, mitra program fisik PNPM. Sesuai dengan peraturan, pengadaan bahan material dengan nilai di atas Rp 15 juta harus melalui sistem lelang. Namun *supplier* tak menghiraukan dan mengirimkan material yang tidak sesuai spesifikasi. Nyimas menginstruksikan Tenaga Pengelola Kegiatan (TPK) tak membayar material itu. Mereka pun komplain.

"Beberapa kali saya diancam melalui SMS, saya akan dibakar, disuruh mundur," ujar Nyimas.

Tekanan lain juga datang dari pegiat lembaga nonpemerintah alias LSM. Pada 2010, ia diteror melalui telepon. Alasannya, PNPM Mandiri yang difasilitasinya tidak sah dan mengada-ada. Ia berinisiatif mengundang LSM untuk bertemu dan menjelaskan detail program. "Lama-lama akhirnya ketahuan, LSM itu protes hanya ingin minta proyek," kata Nyimas.

Dia menegaskan LSM tak bisa ikut proyek karena setiap proyek dilakukan oleh masyarakat sendiri. Namun anggota LSM secara individu dapat ikut proyek sebagai pekerja jika ia adalah warga desa tersebut dan masuk kategori rumahtangga miskin. Nyimas membeberkan banyak elite dan elemen masyarakat ingin bermain dalam program ini mengingat dana yang digulirkan tergolong besar. Pada 2009, dana mencapai Rp 3 miliar, 2010 sebesar Rp 2,5 miliar, dan pada 2011 lebih dari Rp 1 miliar.

Dengan nilai yang menggiurkan itu, ia pernah dilobi untuk memainkan proyek oleh beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir. "Saya rutin *nongkrong* dengan para kepala desa. Mereka sempat *ledekin* saya, kok kegiatannya harus dijalankan jujur banget ya, apa enggak bisa dimainkan," kata Nyimas menirukan lobi elitedesa itu. Tapi lama-lama lobi pun berhenti.

Meski terus mendapat tekanan, Nyimas tak mundur selangkah pun. Ia masih mengambil sisi positifnya. "Saya yakin mereka marah-marah karena tidak paham program. Kalau paham, mereka pasti bersyukur," katanya.

Selama mengawal program, Nyimas menemukan penyelewengan uang program SPP pada 2012. Bendahara TPK program di sebuah kelurahan dan menyelewengkan dana lebih dari Rp 100 juta. Bersama BKAD, bendahara itu dilaporkan ke kepolisian.

Masyarakat sempat menduga adanya keterlibatan Nyimas dan tim dalam penyelewengan ini. Namun, pada akhir 2012, bendahara itu diputus bersalah dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. Ia dihukum 3 tahun 6 bulan. "Masyarakat akhirnya tahu, kami tak tutupi yang salah, transparan terhadap siapa pun itu," kata dia.

Dampak perlawanannya pun melegakan. Program di Kecamatan Mempawah Hilir berjalan lancar. Pembukuan program dan dana juga sudah menaati mekanisme. "Dari kas masuk sampai kuitansi cukup bagus. Dulu banyak yang tidak mengerti karena dikendalikan oleh elit desa," kata dia. ■

Radio komunitas merupakan media informasi dan komunikasi yang murah dan mudah untuk memonitor program yang dijalankan pemerintah desa, termasuk PNPM Mandiri.

MENGAWAL PROGRAM

Masyarakat Karang Bajo, Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, marah bukan main. Mereka merasa ditipu. Cita-citanya membangun Gedung Posyandu di desanya terancam gagal lantaran material yang dikirim pemasok tak sesuai kriteria.

Peristiwa pada 2009 ini bukan tiba-tiba. Ini bermula ketika Tim Pemantau PNPM Mandiri Perdesaan

menyampaikan informasi kepada Radio Komunitas Primadona FM tentang ulah nakal perusahaan pemasok bahan bangunan. Radio itu kemudian memberitakan.

Atas informasi itu, masyarakat ramai-ramai turun memeriksa. Dan terbukti bahwa material itu tak memenuhi spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang dibiayai

PNPM Mandiri Perdesaan ini. Warga menolak. Lalu perusahaan pemasok mengganti material yang sesuai.

Karang Bajo memiliki luas sekitar 1.168 hektar. Desa di utara Gunung Rinjani ini memiliki visi mewujudkan masyarakat yang sehat, bersih, indah, aman dan sejahtera.

Sedangkan misinya mengejar angka kematian bayi balita menuju nol, buang air besar sembarangan nol, dan buang sampah sembarangan juga menuju nol.

Guna mendukung visi-misi itu, sejak 2008 mereka bercita membangun Gedung Posyandu. Sebab, jangankan rumah sakit, Posyandu saja tidak ada di desa ini. Kegiatan Posyandu masih dilakukan di rumah kepala dusun (Kadus). Berganti Kadus, pindah lagi ke rumah Kadus berikutnya. Terus menerus sampai masyarakat bingung. Karena itu, mereka sangat kecewa jika pembangunan Gedung Posyandu yang sudah di depan mata dikhianati.

Di wilayah lain, di Pengerjek, Jonggat, Lombok Tengah, acara *talkshow* radio komunitas terbukti efektif membuka dialog antara masyarakat dengan para pelaku program, termasuk perangkat pemerintah desa. Masyarakat jadi sensitif terhadap program yang dianggap tidak transparan.

Saat itu, pada November 2010, Radio Komunitas Talenta FM yang terletak di Desa Barejulat, selatan Desa Pengerjek, menggelar dialog *on air* dengan warga. Penyiar membuka kesempatan pendengar untuk memberikan tanggapan atau bertanya melalui telepon. Pendengar kemudian mempertanyakan mengapa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pengerjek tak disusun. Si penelepon menyampaikan kekhawatiran bahwa sebagian dana program telah digunakan untuk keperluan pribadi Sekretaris Desa.

“TERNYATA SIARAN BERITA MALAM HARI ITU TELAH MENIMBULKAN KESADARAN BAGI MASYARAKAT UNTUK IKUT BERPARTISIPASI MENGAWASI PROYEK PNPM UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU.”

**Muhammad Syairi,
Pengelola Radio Komunitas Primadona FM**



LEWAT RADIO KOMUNITAS

Menyikapi tuding tendensius itu, jurnalis Talenta FM menghubungi Sekdes memintanya jadi narasumber program dialog berikutnya. Ini sebagai klarifikasi isu yang telah beredar di masyarakat. Sayangnya, saat itu Sang Sekdes tidak bersedia siaran *on air*. Dia hanya mengundang jurnalis Talenta untuk mewawancarainya di Kantor Desa. Akhirnya Sekdes ini mengakui bahwa dana tersebut masih dipinjam sementara, dan memohon agar kasus ini tidak besar-besarkan.

Perangkat desa dengan difasilitasi Talenta FM akhirnya menggelar pertemuan khusus dengan masyarakat Desa Pengejek mengklarifikasi kasus ini. Mereka mengundang seluruh tokoh yang berkepentingan. Akhirnya, Sekdes pun mengembalikan dana program yang dipinjam itu.

Tak bisa dipungkiri, radio komunitas memang menjadi jembatan dalam proses pengawasan kegiatan PNPB Mandiri. Apalagi di daerah-daerah pelosok yang memiliki keterbatasan sumber-sumber informasi. Jaringan radio komunitas menjadi andalan bagi mereka untuk berkomunikasi, sekaligus berbagi informasi mengenai kemajuan atau perkembangan kegiatan PNPB Mandiri.

Muhammad Syairi, penggagas dan pengelola Primadona FM mengaku semula dirinya tidak sadar bahwa pemberitaan radio ini bisa efektif mengontrol proyek dan bisa menekan adanya indikasi korupsi dalam program-program desa. Apalagi, Primadona hanyalah radio komunitas dengan radius siar 20 kilometer.

“Ternyata siaran berita malam hari itu telah menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi proyek pembangunan Gedung Posyandu. Ini di luar dugaan kami,” katanya. Menurut dia, dengan banyaknya siaran berulang, masyarakat sadar bahwa mereka memiliki proyek yang bisa memajukan desa.

Dalam satu wawancara, pengawas PNPB Mandiri Perdesaan dari Desa Karang Bajo, Mahsun Hidayat, mengakui pengawasan melalui radio komunitas sangat efektif. Ini terbukti dari membaiknya kinerja Tim Pengelola Kegiatan. Tim tidak bisa kerja serta merta karena selalu diawasi oleh masyarakat. Indikasi korupsi bisa ditekan. “Sedikit demi sedikit terus ada perbaikan,” katanya.

Radio komunitas merupakan media informasi dan komunikasi yang murah dan juga mudah. Jika setiap program bisa dilibatkan, tentu masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa. “Cukup mereka memonitor radio, mereka akan mengetahui program apa saja yang dijalankan pemerintah desa,” kata Kepala Desa Karang Bajo Kertamalip.

Kini, berkat kerja keras mereka, termasuk para perangkat desa dan pegiat radio komunitas, Karang Bajo sudah jadi Desa Siaga percontohan. Tak cuma punya lima Posyandu, desa di pesisir utara Pulau Lombok ini juga punya Tim Siaga Aktif yang siap membantu membentuk anak desa yang cerdas dan kreatif. ■

WARGA KAMPUNG MELAWAN KORUPSI

Program pelatihan advokasi hukum bagi pelaku PNPM diterapkan di berbagai provinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia. Tujuannya, agar mereka memahami bagaimana cara menangani masalah hukum di masyarakat.

Tiga tahun lalu, enam orang dengan perasaan gusar dan bingung datang membawa masalah besar. Mereka mengaku diintimidasi dan diperas oleh sekelompok orang. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya.

Mereka tak lain para anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Lampung. Sebagai tim pelaksana, mereka memang mendapatkan dana besar dari pemerintah, dari ratusan hingga miliaran rupiah. Layaknya ada gula ada semut. Begitu pencairan dana turun, intimidasi dan upaya pemerasan langsung menyapa pengelola program.

Pemeras mendatangi pengelola program dan meminta jatah duit. Intimidasi diikuti ancaman akan memperkarakan program dan tak segan mempolisikan pengelola program.

Tak nyaman dengan tekanan itu, keenam pengelola datang ke Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung di Palapa, Tanjung Karang Pusat, Lampung. Mereka meminta bantuan dan arahan. "Mereka ke sini mengaku diintimidasi. Mereka menceritakan semuanya," kata Direktur KBH Lampung, Muhammad Syarif Abadi.

Atas pengaduan masyarakat tersebut, KBH menindaklanjuti. Bahkan, Syarif merasa perlu segera bertindak melihat problem yang menyandera para TPK disana. Secara intensif, mereka berkomunikasi dengan jaringan lembaga dan pegiat bantuan hukum provinsi.

KBH Lampung bersama pelaku PNPM kemudian membuat program paralegal guna memperkuat pemahaman hukum pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Paralegal ini diharapkan bisa mendampingi masyarakat dan pengelola program dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.

John Odhius, Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan di Lampung mengakui kendala program itu, seperti warga yang takut melaporkan penyimpangan dan sebaliknya pengelola yang takut terhadap intimidasi. Berdasarkan laporan yang masuk, selama ini masyarakat takut mengadukan pelanggaran dan penyelewengan program. "Takut karena tidak ada pengacara dan paralegal yang mendampingi," ujar Odhius.

Odhius mengatakan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman hukum, membuat pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kerap menjadi korban pemerasan, termasuk dari wartawan dan LSM "hitam." "Kami sering menghadapi orang-orang yang mengadukan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan meminta sejumlah uang untuk berdamai," ujar Odhius.

Syarif bersama jaringan aktivis hukum untuk masyarakat kemudian menggelar pelatihan paralegal bagi masyarakat luas pada Februari 2011. Pelatihan ini dikhususkan bagi para TPK program. Gayung bersambut, ratusan pelaku program turut dalam pelatihan peningkatan pengetahuan hukum.

Sejauh ini, KBH Lampung menyebut, telah melahirkan 400 paralegal di 12 kabupaten yang ada di Lampung. Ini jadi bekal bagi pengelola program. “Fokus pelatihan ini adalah pemberdayaan, melalui pendampingan, bukan relasi klien dengan pengacara. Setelah pelatihan mereka bisa mengadvokasi secara mandiri,” kata Syarif.

Paralegal merupakan seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum. Ini mencakup hukum material maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam prakteknya, paralegal menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi.

Dengan pemahaman yang cukup soal hukum, paralegal diharapkan bisa menangani kasus di sekitar warga. Namun ada kalanya paralegal ini meminta bantuan KBH jika berhadapan dengan hal-hal teknis, seperti prosedur acara perdata dan pidana. Saat ada kasus seputar PNPM muncul, misalnya, paralegal itu akan menangani kasus secara mandiri, mengupayakan jalur damai dan musyawarah. Jika sudah tak berkompromi lagi, mereka akan meneruskan ke jalur hukum.

Menariknya setelah gencar menggelar program pelatihan itu, serta beberapa oknum pemerias dijebloskan penjara, maka pemerias dari LSM mulai tiarap. Mereka justru gantian takut mengintimidasi dan memerias

pengelola program. “Mereka berpikir ulang,” katanya.

Tak hanya di Lampung, program pelatihan advokasi hukum bagi pelaku PNPM juga diterapkan di berbagai propinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia. Tujuannya, agar para pelaku PNPM memahami bagaimana cara menangani masalah yang terjadi di masyarakat, melalui penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan.

Selain paralegal, kehadiran program pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat miskin juga memicu sejumlah advokat terpanggil menangani kasus-kasus dalam pelaksanaan PNPM ini. Basuki Rahmat, seorang pengacara publik di Kediri adalah salah satunya.

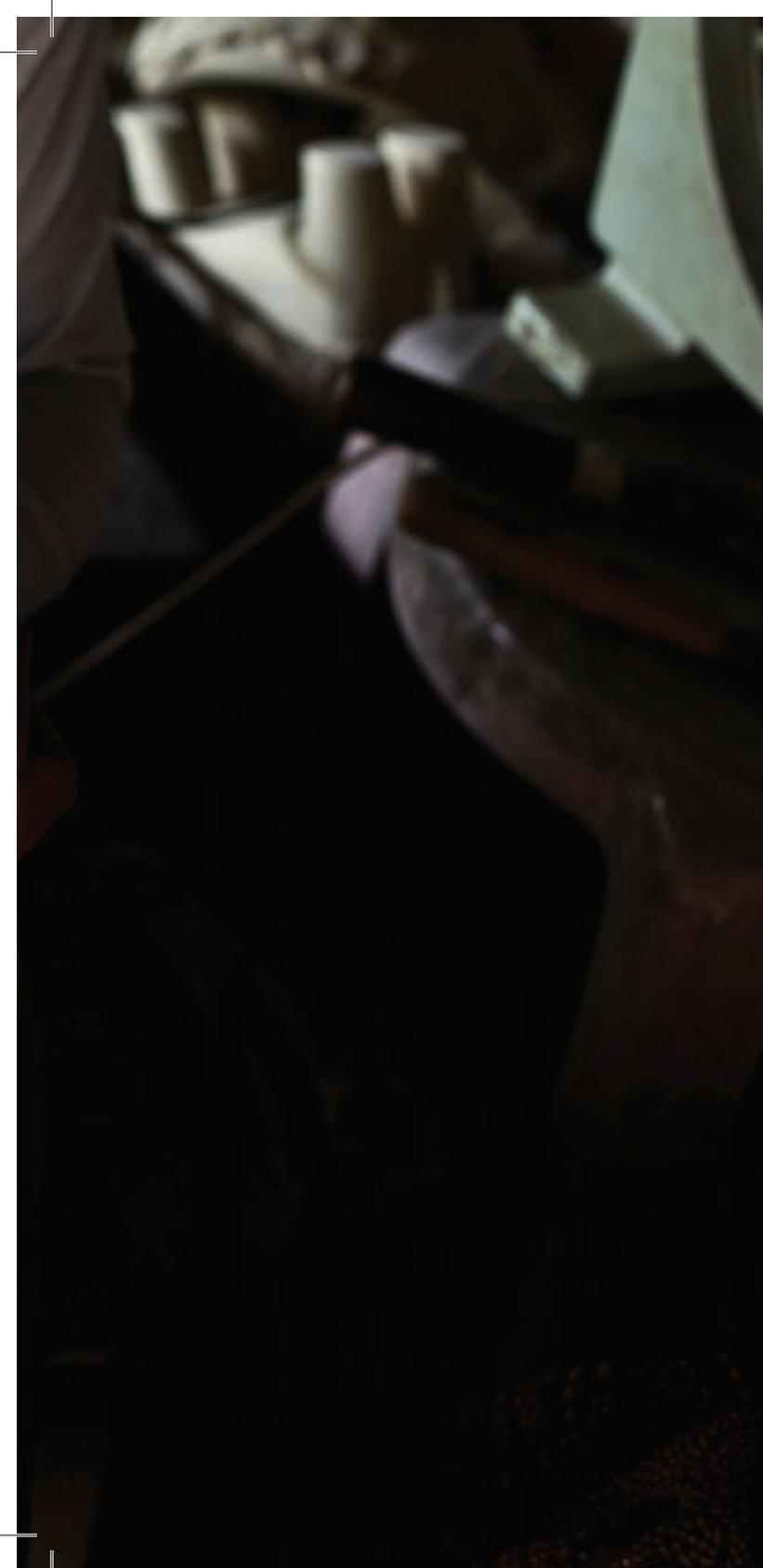
“Masyarakat di desa ini kan sudah banyak yang susah. Sudah susah, dapat bantuan, kok ya masih dikorupsi. Dari situ saya betul-betul prihatin dan ingin terlibat lebih dalam,” kata Basuki. Dia menyebutkan besarnya dana PNPM berpotensi memunculkan penyalahgunaan. “Uang PNPM ini kan sangat banyak. Perputarannya bisa puluhan miliar Rupiah per wilayah per tahun. Ini benar-benar harus dikawal,” ujarnya. ■



“FOKUS PELATIHAN INI ADALAH PEMBERDAYAAN, MELALUI PENDAMPINGAN, BUKAN RELASI KLIEN DENGAN PENGACARA. SETELAH PELATIHAN, MEREKA BISA MENGADVOKASI SECARA MANDIRI.”

Muhammad Syarif Abadi,
Direktur KBH Lampung





VIII

TUNAS KEMANDIRIAN

Bermula dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi pendorong kemandirian warga. Mereka bergerak dari nol dan kini sudah menuai hasilnya. Dana stimulan ini memberi gerak untuk berkembang dan keluar dari jerat kemiskinan.

“BUKAN DANANYA.
PELATIHAN JUGA MENJADI
KUNCI KEBERHASILAN.
KALAU DANA BISA
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA ATAU
SWADAYA.”

**Tri Rismaharini, Walikota Surabaya
(2010-2015)**



Sepulang dari menghadiri acara sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rodliyah membawa “buah tangan” bagi ibu-ibu pengajian di masjid lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengabarkan adanya program dana bergulir PNPM Mandiri yang bisa dipinjam untuk modal usaha. “Kalau bukan untuk usaha, sebaiknya tidak *usah* pinjam,” tukas Rodliyah, seakan ingin mengukur terlebih dahulu komitmen ibu-ibu pengajian itu.

Empat orang temannya, yang merupakan ibu-ibu rumah tangga menyambut tantangan sekaligus kesempatan tersebut. Pada 1 Mei 2010, Rodliyah, Suparmi, Rusti, Sutirah dan Sri Rahayu mendirikan Kelompok Swadaya Masyarakat [KSM] Al-Khoibar. Lalu, masing-masing mengantongi dana pinjaman bergulir Rp 500.000.

Dengan duit itulah Rodliyah membangkitkan lagi usahanya, yang telah dirintisnya sejak 1996 namun belakangan karam gara-gara suaminya jatuh sakit. Dia memulai kembali usaha berjualan kacang atom dan kacang gurih berbahan dasar kedelai.

Sejumlah 5 kilogram kacang atom dijualnya setiap hari dengan kisaran harga Rp 1.000 - 18.000 tergantung berat kemasannya.

Sedangkan Suparmi, buruh cuci dan gosok panggilan mewakili suaminya meminjam dana bergulir untuk usaha solder keliling. Sri Rahayu membantu suami membuka usaha catering. Sutirah menggunakan duit pinjaman untuk menambah barang dagangan, sa-

yuran di Pasar Gunung Sari Ulu. Sementara Rusti membeli gerobak kayu yang lebih besar untuk mengembangkan usaha berjualan mie pangsit.

Lima srikandi dari Kelurahan Gunung Sari Ulu itu bagian dari jutaan masyarakat Indonesia yang merasakan langsung manfaat PNPM Mandiri. Dalam kurun waktu 2007-2013, jumlah pinjaman bergulir melalui program simpan pinjam untuk perempuan dan usaha ekonomi produktif mencapai Rp 12,5 triliun. Sebanyak enam juta orang telah merasakan manfaatnya. Sebagian dari jumlah itu berhasil membesarkan usahanya secara mandiri.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, kemandirian atau swakelola oleh masyarakat berperan penting guna meraih kesuksesan program ini. Berdasarkan hasil studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan [TNP2K], misalnya, swakelola untuk infrastruktur sederhana terbukti berhasil menghemat biaya 15-50 persen dibandingkan jika menggunakan kontraktor. Selain itu, 96 persen sarana-prasarana yang dibangun berkualitas baik dan sangat baik.

Swakelola juga menjadi kunci keberhasilan program dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan [SPP]. Warga mendapatkan pinjaman lunak dan kartu tanda penduduk sebagai syarat pinjamannya. Fasilitator program turut mendampingi mereka dan melakukan berbagai pelatihan keterampilan. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, punya pandangan sama. Dalam forum *Academic Conference on Poverty Alleviation* yang diselenggarakan TNP2K, pada 12-13 Juni 2013, walikota inspiratif ini menyatakan pemerintah berperan memfasilitasi program pelatihan dengan menyediakan alat-alat pelatihan. “Bukan hanya dananya. Kalau dana bisa kerjasama dengan pihak ketiga atau

swadaya,” imbuhnya.

Semangat kemandirian dari penerima manfaat dana bergulir mewarnai semua proses pengembangan usaha, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. KSM AI-Khoibar misalnya, setiap bulan menggelar pertemuan rutin guna membahas perkembangan usaha setiap anggotanya. Mereka didorong memiliki kepengurusan tetap. Termasuk membuat agenda rutin pertemuan setiap bulannya.

Selain itu, masyarakat juga berperan aktif menjaga kelancaran pengembalian dana bergulir. Caranya bermacam-macam. Antara lain menumbuhkan kesadaran bahwa dana itu bukan hibah sehingga wajib dikembalikan secara mencicil. Jika ada yang terlambat membayar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Tak ada lagak *debt collector* yang intimidatif.

Toh, ujung-ujungnya manfaat itu juga dinikmati masyarakat. Berkat rekam jejak yang baik, nilai pinjamannya bisa bertambah. Contohnya, KSM AI-Khoibar, di PNPM Mandiri Perkotaan yang nilai pinjamannya meningkat dari Rp 500.000 menjadi Rp 2,5 juta per orang dalam kurun tiga tahun. Otomatis usaha pun akan semakin besar. Rodliyah mengaku saat ini omzet usahanya Rp 45 juta sebulan sehingga dia menyandang status “layak bank” (*bankable*). Sejak 2011, Rodliyah menerima kredit sebesar Rp 50 juta dari perbankan.

Padaahal, menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, tidak mudah bagi penerima dana bergulir untuk memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Karena itu, Djoko memuji para penerima manfaat PNPM Mandiri yang berhasil naik kelas sehingga dipercaya oleh perbankan.

Sejauh ini, memang banyak penerima dana bergulir yang berhasil membesarkan usahanya menjadi usaha kecil-menengah (UKM). Mereka inilah “lulusan” PNPM Mandiri yang sudah mampu mengakses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Apalagi, saat ini bank semakin kepincut membiayai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kian menjamur di tanah air ini.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank yang merintis penyaluran kredit bagi “lulusan” PNPM Mandiri sejak awal 2012. Bank BUMN ini bersama sejumlah kementerian turut mendorong para penerima manfaat PNPM Mandiri melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, sehingga menghasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhammad Ali, pada akhir Maret 2014, potensi nasabah baru yang berasal dari penerima manfaat PNPM Mandiri sebanyak 5 juta orang. Potensi itu sudah tergambar dari lonjakan nilai KUR yang disalurkan BRI dalam tiga tahun terakhir ini sebesar 65% menjadi Rp 27,7 triliun per akhir 2013. ■



“TIDAK MUDAH BAGI PENERIMA DANA BERGULIR UNTUK MEMPEROLEH KEPERCAYAAN DARI LEMBAGA KEUANGAN FORMAL SEPERTI PERBANKAN.”

Djoko Kirmanto, Menteri PU (2004-2014)



“POTENSI NASABAH BARU YANG BERASAL DARI PENERIMA MANFAAT PNPM MANDIRI SEBANYAK 5 JUTA ORANG.”

Muhammad Ali, Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia

GEROBAK PERUBAHAN DARI BUMI RAFLESIA

Aneka plastik hingga koran bekas menumpuk di dalam gerobak milik Edison. Hari itu, ia bergegas membawa gerobaknya ke tempat pengepul. Melewati jalan perumahan di bawah terik matahari yang cukup menyengat. Peluh keringat membanjiri wajahnya. Namun, ia terus mendorong dengan penuh kesabaran sambil menebar senyum renyah.

Dua tahun terakhir ini, ia bersama puluhan pemulung lainnya di Bengkulu tak lagi kesulitan mencari barang bekas. Tak sedikit, warga memberikan barang bekas rumah tangganya secara gratis. Bahkan, mengajak pemulung seperti Edison untuk membersihkan halaman atau sekedar memotong pohon.

“Dulu payah. Sering dicurigai orang. Saya sakit hati jika masih ada larangan untuk pemulung,” kata Edison.

Namun kini, keberadaan Edison tak lagi dipandang hina sejak mereka bergabung ke dalam Kugerbas atau Kelompok Usaha Gerobak dan Pengumpul Barang Bekas. Kugerbas berdiri sebagai wadah organisasi para pemulung. Mereka percaya, lewat organisasi ini, kehidupan mereka akan semakin baik. Dan warga bisa menaruh kepercayaan, bahwa pemulung bukan kriminal.

“Organisasi ini membantu kami. Masyarakat tak lagi diskriminatif,” katanya.

Kugerbas dirintis oleh masyarakat yang dimotori oleh Mardan Siregar sejak 2001 melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Gedang Bersatu. Lelaki dari Medan, yang

sudah menetap selama 30 tahun di Bengkulu ini, merasa iba dengan nasib para pemulung. Padahal, keberadaan mereka telah memberikan sumbangan besar bagi masyarakat dan kebersihan Bengkulu. Sayangnya, masyarakat masih memandang negatif dan tak ada kepedulian dari pemerintah.

“Setiap hari ada sekitar 40 ton barang bekas yang diangkut oleh mereka. Betapa pentingnya mereka,” kata Mardan Siregar yang peduli terhadap pemulung dan berkegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan Bengkulu ini.

Lewat organisasi ini, para pemulung lebih terorganisir. Mereka memakai seragam dengan gerobak khusus berwarna biru. Setiap orang mendapatkan nomor identitas. Termasuk pencatatan nomor kontak pengaduan dalam gerobak mereka. Identitas ini memberikan jaminan bahwa mereka adalah pemulung “legal” di Bengkulu.

Tak semua pemulung memang bisa bergabung dengan Kugerbas. Hanya mereka yang memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk yang terdaftar. Mardan Siregar justru tak ingin jumlah pemulung di Bengkulu



MARDAN Siregar bersama beberapa anggota KUGERBAS.



SELURUH anggota KUGERBAS menggunakan gerobak dengan warna yang sama dan juga seragam.



ANGGOTA KUGERBAS mensortir barang bekas yang berhasil di kumpulkan dari kompleks perumahan di kota Bengkulu.



SEMUA lokasi pembuangan sampah di kota Bengkulu menjadi lahan mencari dan mengumpulkan barang bekas yang bisa di daur ulang.

semakin bertambah. “Menjadi pemulung karena faktor kemiskinan,” katanya. Apalagi profesi ini diteruskan oleh anak-anak pemulung.

Pemulung Kugerbass mengajukan pinjaman bergulir melalui PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 3 juta tiap orang. “Ini meningkatkan harkat dan martabat mereka. Bahkan mereka juga dipercaya untuk mengelola simpan pinjam,” katanya bangga.

Para pemulung memanfaatkan dana ini untuk keperluan usaha. Mulai membuka usaha kue hingga modal usaha warung kecil. Keberadaan mereka sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Mulai kegiatan pengajian hingga terlibat dalam berbagai pembangunan. Warga juga membenahi kawasan tempat para pemulung tinggal.

“Gerobaknya mulai banyak yang rusak. Mereka pakai tiap hari. Kami akan perbaiki bersama,” kata Mardan Siregar. Ia berharap agar ada mitra yang membantu menyediakan gerobak untuk mengganti yang rusak. Bantuan ini, menurutnya, tentu akan meringankan beban para pemulung. ■

BERSATU KITA TEGUH

Perempuan di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar, Bali, menyulap lahan kosong menjadi pasar. Bersama warga lainnya, mereka membangun sejumlah fasilitas pasar yang nyaman. Warga juga rela menyumbangkan tanahnya untuk akses jalan menuju pasar. Kini, perempuan di Desa Celuk bisa menikmati manisnya kue wisata di Bali.



NI Made Lalik Nuratni (kanan) dan Made Sujana, mantan Dusun Celuk.

BERCERAI KITA RUNTUH

Enam tahun lalu, lahan kosong seluas 1500 meter persegi itu hanya dimanfaatkan oleh ternak sapi dan kebun kelapa. Sesekali menjadi tempat bermain bola anak-anak atau lahan parkir bagi kendaraan yang datang berbelanja di Pasar Seni Sukowati 2 di Desa Guwang. Pasar murah meriah ini menjual aneka pakaian dan pernak pernik wisata Bali. Biasanya, ramai oleh wisatawan yang berbelanja oleh-oleh.

Warga Desa Celuk ingin menikmati manisnya kue wisata di Bali. Apalagi, letak Pasar Seni Sukowati 2 ini bersebelahan dengan pemukiman warga Desa Celuk. Namun, harga sewa lapak yang tinggi membuat warga tak sanggup berjualan di pasar ini. Warga sekitar hanya menjadi penonton dari ramainya Pasar Sukowati 2.

Dulu, Desa Celuk terkenal sebagai pengrajin perak dan emas. Namun, warga sudah meninggalkan profesi itu. Kerajinan perak dan emas tak lagi mencukupi kebutuhan warga yang bekerja sebagai buruh. Terlebih dengan maraknya galeri berkelas di daerah itu. Kondisi ini membuat Desa Celuk tak berkembang.

“Kita ingin pekerjaan baru. Namun, memajukan usaha bebannya berat. Tapi ini ada potensi untuk berkembang,” kata Ni Made Lalik Nuratni. Dia bersama 300 perempuan di Desa Celuk mengusulkan agar lahan kosong milik desa ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya mendirikan pasar baru agar mereka bisa berdagang dengan harga lapak murah. Selain itu, ramainya Pasar Seni Sukowati 2 di Desa Guwang diharapkan bisa menular ke pasar di Desa Celuk ini.

Beruntung, tahun 2007, usulan mereka mendirikan pasar berada di peringkat 13 saat musyawarah prioritas usulan, dengan sisa dana PNPM Mandiri sebesar Rp 64 juta. Dana ini menjadi modal awal untuk mendirikan pasar. Namun dana tersebut tidak cukup. Biaya pembangunan pasar ini mencapai Rp 116 juta.

Warga dihadapkan pada pilihan. Memanfaatkan dana tersebut atau merelakan jatuh ke desa lain. Warga pun memutar otak.

“Kita bikin konsorsium. Warga menyumbang uang dan tanahnya agar pasar ini bisa berdiri,” kata mantan Dusun Celuk, Made Sujana. Berkat kekompakan warga, terkumpul modal hingga Rp 651 juta lebih. Sisa modal terkumpul dari hasil udunan warga sebesar Rp 4 juta dari sewa lapak selama 25 tahun. Warga miskin menjadi prioritas utama yang mendapatkan lapak.

“Paling ramai saat liburan sekolah dan tahun baru. Penghasilan dari dagang cukup membantu keluarga,” kata Kadek Budiassa, pedagang baju. Setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan hingga Rp 2 juta. Kadek juga salah satu anggota kelompok yang mendapatkan dana simpan pinjam. Setiap kelompok yang terdiri dari 5 orang ini mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta. “Untuk menambah modal dagang,” ujarnya.

“Semangat turun tangannya luar biasa. Paling penting ada kepercayaan agar masyarakat bisa bangkit,” kata mantan Kepala Desa Celuk, Made Sujana. Kini, Pasar Seni Sukowati 3 dihuni oleh 113 pedagang. Mereka dilatih etika berdagang agar pembeli semakin betah dan nyaman berbelanja di pasar ini. Termasuk membangun jaringan dengan pemandu wisata di Bali. Agar mereka bisa membawa rombongan wisatawan ke sini.

“Dari pagi sampai malam saya berkeliling ke tempat wisata membagikan brosur dan kartu nama. Naik sepeda,” kata Ni Made Lalik Nuratni mengingat perjuangan mempromosikan pasar seni ini. Usaha dan kerja keras warga mulai membuahkan hasil sejak pasar ini resmi berdiri. Aktivitas pasar mulai ramai dan bergeliat oleh pembeli.

Pasar Sukowati 3 ini semakin berkembang dan jauh dari kondisi awal. Di lokasi ini, terdapat toilet, jalan masuk dan area parkir. Bahkan mereka mampu



PEDAGANG pasar Sukawati menawarkan dagangannya kepada wisatawan yang datang.



WISATAWAN memilih pakaian yang di jajakan di pasar Sukawati

menyewakan lapak pada warga desa lainnya. Dari 96 lapak berkembang menjadi 121 lapak.

Namun, berbisnis menuntut kreatifitas untuk jeli membidik pembeli. Para pedagang di Pasar Seni Sukowati 3 ini, mesti siap dengan menjamurnya pasar modern di sekitar Gianyar dan Denpasar. Keberadaan pasar modern ini membuat usaha dagang di Bali semakin ketat.

Para pedagang dan pemangku pasar mesti berinovasi agar pasar ini tetap ramai. Misalnya, menambah dagangan aneka kuliner dan sajian seni pertunjukkan. Sehingga pasar ini unik dan berbeda dengan pasar lainnya. Apalagi, keberadaan Pasar Seni Sukowati 3 ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Bukan sekedar bisnis semata.

“Tantangannya di pemasaran agar pasar ini semakin berkembang,” kata kepala pasar, Wayan Duaja.

Kemandirian dan semangat kebersamaan di Desa Celuk menjadi modal sosial agar kehidupan mereka semakin baik. Mimpi mereka untuk memiliki pasar sudah terwujud. Bahkan pasar ini menjadi aset desa dan bisa memberi kontribusi sumbangan bagi desa setempat. Kini, di tangan mereka, jurus kreatifitas berdagang dan kejelian membidik pasar sudah terbuka lebar. Saatnya mereka menikmati manisnya lezatnya kue wisata di Bali. ■



KARENA persaingan dengan sejumlah tempat penjualan souvenir lainnya yang lebih modern, kini pasar Sukowati tidak setiap hari ramai di kunjungi wisatawan dan pembeli.



Dari selembaar gambar kincir air dan sepeda ontel. Warga Dusun Dosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bermimpi agar tak lagi gelap gulita. Penantian panjang selama 44 tahun akhirnya terwujud. Pembangkit listrik mikro hidro membuka babak kehidupan baru.

CAHAYA MEMBAWA BERKAH

Berawal dari selembaar mata pelajaran kelas empat sekolah dasar. Sebuah kincir air ternyata bisa menyalakan lampu bohlam. Gambar itu menjadi mimpi berhari-hari dibenak kepala seorang guru Sutarjo. Maklum saja, bertahun-tahun ia bersama puluhan warga lainnya tak pernah menikmati aliran listrik. Padahal setiap malam ia mesti berjibaku memeriksa lembaran hasil belajar dari anak didiknya.

“Saya cuma punya lentera saja. Setengah mati membaca di malam hari,” kata Sutarjo.

Gambar kincir air itu menjadi obrolan warga setiap hari. Namun mereka tak mengerti bagaimana cara membuatnya dan mengapa bisa mengubahnya menjadi listrik. Keterbatasan pengetahuan dan informasi membuat hidup mereka merana. Apalagi mereka tinggal di dalam kawasan hutan yang jaraknya sangat jauh dari keramaian.

Sutarjo dan warga lainnya tinggal di Dusun Dosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Letak dusun ini melewati perkebunan sawit dan hutan. Dari jalan raya Trans Kalimantan, mesti melalui jalan perintis yang masih tanah. Jika musim hujan hanya kendaraan

roda dua yang sanggup menerabas jalan ini atau jenis mobil jeep. Bertahun-tahun mereka tinggal di tempat yang terisolir dan tak tersentuh oleh pembangunan. Termasuk sekedar menikmati aliran listrik dari PLN.

“Sekitar tahun 1970 ada warga yang punya sepeda. Lampunya bisa nyala karena ada dinamo,” kata Sutarjo.

Sepeda dan kincir air semakin membuka mata warga Dosan. Mereka yakin bisa membuat kincir air dan menghasilkan listrik secara mandiri. Apalagi, dusun ini juga memiliki aliran air Muara Kanau. Dan tak pernah kering jika musim kemarau. Bagi warga Dosan, sungai adalah transportasi utama untuk menjangkau perkotaan.

Sejak tahun 1980, akhirnya mereka berjuang membangun kincir air sederhana. Bahan bakunya hanya papan, karet ban dalam mobil dan dinamo. Kincir air buatan warga ini berhasil dan membuat lampu bohlam menyala.

“Tapi air langsung menghanyutkan papannya,” kata Nurhasan sambil tertawa. Berkali-kali mereka membuat contoh kincir air yang kuat dan berdaya. Namun, seringkali mereka gagal dan tak menghasilkan listrik yang maksimal.



M. SUTARJO dan M Nurhasan penggerak pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohidro Dusun Dosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.



Tahun 2012 menjadi titik balik bagi dusun ini. Usulan dan perjuangan mereka ditanggapi oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Dusun Dosan mendapatkan bantuan dana pembangunan pembangkit listrik mikrohidro sesuai Rencana Anggaran Dana (RAD) yang dirancang oleh warga sebesar Rp 266 juta. Warga juga menyumbang dana sebesar Rp 107 juta untuk menambah dana proyek ini.

Selama 30 hari mereka urun rembug. Mulai membendung Muara Kanau. Membangun rumah untuk mesin mikro hidro hingga menggotong pipa-pipa. Seorang konsultan juga mendampingi pengerjaan ini agar pembangunan mikro hidro berjalan lancar. Kabel-kabel listrik mulai membentang di sepanjang jalan desa. Termasuk tersambung ke setiap rumah warga.

"Saya senang sekali. Lampu menyala. Anak-anak bisa belajar. Dan kami menikmati hiburan dari televisi," kata Sutarjo. Listrik mengubah kehidupan dusun. Mereka semakin betah dan bersemangat untuk membangun dusunnya itu.

Keberadaan pembangkit listrik mikro hidro ini menjadi motor perubahan. Warga juga membentuk pengurus agar si pembangkit berumur panjang. Setiap rumah menyeter iuran bulanan listrik sebesar Rp 50 ribu. Lampu-lampu bohlam juga menggunakan teknologi energi yang ramah lingkungan. Hingga saat ini, saldo dari iuran listrik warga mencapai Rp 21 juta.

"Kemarin saat membersihkan bendungan, kita malah panen ikan hampir satu ton," kata Nurhasan.

Mimpi Sutarjo dan ratusan warga lainnya akhirnya terwujud. Setelah melewati 44 tahun dari kincir air sederhana hingga berdirinya pembangkit listrik berkekuatan 30 KW. Sutarjo tak lagi kelimpungan dengan lampu petromaksnya. ■



PEMBANGKIT listrik tenaga mikro hidro dinyalakan hanya di sore hari dan memanfaatkan aliran sungai yang mengalir di dekat desa.

SUASANA desa yang terletak di tengah hutan Kalimantan ini kini tidak lagi gelap gulita ketika malam datang.



SIARAN televisi kini bisa dinikmati di setiap rumah warga.





TOPENG PERUBAHAN

Tiga orang perempuan bersila di bengkel kayu Karya Manunggal Desa Bobung, Gunung Kidul, Jawa Tengah. Tangan mereka terampil mencungkil dan menghaluskan setiap bagian topeng kayu. Sesekali gemerincing lonceng terdengar nyaring.



SAJIMAN penilik bengkel kayu Karya Manunggal dan penggerak msyarakat desa Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta.

DARI GUNUNG KIDUL

Di balik kardus, tampak berbagai bentuk kerajinan kayu menumpuk. Dan menunggu polesan dari tangan pengrajin lainnya untuk dibatik.

“Mereka adalah petani,” kata Sajiman pemilik bengkel kayu Karya Manunggal. Setiap hari mereka bekerja di bengkel kayu ini. Dan mengisi waktu luangnya setelah dari sawah. Dari tangan mereka berbagai bentuk kerajinan kayu tercipta. Dan tersebar di galeri hingga pusat kerajinan di Yogyakarta, Jakarta, Bali, Amerika Serikat hingga Spanyol.

Sajiman adalah perintis kerajinan kayu topeng batik. Ia mulai merintis usaha ini sejak tahun 1985. Sebelumnya, ia hanya membuat topeng klasik untuk keperluan seni tari topeng maupun museum. Berbagai jenis topeng batik ini, memang keluar dari pakem topeng klasik. Dan hanya memenuhi kebutuhan pasar kerajinan. Bukan untuk seni pertunjukan. Dan sentuhan motif batik menjadi ciri khas pada setiap kerajinannya.

“Pelanggan suka dengan kerajinan topeng batik ini,” katanya.

Kerajinan topeng batik milik Sajiman bukan semata bisnis belaka. Namun, ia ingin agar kerajinannya bisa membantu perekonomian warga. Termasuk, meramaikan pembangunan desanya. Saat itu, tak sedikit pemuda maupun orangtua yang merantau ke daerah lainnya. Dan meninggalkan lahan sawahnya

akibat tekanan ekonomi. Desa Bobung, Gunung Kidul pun menjadi sepi.

“Kami memberikan pelatihan kepada pemuda untuk mengatasi pengangguran,” katanya. Tak heran jika saat ini, terdapat 800 pengrajin kayu. Dan tersebar di berbagai bengkel kerajinan kayu lainnya. Mereka ini kebanyakan adalah petani dan warga sekitar.

Kesabaran dan kerja keras Sajiman berhasil menggerakkan dan mengatasi pengangguran di desanya. Warga mulai bisa menabung dan meningkatkan perekonomiannya. Desa Bobung lebih bergeliat dan dikenal sebagai desa pengrajin topeng batik.

Tak sedikit pembeli ingin melihat langsung proses pembuatan topeng batik ini. Mereka bisa belajar langsung membatik dan membawa hasil kerajinannya. Termasuk kemudahan untuk mendapatkan bantuan simpan pinjam dari bank. Namun, Sajiman bersama warga lainnya justru memilih mendirikan koperasi. Dan mendorong agar anggota koperasi bisa makmur dan mandiri dengan keberadaan koperasi tersebut.

“Sejak itu, desa ini menjadi desa wisata. Banyak tamu berkunjung dan bisa tinggal di rumah warga,” katanya.

Desa Bobung masuk dalam binaan PNPM Mandiri Pariwisata. Keberadaan kerajinan kayu menjadi daya tarik desa ini. Selain itu, desa yang hanya ditempuh sekitar satu jam dari Yogyakarta ini, masih menyimpan potensi lain; pertunjukan seni topeng klasik dan keindahan



KEGIATAN produksi kerajinan kayu melibatkan hampir seluruh warga desa dari remaja hingga lanjut usia.



SEORANG wanita merapihkan topeng sebelum dimulai proses pewarnaan.

panorama alamnya. Setiap pengunjung bahkan bisa menginap sekaligus menikmati seni pertunjukan tari topeng klasik dari seniman Desa Bobung. Keunikan ini membawa keberkahan bagi desanya.

PNPM Mandiri Pariwisata mengucurkan dana sebesar Rp 123 miliar pada tahun 2013 untuk pengembangan desa wisata di 980 desa di 33 provinsi. Dana pengembangan desa wisata ini semakin meningkat untuk menumbuhkan potensi wisata. Dan diharapkan bisa membantu perekonomian warga desa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahkan menargetkan tahun 2015 bisa membentuk 2 ribu desa wisata di seluruh Indonesia.

"Kita latih warga agar bisa berbahasa Inggris. Termasuk memberikan pelayanan kepada setiap tamu," katanya.

Desa Bobung kini semakin bersolek. Jalan beraspal masuk hingga ke pelosok desa. Di berbagai sudut para pengrajin tampak sibuk memoles hasil kerajinannya. Gerbang desa wisata menegaskan bahwa mereka siap maju dan meramaikan manisnya pariwisata di Yogyakarta dan Gunung Kidul. Dan mimpi Sajiman terwujud. Ke haruman Desa Bobung semakin melambung. ■

PROSES pewarnaan dan pengeringan dilakukan dengan cara tradisional untuk mendapatkan hasil terbaik.



MENANTANG MAUT DI SANGIHE

Pendamping PNPM adalah ujung tombak penggerak berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan mereka untuk mendampingi hingga membuat laporan tak jarang melewati berbagai tantangan. Termasuk ancaman resiko kematian.

Gelombang besar laut Pasifik muncul tiba-tiba. Dengan mudahnya menghempaskan perahu kecil bermesin tempel. Hari itu, Recksan Salur dan Karce Salensehe hendak menuju Pulau Marore, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Pulau yang berbatasan dengan Provinsi Davao de Sur, Filipina.

Naas, perahu yang mereka tumpangi terbalik. Entah

berapa gelas air laut yang mereka minum. Dan membuat panik mereka berdua saat menyelamatkan diri. Selama lima hari mereka terseret dan terombang-ambing di laut lepas. Tanpa sekerat makanan dan minuman hingga terapung di puing perahu. Beruntung, kapal patroli milik TNI menyelamatkan nyawa mereka berdua.

Recksan Salur dan Karce Salensehe adalah pendamping PNPM sejak 2009. Peristiwa terbaliknya kapal perahu itu sangat membekas dalam ingatannya.

Walau nyaris kehilangan nyawa, keduanya tak mundur sebagai pengabdian PNPM Mandiri di Pulau Matutuang, Sulawesi Utara.

"Ini adalah pekerjaan mengabdikan," kata Recksan.

"INI ADALAH
PEKERJAAN MENGABDI."

**Recksan Salur,
Fasilitator PNPM, Sangihe**



Bekerja dengan kondisi alam seperti Sangihe butuh keberanian. Kondisi dan cuaca laut lepas tak bisa diprediksi. Namun, mereka berdua mesti melewatinya dengan penuh resiko. Demi bertemu dengan warga dan mensosialisasikan berbagai PNPM Mandiri.

“Urusan dokumen seringkali kita titipkan ke nelayan,” kata Recksan Salur.

Pulau Matutuang seperti pulau lainnya di wilayah perbatasan. Masyarakat menjalani kehidupan dengan terbatas. Mulai dari sarana infrastruktur seperti ketersediaan listrik, hingga layanan akses transportasi. Satu-satunya, hanya kapal perintis yang melayani setiap dua pekan sekali. Layanan telepon juga tak menjangkau pulau ini.

“Dulu ketika belum ada kapal perintis, ketika nelayan tak bisa melaut, kami hanya bisa makan kelapa muda,” kata Recksan, betapa tidak mudahnya tinggal di pulau seperti ini.

Melalui PNPM Mandiri, warga mengusulkan pengadaan generator listrik. Untuk menerangi 100 rumah yang terdapat di pulau ini. Pulau Matutuang menjadi perhatian PNPM Mandiri. Dari tahun 2009 hingga 2012 berbagai program telah terlaksana. Mulai dari membangun talud pantai sepanjang 980 meter, pengadaan mesin generator listrik, pembangunan sarana toilet hingga drainase sepanjang 417 meter.

Keberadaan program ini sangat membantu masyarakat, khususnya di Pulau Matutuang. Selama ini pembangunan tak pernah menyentuh mereka. Bahkan, di pulau ini, barang-barang Filipina jauh lebih banyak ketimbang produk dari Indonesia.

Tak salah, jika saat ini pemerintah memberikan prioritas terhadap salah satu pulau terdepan ini.

Tiga kabupaten perbatasan di Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 41 miliar. Selain Sangihe, dua lainnya adalah Talaud dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Recksan Salur mengabdikan pada pekerjaannya. Walau gaji tiap bulannya hanya ratusan ribu. Namun berkat ketekunannya, kehidupan warga semakin bergeliat. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pendamping di wilayah terpencil.

“Program ini memang harus menjangkau daerah terpencil. Keberadaan pendamping patut diapresiasi,” kata Sujana Royat, Ketua Pokja PNPM. Program ini ikut serta memperkuat berbagai program daerah perbatasan.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan 51 kabupaten dan 186 kecamatan di 10 provinsi. Selain Sulawesi Utara, daerah lainnya adalah Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Dan mendanai lebih dari 10 ribu proyek infrastruktur, ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. ■

RASA NYAMAN

Pinjaman bergulir dari UPK menjadi andalan warga desa untuk memulai dan mengembangkan usahanya ketimbang berutang kepada rentenir.

Saban hari Paswan punya kegiatan rutin, yaitu mengelilingi Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Nusa Tenggara Barat. Terkadang dia mengetuk pintu beberapa rumah di desa itu dan mengobrol dengan si empunya rumah. Bahan obrolannya dari yang ringan, seperti bertukar kabar dan kondisi lingkungan sekitar, hingga topik berat dan serius, semisal serangan hama yang menurunkan hasil pertanian atau kesulitan bahan baku yang mengganggu usahanya.

Inilah rutinitas unik yang dilakoni Paswan sebagai juru tagih Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mula Jati. Tak seperti juru tagih atau *debt collector* pada umumnya, yang menonjolkan tampilan sangar dan kata-kata intimidasi, Paswan lebih mengedepankan dialog dan mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang membelit penerima manfaat pinjaman bergulir PNPB Mandiri. "Kami selalu berkeliling ke lapangan untuk silaturahmi dengan KSM [Kelompok Swadaya Masyarakat] ataupun para anggotanya yang meminjam dana melalui PNPB Mandiri," katanya.

Pinjaman bergulir dari UPK memang menjadi andalan warga desa untuk memulai dan mengembangkan usahanya ketimbang berutang kepada "bank harian". Bank harian adalah sebutan warga desa terhadap rentenir, yang kerap menawarkan pinjaman uang dengan bunga sangat tinggi. Bunga pinjaman bergulir dari UPK sangat ringan, yaitu sekitar 1,5 persen, sehingga lebih dekat di hati warga desa.

Sejak hadir pada 2009 hingga sekarang, UPK melayani pinjaman bergulir bagi 180 KSM. Tiap KSM beranggotakan 3 hingga 5 orang. Artinya, ada 400-500 orang penerima manfaat pinjaman itu. "Jumlah itu belum termasuk yang perorangan," kata Subhan, Manajer UPK. Penerima manfaatnya bergerak di berbagai bidang usaha, mulai KSM bidang usaha pembuatan kerupuk, budidaya buah naga, peternakan itik, sapi, dan ikan, pembuatan kain, pembuatan batu bata, hingga para pemilik warung kecil di pasar.

Mayoritas anggota KSM merupakan warga miskin. Meski begitu, tingkat pengembalian pinjaman bergulir (*rate of return*) di BKM Mula Jati mencapai 96 persen. Menurut Subhan, tingkat pengembaliannya belum 100 persen karena masih ada beberapa KSM yang terlambat membayar cicilan. Jika ada kasus seperti ini, UPK akan "mendampingi" KSM tersebut dengan pendekatan kekeluargaan. "Kami cari tahu masalah dan mencari solusi," katanya. Alhasil, hubungan emosional antara UPK dan KSM tetap terjaga. "Pokoknya dibuat nyamanlah."

Selain itu, secara perlahan-lahan ada perubahan pola pikir masyarakat Desa Lenek. Dulu masyarakat menganggap pinjaman bergulir yang kerap disebut "epeng datu" atau uang pemerintah itu sama dengan hibah, yang tidak perlu dikembalikan. Namun sekarang masyarakat menyadari dana itu merupakan uang pinjaman yang harus dikembalikan untuk kemudian digulirkan kembali kepada warga lain yang membutuhkannya.

MELUPAKAN ‘BANK HARIAN’

Melalui pendekatan kekeluargaan dan pola pikir baru itulah pinjaman bergulir dapat terus mengalir untuk membesarkan usaha warga desa. Beberapa KSM yang bertambah besar dan menjelma menjadi usaha kecil-menengah direkomendasikan untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat dari Bank rakyat Indonesia. Sementara itu, BKM Mula Jati semakin mandiri dan tak lagi dibimbing PNPM. Bahkan ada rencana menambah modal UPK dari Alokasi Dana Desa. Pasalnya, setiap akhir tahun, UPK memperoleh keuntungan yang selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sosial, lingkungan, dan tambahan pinjaman bergulir. Target utamanya adalah membebaskan Desa Lenek dari praktek “bank harian”.

Sementara BKM Mula Jati menjaga pengembalian pinjaman bergulir dengan mendekati dan menumbuhkan kesadaran warga, UPK Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Muaro Kreatif di Kelurahan Muaro, Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat, menawarkan insentif. Insentifnya adalah hadiah buat KSM yang patuh mengembalikan dana pinjamannya tepat waktu.

“Yang membayar paling cepat setiap bulan sebelum jatuh tempo pembayaran akan mendapat hadiah,” kata Zendra Rosada, Koordinator LKM Muaro Kreatif, seperti ditulis oleh Fasilitator Sosial PNPM Mandiri Perkotaan Koordinator Kota 3 Payakumbuh, A. Syarifuddin Rambe, dalam situs www.p2kp.org. Hal serupa juga diterapkan kepada kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), dimana kelompok yang mengembalikan pinjaman

tepat waktu akan mendapatkan insentif.

Hadiah itu biasanya berbentuk barang kebutuhan sehari-hari yang nilainya tidaklah besar. “Jangan dilihat dari nilai hadiah, tapi lihatlah dari manfaatnya. Namanya manusia, pasti sangat senang mendapat hadiah,” kata Zendra. Bukan cuma buat KSM, hadiah juga diberikan kepada pengurus RT/RW terbaik yang turut berperan mengawasi warganya dalam pengembalian dana bergulir. Pasalnya, LKM Muaro Kreatif menyadari peran pengurus RT/RW juga sangat penting dalam proses pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir itu.

Iming-iming hadiah itu terbukti ampuh menjaga pengembalian dana bergulir hingga 100 persen. Artinya, tidak ada warga atau KSM yang menunggak. Berkat itu pula, sejak beroperasi pada 2009, UPK LKM Muaro Kreatif rutin menambah dana bergulirnya setiap tahun. Pada 2009 jumlahnya masih Rp 29 juta, tapi dana yang digulirkan pada 2013 sudah mencapai Rp 43 juta kepada 11 KSM. Bahkan dana bergulir itu telah menghasilkan laba Rp 26 juta.

Ini menjadi satu bukti lagi bahwa buah kerja keras itu tak akan sia-sia dan kembali bisa dinikmati oleh masyarakat. ■



“YANG MEMBAYAR PALING CEPAT SETIAP BULAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN AKAN MENDAPAT HADIAH.”

Zendra Rosada, Koordinator LKM Muaro Kreatif

Bermodal semangat swadaya dan swakelola masyarakat yang diasah melalui pelatihan PNPM Mandiri Perkotaan, KSM Kartini dan KSM Arjuna berhasil merintis dan membesarkan usahanya.

SETELAH KARTINI

Arisan sambil bergosip ria atau ngerumpi tentang model busana terbaru untuk memuaskan nafsu belanja konsumtif adalah menu utama yang biasanya mengisi acara kumpul ibu-ibu. Padahal tidak selalu “kumpul ibu-ibu” itu menghabiskan waktu tanpa hasil. Banyak juga yang menghasilkan manfaat, seperti yang dilakoni kaum ibu di Dusun Temuireng, Kelurahan Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah, dalam dua tahun terakhir ini.

Awalnya, ibu-ibu PKK di lingkungan RT 02 RW 12 Temuireng itu berkumpul setiap bulan untuk membahas berbagai masalah dan persoalan hidup. Topik bahasan cukup ringan, sesuai dengan hobi dan minat mereka, seperti memasak dan menjahit. Belakangan, menurut Sri Hening Kusdarwanti, tokoh masyarakat di desa itu, obrolan bermuara pada keinginan berusaha sesuai dengan hobi masing-masing, sekaligus menghasilkan pendapatan.

Tak mudah memutuskan jenis usaha yang bisa dikembangkan dan menghasilkan keuntungan. Apalagi belasan ibu rumah tangga itu punya ide dan keinginan beragam. Setelah menggali ide ke sana-kemari, mereka tertarik melihat usaha yang dikembangkan warga di dusun tetangganya. Ya, sejak 2011, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngudi Raharjo Kelurahan Tegalgede menyelenggarakan

kegiatan sosial di Dusun Supan, yakni pembudidayaan ikan lele.

“Kegiatan itu menjadi bahan pembicaraan hangat ibu-ibu PKK RT 02 RW 12,” kata Sri Hening. Logikanya, jika di dusun sebelah membudidayakan ikan lele secara massal, tentu pasokannya bakal berlimpah. “Kami diskusikan bagaimana mengembangkan pemanfaatannya,” Sri Lestari, seorang anggota PKK di Dusun Temuireng, menambahkan.

Sebagai langkah awal, dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kartini. Dipelopori oleh beberapa ibu rumah tangga di RT 02, KSM Kartini beranggotakan 16 orang, yang juga berasal dari RT-RT lain di Kelurahan Tegalgede. Mereka menyusun struktur organisasi dan membentuk kepengurusan. Setelah itu, mereka meminta bantuan kepada Unit Pengelola Sosial BKM Ngudi Raharjo sembari mengutarakan keinginan mengolah hasil peternakan ikan lele BKM Ngudi Raharjo.

“Ada yang punya ide dan gagasan mengelola makanan dari ikan lele,” kata Sri Hening. Ide mengerucut pada pembuatan abon lele. Gayung pun bersambut. BKM Ngudi Raharjo bersedia membimbing ibu-ibu membuat abon lele.

Rencana pelatihan keterampilan dimatangkan dan disusun dalam sebuah proposal. Selain bentuk dan jenis pelatihan, proposal itu memerinci total kebutuhan biayanya, yaitu Rp 8,6 juta. Sumber dana terdiri atas kas dan swadaya anggota KSM Kartini sebesar Rp 1,1 juta serta dana pihak lain sebesar Rp 7,5 juta. Pihak lain yang dimaksud adalah BKM Ngudi Raharjo melalui Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri

“ADA YANG PUNYA IDE DAN GAGASAN MENGELOLA MAKANAN DARI IKAN LELE.”

Sri Hening Kusdarwanti,
warga Karanganyar, Jawa Tengah



DAN ARJUNA BERLATIH

Perkotaan.

Setelah menjalani pelatihan selama dua hari pada pengujung November 2012, para ibu anggota KSM Kartini mampu membuat aneka produk berbahan lele, seperti abon lele (rasa asin dan rasa manis), keripik lele, bakso lele, dan nugget lele. Yang unik adalah keripik lele, terdiri atas tiga jenis: keripik kulit lele, keripik daging lele, keripik sirip lele. Saat pelatihan, mereka juga belajar mengemas produk olahan ikan lele itu dengan bungkus plastik yang menarik. Alhasil, setelah pelatihan, produk-produk tersebut siap dipasarkan.

Sri Hening tak mau menyebutkan ongkos produksinya. "Rahasia perusahaan," katanya. Yang jelas, harga jual olahan ikan lele itu bervariasi. Mulai nugget seharga Rp 50 ribu per kilogram, keripik daging lele Rp 80 ribu, hingga keripik kulit lele seharga Rp 100 ribu per kilogram.

Ke depan, KSM Kartini berharap bisa memperluas pasarnya ke Kelurahan Tegalgede dan Kabupaten Karanganyar. "Melihat harganya, segmen pasar produk ini adalah masyarakat menengah ke atas," kata Sri Hening. Karena itulah, KSM Kartini rajin mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan di Karanganyar dan di luar kabupaten.

Seperti halnya KSM Kartini, upaya mengawali usaha dengan pelatihan dilakoni KSM Arjuna di Kelurahan Pandean, Madiun, Jawa Timur. Mereka merintis usaha produksi kerupuk lempeng dan mendapat bantuan dana dari PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 12,05 juta. Duit itu ternyata bukan untuk modal usaha, seperti membeli bahan baku kerupuk atau peralatan memasak,

melainkan untuk membiayai pelatihan dan bahan-bahan pelatihan.

Sedangkan pengadaan peralatan produksi berasal dari swadaya dan kreativitas para anggotanya. Mulai kompor, tempat pemotongan, tempat penjemuran, hingga penggilingan kerupuk. "Jika ditotal, harga semua peralatan lebih dari Rp 15 juta," kata Suwitono, Ketua KSM Arjuna. Setiap anggota punya pembagian kerja yang jelas, antara lain dua orang bertindak sebagai teknisi, tiga orang menangani proses produksi, dan lima orang memasarkan kerupuk lempeng tersebut.

Saban hari mereka memproduksi 5 kilogram kerupuk yang berbahan dasar beras ini. Per bungkus kerupuk dijual Rp 8.500 sehingga pendapatan kotor hariannya sekitar Rp 1,45 juta. "Saat ini, dua kali produksi dalam sehari sudah habis terjual meski belum dipasarkan. Kami kewalahan melayani pembeli," kata Suwitono.

Gurahnya camilan itu bahkan sampai ke telinga Walikota Madiun. Dalam sebuah kunjungan kerjanya pada awal 2014, sang walikota mengunjungi sebuah rumah joglo di Pandean, tempat produksi kerupuk lempeng sehingga dikenal dengan nama "Kerupuk Pak Wali". KSM Arjuna juga menyusun strategi jangka panjang untuk memperluas pasar. Setiap anggota bisa membuka cabang atau membuat sendiri di rumah masing-masing. Tapi proses penjualannya tetap dikoordinasi KSM Arjuna.

Bermodal semangat swadaya dan swakelola masyarakat yang diasah melalui pelatihan PNPM Mandiri Perkotaan, KSM Kartini dan KSM Arjuna telah berhasil merintis dan membesarkan usahanya. ■

JADI AHLI MEBEL BERKAH PINJAMAN BERGULIR

Rasa haru dan bahagia bercampur di hati Sahadiah ketika mendapat sebuah kabar dari putra sulungnya. Sang anak berhasil lolos seleksi untuk menjadi polisi. Sebagai orang tua, kebahagiaan Sahadiah lengkap sudah karena dapat menyekolahkan anaknya hingga dewasa dan meraih cita-cita. Padahal, empat tahun sebelumnya, alih-alih membiayai pendidikan anaknya, mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saja dia kerap kesulitan.

Peruntungannya datang ketika Sahadiah berinisiatif membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada 2009 untuk menopang usaha pembuatan mebel dari kayu pohon kelapa yang dirintis bersama suaminya. Pasangan suami-istri di Majene, Sulawesi Barat, ini mengajak lima tetangganya yang sama-sama masuk kategori warga miskin untuk bergabung ke dalam kelompok yang diberi nama KSM Regenerasi tersebut. Sahadiah pun didapat sebagai ketua.

Lalu, mereka mengajukan proposal pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Sesuai dengan aturan, setiap anggota KSM hanya mendapatkan pinjaman bergulir Rp 500 ribu atau senilai total Rp 2,5 juta. Inilah modal awal KSM Regenerasi untuk memproduksi mebel berbahan kayu pohon kelapa. "Modal itu cukup untuk

Bermula dari pinjaman bergulir dari dana PNPM, Kelompok Swadaya Masyarakat Regenerasi di Majene, Sulawesi Barat, tumbuh menjadi kelompok yang dipercaya dan mendapat suntikan pinjaman dari perbankan.

membeli bahan baku memproduksi satu set kursi," kata Sahadiah.

Bermodal pinjaman itu, Sahadiah bersama suami dan anggota KSM mengembangkan usahanya. Meski cuma seorang ibu rumah tangga, Sahadiah terbukti mampu mengkoordinasi anggota KSM Regenerasi. Perempuan berusia 39 tahun ini juga andal mengelola pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha mebel kayu. Dalam mengelola usaha ini, dia menerapkan prinsip "siwaliparri", yang merupakan salah satu pandangan hidup masyarakat Majene. *Siwaliparri* terdiri atas tiga suku kata: *si* berarti berhadapan, *wali* (membantu), dan *parri* (susah). Jadi arti *siwaliparri* adalah saling membantu, bergotong-royong, dan susah senang ditanggung bersama.

Dengan prinsip itulah para anggota KSM Regenerasi sangat solid dalam menjalankan usahanya. Berbagai masalah dihadapi bersama-sama sehingga usahanya makin maju. Mereka juga tak lupa menyisihkan sebagian hasil pendapatannya untuk membayar cicilan pinjaman dengan tepat waktu. Mereka tidak pernah menunggak cicilan. Jika ada anggota yang alpa atau kebetulan tengah kesulitan usahanya, anggota lain selalu siap membantu. Catatan pembukuannya juga sudah sesuai dengan standar pembukuan di PNPM Mandiri Perkotaan seperti diajarkan Fasilitator Kelurahan dan

Unit Pelaksana Kegiatan.

Tak aneh, setahun berselang, KSM Regenerasi kembali memperoleh pinjaman bergulir. Nilainya naik 100 persen menjadi Rp 5 juta. Begitu pula pada 2011, mereka memperoleh lagi pinjaman bergulir sebesar Rp 7,5 juta. Bahkan, pada 2012, nilainya bertambah menjadi Rp 10 juta seiring dengan berkembangnya usaha mebel kayu tersebut.

Saat ini, KSM Regenerasi memproduksi sekitar dua set kursi setiap bulan. Harganya Rp 5-7 juta per set, disesuaikan dengan model dan bahan yang dipesan oleh konsumen. Selain kursi, mereka menerima pesanan pembuatan lemari, perabotan rumah tangga, dan perabotan sekolah. Lemari tempat televisi dan keramik cendera mata berbahan kayu jati dihargai sekitar Rp 2 juta. Sahadiah mengaku suaminya kini sudah ahli dan sanggup membuat mebel apa saja sesuai pesanan. "Yang penting ada contoh gambar atau fotonya," ujarnya.

KSM Regenerasi selalu kebanjiran order, terlebih saat bulan Ramadan. Omzetnya Rp 7-10 juta per bulan. "Kalau sedang ramai, seperti bulan puasa atau menjelang Lebaran, omzet kami bisa mencapai Rp 15 juta per bulan," kata Sahadiah. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggota KSM serta karyawan. Keuntungan dihitung setelah dikurangi pembelian bahan baku dan pembayaran pinjaman.

Produk mebel tersebut lambat-laun dikenal banyak orang. Promosinya dari mulut ke mulut. Bukan cuma di Majene, produk KSM Regenerasi juga merambah ke kabupaten lain, seperti Mamuju, Polewali Mandar, ke luar Provinsi Sulawesi Barat, bahkan hingga ke Kalimantan.

Lantaran usahanya semakin maju dan besar, KSM Regenerasi bisa memperoleh kredit perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat. Pada akhir 2012, KSM ini mendapatkan kucuran kredit senilai Rp 50 juta. Meski harus membayar bunga kredit lebih tinggi ketimbang bunga pinjaman bergulir, pembayaran cicilannya tetap lancar.

Yang penting, Sahadiah merasa senang denyut usaha KSM Regenerasi sudah mampu menghidupi banyak orang di Kelurahan Baru. Warga yang sebelumnya menganggur kini memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Termasuk Sahadiah dan suaminya, yang bisa membiayai kebutuhan hidupnya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil meraih cita-cita. ■

SIWALIPARRI TERDIRI ATAS TIGA SUKU KATA: *SI* BERARTI BERHADAPAN, *WALI* (MEMBANTU), DAN *PARRI* (SUSAH). JADI ARTI *SIWALIPARRI* ADALAH SALING MEMBANTU, BERGOTONG-ROYONG, DAN SUSAH SENANG DITANGGUNG BERSAMA.

Pada masa Hindia Belanda, Morokrembangan di Surabaya terkenal sebagai kawasan pangkalan militer Angkatan Laut. Ratusan pesawat dan kapal laut bersenjata lengkap berlabuh di sini. Negeri Kincir Angin itu juga membangun fasilitas pelabuhan hingga kanal pintu air. Namun pasca kemerdekaan, Morokrembangan justru semakin merana. Kawasan ini semakin padat dan termiskin di Surabaya.

MENATA MOROKREMBANGAN

Anak-anak bermain bola pada sepetak lapang dekat muara. Airnya hitam dan penuh tumpukan sampah. Di sepanjang aliran muara itu tampak beberapa kapal ikan berlabuh. Termasuk bangunan fasilitas umum untuk toilet dan lokasi pasar ikan. Di siang hari yang terik itu, warga duduk bersila sambil bermain kartu.

“Kawasan ini masih ditata dan belum selesai,” kata Halnawi, 72 tahun sambil berjalan kaki melewati kawasan rumah warga di Morokrembangan, Surabaya. Halnawi, mantan polisi sekaligus guru ini, adalah salah satu warga yang sudah lama tinggal di sini.

Morokrembangan masuk dalam perhatian program PNPM Perkotaan. Di sini, kegiatan PNPM meliputi pembenahan paving blok, sarana air bersih dan simpan

pinjam.

Halnawi merasakan bagaimana perkembangan dan kehidupan di Morokrembangan dari waktu ke waktu.

“TENTU SEMUA KEGIATAN YANG DILAKUKAN INI MELALUI PERENCANAAN YANG MATANG DENGAN MELIBATKAN WARGA SERTA MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL. DI SINI SALAH SATU YANG MENJADI *PILOT PROJECT* KAMI,”

Djoko Kirmanto, Menteri PU (2004-2014)



Kawasan ini semakin padat sejak tahun 1970'an. Morokrempangan terus dibanjiri oleh pendatang dari berbagai daerah. Khususnya, warga dari Madura dan pesisir utara Surabaya lainnya seperti Lamongan dan Gresik. Mereka mulai membangun rumah dan memadati kawasan pesisir Surabaya ini.

"Morokrempangan terkenal sangat kumuh," katanya. Kawasan padat pemukiman ini mulai menjadi persoalan bagi Surabaya. Tiap tahun, kawasan ini terendam oleh banjir dan meluap hingga ke perkotaan akibat tersendatnya aliran air. Kanal-kanal pintu air yang dibangun oleh Belanda terbengkalai dan penuh dengan sampah. Tak salah, jika kawasan ini termasuk paling kumuh di Indonesia.

Pemerintahan Surabaya dan pusat ingin menyulap kawasan ini sebagai pemukiman layak huni dan asri. Salahsatu yang dibenahi mulai dari instalasi pompa banjir, pemasangan paving blok untuk jalan, saluran air bersih hingga membangun kolam untuk menampung genangan air hujan. Pemerintah juga mendorong agar warga berpartisipasi dan menjaga kebersihan. Usaha menyulap Morokrempangan ini mulai menuai hasil.

"Kita manfaatkan untuk budidaya ikan lele. Hasilnya untuk kelompok," kata Suminah. Sejak tahun 2012,

warga membentuk kelompok usaha ikan lele ini. Mereka membangun keramba di kolam penampungan air hujan. Usaha ini, menurutnya sangat membantu ekonomi warga Morokrempangan.

Ia mengaku senang dengan usaha menyulap Morokrempangan ini. Termasuk perubahan perilaku warganya yang tak lagi membuang sampah, dan menjaga lingkungan di Morokrempangan tetap bersih dan asri.

Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun 5 unit pompa banjir. Dan menjadi benteng untuk mengatur aliran pasang surut air. Hasilnya, Morokrempangan bebas dari banjir dan tak lagi meluap hingga ke sudut Surabaya lainnya. Tiap hari juga terdapat petugas yang menyisir sampah yang terbawa air.

"Tentu semua kegiatan yang dilakukan ini melalui perencanaan yang matang dengan melibatkan warga serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Di sini salah satu yang menjadi pilot project kami," kata Menteri PU, Djoko Kirmanto. Selain Surabaya kota lain yang menjadi sasaran utama adalah Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar.

"Kawasan kita selalu juara dalam kebersihan. Warga kompak untuk menjaga kebersihan," kata Suminah bahagia. ■

Buku dan Laporan

- Inovasiku Untuk Negeri, 2012, PNPM Support Facility.
- PSF Progress Report, 2010, PNPM Support Facility.
- Surat Dari Desa, 2007, Dirjen PMD Depdagri.
- The Sky Is Our Roof, The Earth Is Our Floor, Steven Sager, 2008, Australian National University.

Online

www.menkokesra.go.id
www.p2pkp.org
www.beritajatim.com
www.jurnalparlemen.com
www.padangekspres.co.id
www.detik.com
www.worldbank.org
www.kompas.com
www.antaraneews.com
www.pnpm-mandiri.org
www.katadata.co.id

Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara



Didukung oleh:

